

Tiga Landschap Di Sulawesi: Banggai, Bungku dan Mori

O. H. GOEDHART.

Controleur dengan Pemerintahan Dalam Negeri.

O. H. GOEDHART "[Drie Landschappen in Celebes \(Banggai, Boengkoe, Mori\)](#)" *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 50 (1908): 442-548.

Landschap Banggai.

§1. Batas-batas.

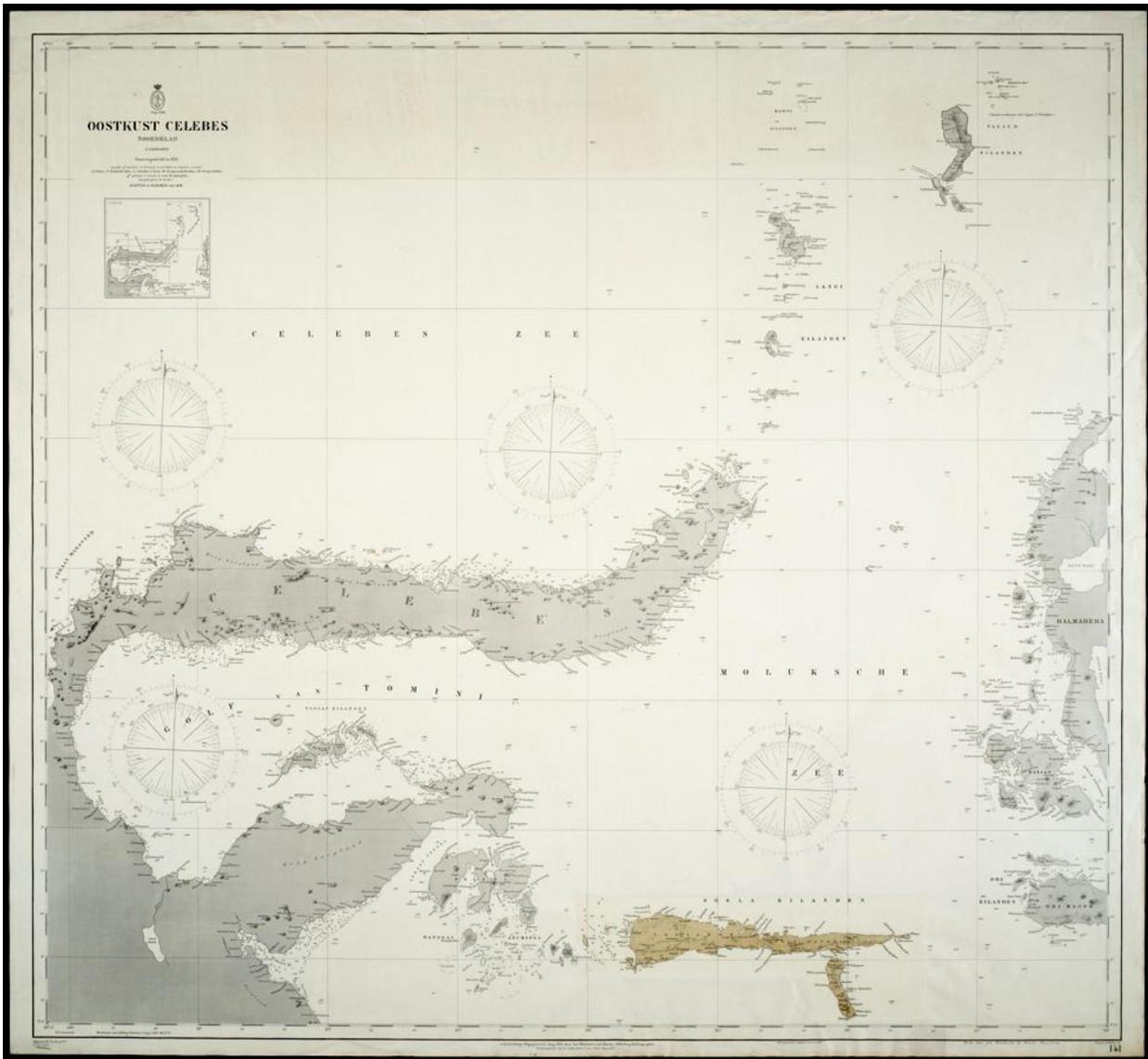
Landschap Banggai terdiri dari:

- a.* yang disebut kepulauan Banggai dan
- b.* bagian daratan Sulawesi dengan beberapa pulau yang terletak di sebelah utara.

Sub a. Kepulauan Banggai adalah gugusan pulau besar dan kecil yang terletak antara 1° dan 2° Lintang Selatan dan 122° 42' dan 124° Bujur Timur, yang pulau utamanya yang awalnya disebut Gapi, kemudian disebut Banggai oleh orang To Ternate karena pada saat itu sangat padat penduduknya sehingga menjadi hutan belatung (dalam bahasa Ternate, banga gai kemudian disingkat menjadi Banggai). Kepulauan ini dikelilingi oleh pulau-pulau

Peleng, Bangkulu, Labobo, dan banyak lagi lainnya. Dari semua pulau tersebut, hanya empat pulau yang dihuni sekitar 50 tahun lalu, yaitu Banggai, Peleng, Labobo, dan Bangkulu. Ketika kemudian, sebagai akibat dari tindakan Pemerintah, pembajakan Tobelo dan Mangindanau di perairan Banggai dihentikan, beberapa pulau lainnya juga dihuni atau ditanami dengan harta benda atau perkebunan lainnya oleh penduduk pulau-pulau utama.

Sub b. Awalnya wilayah Banggai hanya terdiri dari pulau-pulau yang disebutkan di bawah a, kemudian raja-raja menambahkan Landschap yang terletak di semenanjung timur laut Sulawesi. Bagian Banggai ini tersapu oleh laut di timur laut dan selatan dan berbatasan dengan



Peta Pantai Timur Sulawesi, [KITLV, 1922](#).

Tojo dan Bungku di sebelah barat; batas barat ini dimulai di utara di Tanjong Api di teluk Tomini dan berakhir di selatan di pulau kecil Togon-Téon; bagaimana batas ini mengalir ke pedalaman tidak diketahui baik oleh Landschap Banggai maupun Bungku.

§2. *Administrasi dan peradilan; hubungan dengan Kesultanan Ternate; pendapatan sultan dan pejabatnya.*

Landschap Banggai diperintah oleh seorang raja yang awalnya disebut “Adi”, kemudian

disebut Mumbu, dan sekarang disebut “*Toutu*” dalam bahasa nasional dan disapa dengan gelar “*Sosa*” (semua kata ini berarti “tuan”). Wilayah kekuasaannya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan sultan Ternate; karena itu ia merupakan bawahan Pemerintahan [Belanda]. Dalam menjalankan pemerintahan, ia dibantu oleh apa yang disebut “*kumis-sambat*” (= empat pegawai; namun, ada lima) yaitu:

Jogugu atau penguasa,

Kapitan laut,

Hukum Tuwa atau *Panambéla Langka 1*,

Hukum to Lolak atau *Panambéla to Lolak*,
Hukum Buyu atau *Panambéla Buyu*.

Raja tidak mengambil tindakan penting apa pun, tidak memberikan perintah yang berdampak luas, kecuali jika ia berkonsultasi terlebih dahulu dengan “kumis empat”. Setelah keputusan dibuat Jogugu memastikan pelaksanaannya dan semua kepala daerah wajib mengikuti instruksi yang diberikan oleh Jogugu.

Selain itu, semua hal harus dilaporkan kepada Jogugu sebelum disampaikan kepada raja. Jika raja tidak ada di tempat orang ini adalah administrator sementara dan hanya dapat meninggalkan Pulau Banggai dalam kasus-kasus yang sangat mendesak. Hal ini juga berlaku ketika raja tinggal sementara di luar wilayah tersebut.

Pada masa perang Kapitan Laut adalah “Panglima Tertinggi” pasukan “Banggai”; pada masa damai, ia biasanya diutus untuk menyelidiki ketika terjadi kejahatan serius di salah satu wilayah jajahan Banggai.

Untuk keperluan lain, salah satu “kumis empat” atau salah satu “*Sengaji empat*” atau salah satu Sengaji yang berada di bawah komandonya diutus. Hanya dalam kasus yang sangat serius seperti pecahnya permusuhan antar suku besar, Jogugu sendiri yang melakukan perjalanan. Ketika membahas masalah-masalah penting, “Sengaji empat” selalu terdengar; mereka adalah, selain Jogugu, kepala-kepala daerah Banggai asli dan mereka digelar “Adi” sebelum ada “Mumbu” seperti Jogugu. Sekarang mereka tidak lain hanyalah penasihat, kepala empat dari delapan distrik yang menjadi bagian Pulau Banggai.

Pemerintah juga mencakup para perwira. Para perwira ini tidak hanya pemimpin pasukan tetapi juga perantara antara raja dan kepala distrik yang berada di bawahnya; masing-masing dari mereka memiliki satu atau lebih Sengaji di bawah perintahnya dari wilayah

tempat ia memperoleh pendapatannya. Namun, mereka tidak diperlukan untuk pemerintahan yang baik. Keberadaan mereka hanya dapat dikaitkan dengan keinginan untuk membantu banyak keturunan kerajaan mengolah pekerjaan yang menguntungkan. Yang paling penting dari mereka digelar *Mayoor Ngofa* atau *Mayoor Kompania*; di antaranya adalah:

Mayoor Tano,
Kapitan Ngopa,
Letnan Ngopa,

Kapitan Kié, dan empat letnan lainnya, yang salah satunya menjalankan fungsi sebagai “Letnan Ajudan” dan harus hadir dalam kapasitas tersebut di “Ngaralamo” atau “pintu besar” (ruang sidang, yang disebut “jagaan” di Banggai) saat “kumis empat” bertemu di sana untuk menyampaikan keputusan yang mereka ambil kepada raja. Raja hanya ikut serta dalam pertemuan di “ngaralamo” saat mereka diketuai oleh pemegang jabatan Eropa yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk departemen Banggai sekitar tiga puluh tahun yang lalu. Landschap harus melaporkan semua insiden penting kepadanya, sementara tindakan yang dimaksudkannya harus diberitahukan kepada pejabat tersebut terlebih dahulu; ia berhak melarang pengambilan tindakan tersebut. Sebagai penasihat, ia berwenang untuk mengajukan usul kepada Landschap yang dibahas dalam “Ngaralamo”.

Kembali ke pemerintahan asli, saya harus menyebutkan bahwa pemerintahan ini mencakup tiga kepala bangsawan yang menyandang gelar Miantu, yang masing-masing terdapat satu atau lebih kepala distrik di bawahnya. Mereka adalah:

1 *Miantu Palabatu*,
2 *Miantu Basaang*, dan
3 *Miantu Liang*.

Pejabat lainnya adalah: *sadaha kié* dan *sadaha kadato* dan *gimalaha*, sementara dua

jujur telah ditambahkan ke Landschap dengan gelar *sekretaris* dan *sowohi*. Semua ini juga memiliki satu atau lebih pejabat sengaji di bawah mereka yang darinya mereka memperoleh penghasilan.

Semua kepala yang disebutkan di halaman ini dan sebelumnya dipanggil ke “ngara lamo” ketika urusan nasional yang paling penting perlu dibahas.

Gimalaha adalah kepala langsung “sengaji empat”; jika salah satu dari mereka memiliki sesuatu atau yang lain, ia pertama-tama mendatangi gimalaha; yang, karena tidak tahu jawabannya, merujuk pelapor ke salah satu “kumis empat” atau kompanya utama.

Berikut ini adalah rangkuman dari kepala-kepala yang disebutkan di atas, yang disusun berdasarkan pangkat yang dimilikinya, yang mana peringkat tersebut harus diikuti pada kesempatan-kesempatan resmi:

1. Jogugu,
 2. Kapitan laut,
 3. Mayoor ngofa,
 4. Mayoor tano,
 5. Hukum tuwa,
 6. Kapitan ngofa,
 7. Letnan ngofa,
 8. Hukum to Lolak,
 9. Hukum buyu,
 10. Kapitan kiyé,
 11. Sadaba kiyé,
 12. Gimalaha,
 13. Sengaji Tanobonunungan,
 14. Sengaji Tanododung
 15. Sengaji Moonsongan
 16. Sengaji Gonggong
- empat yang terakhir adalah Sengaji empat.

Kecuali jabatan Sekretaris dan Sowohi serta jabatan Kalim dan anggota ulama lainnya, yang hanya memerlukan pengetahuan yang cukup untuk pengangkatannya, semua martabat dan

jabatan tersebut di atas termasuk jabatan Raja adalah turun-temurun dalam keluarga tertentu, namun dalam arti bahwa ayah tidak selalu harus digantikan oleh anak laki-laki karena selain memperhatikan garis keturunan juga harus diperhatikan kemampuan dan perilaku calon.

Pengangkatan *raja*, *Jogugu*, *Kapitan laut*, kemudian *Mayoor ngofa*, *Mayoor tano*, *Kapitan ngopo*, *Letnan ngopa*, *Kalim* dan *Sengaji empat* berasal dari Sultan Ternate, dengan tiga yang pertama hanya setelah memperoleh persetujuan dari Residen. Adapun posisi lain yang disebutkan termasuk kepala distrik, pengangkatan dilakukan oleh raja Banggai yang berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kumis empat, kadang-kadang juga dengan Sengaji empat dan memberitahukan pengangkatan tersebut kepada Sultan. Ketika diangkat oleh Sultan, ia memberikan seragam dinas yang ditentukan kepada orang yang diangkat sebagai hadiah; ketika diangkat oleh Raja, hadiah tersebut diberikan kepada orang yang diangkat.

Terlepas dari siapa yang mengangkat, ini didahului oleh nominasi oleh Landschap di mana dua atau lebih kandidat direkomendasikan; walaupun Raja diharuskan untuk memilih dari mereka, Sultan dapat mengabaikan nominasi tersebut, para calon dikirim ke Ternate dan di sana tindakan mereka diamati selama beberapa waktu oleh pemerintah Ternate. Baru pada saat itulah pengangkatan dilakukan, kecuali jika tidak ada seorang pun calon yang berkenan di hati Sultan, dalam hal ini ia akan memanggil satu atau lebih calon yang tersisa ke ibukotanya untuk berkenalan. Ia juga memperoleh informasi tentang berbagai calon dari sekelompok pejabat yang telah ia tempatkan di Banggai; jumlahnya ada empat, yaitu *Utusan*, wakil Sultan, *Jurutulis*, wakil Kalim Ternate, *Kapitan kota*, yang mewakili Jogugu Ternate, dan *Kapitan kruis*, yang menggantikan Kapitan

laut Ternate.

Keempat orang ini juga membentuk apa yang disebut "Komies ampat", yaitu dewan yang sebelum terbentuknya posthouder Eropa di Banggai sebenarnya memiliki kendali di sini baik dalam hal-hal duniawi maupun keagamaan; tanpa sepengetahuan mereka terlebih dahulu dan sering kali juga persetujuan, baik pemerintah Banggai maupun pendeta pribumi tidak dapat mengambil tindakan apa pun atau menyelesaikan masalah apa pun. Keterlibatan mereka dalam urusan internal lanskap meluas hingga ke masalah-masalah yang paling tidak penting. Akan tetapi, pembentukan perwakilan pemerintah telah memberikan pukulan yang signifikan terhadap otoritas mereka karena pada gilirannya hal itu mengharuskan mereka untuk menahan diri dari menyelesaikan masalah-masalah tanpa sepengetahuan posthouder dan tidak dapat lagi mengenakan denda sesuka hati mereka karena dugaan pelanggaran oleh penduduk pribumi atau perlakuan yang dianggap merendahkan.

Akan tetapi, pengaruh Utusan masih begitu besar sehingga raja tidak akan berani melaksanakan perintah dari pemegang jabatan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Utusan. Lebih jauh lagi, kasus-kasus perceraian tidak boleh ditangani dan diselesaikan oleh kalim Banggai tetapi hanya dan secara eksklusif oleh Jurutulis Ternate.

Hubungan Utusan dengan raja diibaratkan seperti hubungan ayah dengan anaknya; Jurutulis lebih tinggi dari Kalim, Kapitan kota lebih tinggi dari Jogugu dan Kapitan kruis lebih tinggi dari Kapitan laut.

Selain itu, di daratan Sulawesi, seorang *Utusan* yang ditunjuk oleh "Kumis ampat" Ternate ditempatkan di Mandono. Ia biasanya dipilih dari peranakan To Ternate di Banggai dan memiliki Jurutulis yang ditunjuk oleh raja Banggai yang ditempatkan di Kimtong.

Utusan ini diinstruksikan untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang dilakukan oleh para kepala distrik di daratan yang bertentangan dengan kepentingan Ternate. Sama seperti pejabat Ternate yang berkedudukan di Banggai, baik Utusan Mandono maupun jurutulisnya tidak menikmati pendapatan tetap; masing-masing dari mereka memiliki akses harian ke sejumlah orang rodi yang diwajibkan untuk melakukan semua jenis layanan domestik untuk mereka dan yang juga dapat dibawa bersama mereka saat bepergian; mereka menyebutnya "koki". Namun penduduk setempat menyebutnya dengan nama "lambanua".

Utusan Banggai berhak atas 4 koki, Kumis ampat lainnya masing-masing 3 koki, dan Utusan Mandono dan juru tulisnya masing-masing 2 koki. Distrik-distrik tertentu telah ditetapkan untuk penyediaan para wajib pegawai ini. Pendapatan lain yang dianggap diizinkan dari pejabat Ternate terdiri dari:

a. sebagian pajak yang harus dibayarkan setiap tahun oleh orang Bajau yang menangkap ikan di perairan Banggai kepada Sultan Ternate, yaitu apa pun yang menghasilkan pajak lebih dari f300. Pajak tersebut tidak dibayarkan secara tanggung renteng, tetapi per kano, "padewakang," atau per rumah, pajak dalam kasus pertama adalah f4,-, dalam kasus lainnya f 2,- per tahun.

Rata-rata menghasilkan f450,- per tahun. Dari jumlah ini, Jurutulis menerima f10,- sebagai tunjangan untuk alat tulis sementara f140,- dibagikan kepada "Kumis ampat".

b. bagian dari jumlah yang harus dibayarkan oleh orang yang bukan penduduk asli Banggai kepada Sultan untuk izin mendirikan perkebunan kelapa, izin yang diberikan atas nama Sultan oleh raja Banggai dan Utusan, dan dibayar f0,10 per pohon; setengah dari jumlah ini diberikan kepada Sultan, seperempatnya

kepada raja dan sisanya kepada pejabat kolektif Ternate.

c. untuk menyelesaikan perkara perdata kecil, 10% dari nilai yang disengketakan.

d. Bila bepergian dalam kepanitiaan di luar Pulau Banggai, upeti berupa beras, sagu, ubi, buah-buahan, ayam, kambing, dulang, barang-barang putih atau merah, kain sarung, minyak kelapa dan sebagainya harus diberikan kepada orang yang diutus dalam kepanitiaan oleh kepala daerah yang dikunjungi. Pejabat Ternate sering menyalahgunakan hal ini dengan menuntut lebih dari yang ditentukan adat.

Pendapatan yang tidak sah termasuk pengenaan denda uang tanpa melibatkan Posthouder yang saya ketahui selama kehadiran saya di Banggai dari dua kasus terkini pada akhir tahun 1906.

Selain pendapatan Sultan tersebut di atas, setiap tahun ia mengambil dari Banggai 3 pikol lilin murni (dengan harga f90 de pikol), 1 "kakuwa" (topi buatan dalam negeri, terbuat dari gaba-gaba yang ditemplei potongan-potongan kecil daun dan batang anggrek, serta berbagai macam figur dari kertas dan kain merah serta potongan mika) dan 1 "kabila" (kotak sirih yang terbuat dari bahan yang sama).

Akhirnya, ia menerima sejumlah uang tetap setiap tahun dari "Perusahaan Dagang Nugini Belanda". Di Banggai tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak yang diberikan oleh asosiasi itu untuk hak, dengan mengesampingkan semua orang lain kecuali orang Bajau, untuk mempraktikkan penangkapan mutiara di perairan Banggai.

Institusi lain yang menunjukkan hubungan subordinat Banggai dengan Ternate adalah yang disebut "Hakim sultan", pengadilan yang diketuai oleh Posthouder dan terdiri dari raja dan Kumis empat Banggai, dan Utusan dan pejabat Ternate lainnya. Penduduk asli yang diduga bersalah melakukan kejahatan atau

pelanggaran dapat diadili di pengadilan ini asalkan pelanggaran tersebut tidak dapat dihukum mati menurut ketentuan pidana kita, jika tidak, kasus tersebut harus diadili oleh Dewan Negara di Ternate. Selanjutnya, semua kasus perdata penting apa pun di mana seseorang yang termasuk penduduk asli menjadi terdakwa diadili oleh Hakim sultan. Kasus-kasus yang melibatkan penduduk asli dari Landschap lain sebagai terdakwa atau para terdakwa diselesaikan oleh Posthouder, yang kemudian bertindak sebagai hakim atau oleh dewan tanah di Ternaté.

Denda yang dijatuhkan oleh "Hakim Sultan", baik yang dibayarkan dengan uang maupun barang seperti kain linen, dulang tembaga, dsb., (dalam hal ini barang-barang tersebut dicairkan terlebih dahulu) disetorkan ke Kas Landschap, yang di sini disebut "kas negeri".

Saya telah diberitahu oleh berbagai sumber bahwa dalam beberapa tahun terakhir sistem denda juga harus diterapkan secara umum untuk kejahatan serius seperti pembunuhan dan pembunuhan berencana dan ketidakamanan pasti meningkat secara signifikan sebagai akibatnya. Jika bukti yang dianggap perlu oleh hukum kita tidak segera diperoleh terhadap tersangka kejahatan tersebut, anggota keluarga korban merasa puas dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atau, jika ia sedang melarikan diri, kerabat terdekatnya dengan denda, yang jumlahnya bervariasi antara f80 dan f400 dan, jika tidak sepenuhnya maka setidaknya sebagian besar dibayarkan kepada pihak lain.

Ini adalah penyelesaian yang sangat mudah. Sejak awal, orang-orang berkomitmen untuk mengklarifikasi kasus tersebut dan mengidentifikasi serta menyelidiki orang-orang yang diduga melakukannya, namun, tampaknya, keadilan telah ditegakkan!

Akan tetapi, pemerintah Banggai tampaknya

tidak menyadari bahwa hal ini secara bertahap akan menghilangkan rasa takut melakukan pembunuhan di antara mereka yang kaya atau memiliki saudara sedarah yang kaya. Kapitan laut menceritakan kepada saya sebuah kasus di mana seorang terdakwa pembunuhan dijatuhi hukuman denda sebesar f300 dulang (pada harga f1,25) dan ketika meninggalkan ruang sidang berkata: “bahkan jika saya harus membayar 700 gulden, saya akan melakukannya. Orang itu kaya dan begitu pula keluarganya; denda itu segera dibayar dan masalahnya selesai!

Dua kejadian berikutnya memberikan pandangan yang aneh tentang situasi tersebut. Sekitar setahun yang lalu, seorang anggota suku To Luinan, suku Alfur yang tinggal di pedalaman semenanjung timur laut Sulawesi, dibunuh di pedalaman Mehoki yang kaya damar oleh To Lalaki, yang datang dari Laiwui untuk mengumpulkan hasil hutan. Sukunya segera bersiap untuk membalas dendam atas pembunuhan itu dan telah membuat persiapan yang diperlukan untuk perburuan kepala suku ketika kepala distrik Kientong, yang menjadi bawahan mereka, menerima perintah dari pemegang jabatan di Banggai untuk pergi ke Mehaki untuk menyelidiki masalah tersebut. Ini terjadi, tetapi bagaimana! Suku To Lalaki telah pergi. Karena itu, ini bukan alasan bagi To Luinan untuk menghentikan masalah tersebut untuk sementara waktu; kematian suku mereka harus dibalaskan di Mehaki yang tidak menjadi masalah. Para pedagang yang bermukim di pesisir dan tertarik pada perdagangan damar, sebagian besar orang Bugis dan orang asing lainnya, khawatir bahwa mereka tidak akan dapat memenuhi kewajiban mereka kepada para pemimpin mereka jika keadaan kerusuhan di pedalaman terus berlanjut. Tetapi hasilnya adalah bahwa banyak pencari damar yang telah meninggalkannya kemudian membayar harga

darah seperti biasa kepada keluarga korban yang terbunuh sehingga menyuap niat To Luinan untuk melakukan perburuan kepala di antara suku ini. Itulah akhir dari masalah tersebut.

Sekitar sebulan yang lalu, sekali lagi di Mehaki, kali ini di pesisir, terjadi pembunuhan empat kali terhadap peranakan To Luinan dari Tangkiang dan Batui; yang diduga dilakukan oleh Utusan dari Mandonu. Penyelidikan tidak membuahkan hasil dan orang-orang sudah mendengar rencana To Luinan untuk melakukan pembunuhan di Mehaki ketika para pedagang memutuskan untuk membayar harga darah. Pedagang grosir Said Abu Bakar, yang tinggal di Palima, yang kebetulan dekat Mehaki, menambahkan 40 potong ke barang-barang yang dikumpulkan oleh para pedagang untuk menyenangkan To Luinan dan membicarakan rencana mereka untuk melakukan ekspedisi pengayauan.

Beberapa kasus seperti itu telah menarik perhatian saya. Namun, hal-hal di atas sudah memberikan bukti yang cukup untuk kurangnya kepastian hukum yang ada di sebagian besar lanskap Banggai.

§3. Pembagian wilayah ke dalam distrik-distrik dan komponen-komponennya; pengaturan administrasi distrik dan pendapatan kepala distrik.

Nomor	Nama Distrik	Tempat Kampong
I	Tanobonunungan	Pulau Banggaai
II	Dodung	Pulau Banggaai
III	Moonsongan	Pulau Banggaai
IV	Gonggong	Pulau Banggaai
V	Boneaka	Pulau Banggaai
VI	Lampa	Pulau Banggaai
VII	Putal	Pulau Banggaai
VIII	Pao Banggaai	Pulau Peling
IX	Lolantang	Pulau Peling
X	Bulagi	Pulau Peling
XI	Peling	Pulau Peling
XII	Liang	Pulau Peling

XIII Apal	Pulau Peling
XIV Paisulunu	Pulau Peling
XV Tinangkom	Pulau Peling
XVI Bonitom	Pulau Peling
XVII Popisi	Pulau Peling
XVIII Totikom	Pulau Peling
XIX Sambut	Pulau Peling
XX Kumbutokan	Pulau Peling
XXI Pèlèd	Pulau Peling
XXII Pondi Pondi	Pulau Peling
XXIII Tambolog	Pulau Peling
XXIV Luwok Sago	Pulau Peling
XXV Meslese	Pulau Peling
XXVI Sea-sea	Pulau Peling
XXVII Pololo	Pulau Peling
XXVIII Luwok Papanenteng	Pulau Peling
XXIX Tatakalah	Pulau Peling
XXX Batui	Daratan Sulawesi
XXXI Tangkiang	Daratan Sulawesi
XXXII Kientom	Daratan Sulawesi
XXXIII Mandons	Daratan Sulawesi
XXXIV Lontiu	Daratan Sulawesi
XXXV Nambo	Daratan Sulawesi
XXXVI Luwòk	Daratan Sulawesi
XXXVII Basama	Daratan Sulawesi
XXXVIII Lamala	Daratan Sulawesi
XXXIX Pokobondolang	Daratan Sulawesi
XL Sinohowan dan Pu-Umbana	Daratan Sulawesi
XLI Bangkulu	Pulau Bangkulu
XLII Mansalean	Pulau Labobo
XLIII Lipu Lalongo	Pulau Labobo
XLIV Biookan	Pulau Biookan
XLV Pangkalsiang	Daratan Sulawesi
XLVI Powat	Pulau Powat

Berikut ini penjelasan tentang keadaannya: dari 35 dari 46 distrik yang menjadi pembagian wilayah Banggai, kepala distrik tertinggi bergelar Sengaji,¹ yang dalam bahasa Banggai diterjemahkan sebagai “basalo”, sehingga dalam bahasa Banggai disebut “Basalo Tanabonungan”, “Basalo Dadung” dan seterusnya. Satu atau beberapa kepala distrik yang lebih rendah umumnya membantu dia dalam menjalankan pemerintahan. Jika di antara mereka ada yang bergelar Basalo atau Sengaji Tamano atau Anamatua atau Kapitan Langkat, maka

orang ini, jika Sengaji tidak ada, menjadi wakilnya yang sah. Jika kepala distrik tersebut tidak ada, fungsi kepala distrik untuk sementara waktu dijalankan oleh satu atau beberapa kepala distrik yang lebih rendah yang ditunjuk untuk tujuan ini oleh Landschap sementara orang lain juga dapat ditugaskan untuk sementara waktu. Sengaji bertindak sebagai wakil dari “Sengaji empat”.

Distrik-distrik tersebut tidak dapat dianggap sebagai daerah yang membulat; di beberapa distrik, satu atau lebih kampung benar-benar terkurung di antara kampung-kampung distrik lainnya, suatu keadaan yang menyebabkan jumlah kepala suku lebih banyak daripada yang seharusnya dan menunjukkan bahwa penduduk Banggai, sebagaimana sebagian masih terjadi di Landschap Mori, pada awalnya terdiri dari beberapa suku yang benar-benar independen satu sama lain tanpa tempat tinggal tetap.

Hal ini tampak jelas dari kenyataan bahwa bawahan seorang kepala distrik tidak lepas dari kekuasaan kepala distrik itu, sekalipun ia bermukim di luar wilayah kekuasaannya di suatu daerah di kampung milik Sengaji lain. Dengan demikian, ia tidak meninggalkan sukunya sendiri dan tetap bertanggung jawab sebagian atas pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh sukunya terhadap “tuan”, yakni raja, dan juga tidak boleh mengelak dari kewajiban untuk memberikan bantuan yang menjadi kewajiban kepala sukunya.

Tidak diinginkannya kelanjutan situasi ini demi kepentingan pemerintahan yang baik tentu tidak perlu diperdebatkan dan hal ini telah lama diakui oleh Swapraja Banggai, terlihat dari sikap para Kapitan terhadap penduduk yang sudah ada sejak lama di Pulau Labobo, Bangkulu, Bwokang, dan Powat. Akan tetapi,

¹ Bandingkan kombinasi Polinesia-Arya Sang-aji di Jawa. EDITOR

para pemimpin ini sejak awal harus terus-menerus berjuang, dan masih harus berjuang, melawan semangat konservatif penduduk yang terdiri dari komponen-komponen yang sangat heterogen. Tidak jarang setelah ada perintah dari sebagian penduduk yang berasal dari daerah lain, mereka harus belajar bahwa perintah itu tidak dapat ditindaklanjuti, yakni karena perintah itu tidak diberikan kepada suku mereka sendiri oleh kepala suku mereka sendiri. Swapraja tampaknya tidak dapat mengakhiri situasi ini secara efektif dan menganggap kelemahan ini barangkali karena kelonggaran, telah memperparah keadaan karena hal itu tidak hanya membuat penduduk lebih cenderung mengabaikan para Kapitan karena hal itu tidak hanya membuat penduduk lebih cenderung untuk tidak lagi peduli kepada para Kapitan sama sekali, tetapi juga membawa sebagian dari mereka pada gagasan untuk menarik diri dari otoritas para kepala suku. Dengan demikian, sekarang kita temukan di berbagai daerah di Banggai orang-orang yang tidak taat kepada otoritas apa pun, suatu keadaan yang sangat berkontribusi untuk semakin melemahkan prestise para kepala suku yang memang sudah tidak begitu besar.

Seperti yang telah saya catat di atas, kepala distrik ditunjuk oleh raja dan mereka dipilih dari keluarga tertentu. Di masa lalu, pemilihan di distrik dilakukan oleh kepala-kepala distrik yang lebih rendah dan kepala-kepala ulama yang harus mempertimbangkan keinginan rakyat dan setelah pemilihan harus pergi bersama orang yang terpilih ke kota utama Banggai untuk bertemu dan memberi tahu Swapraja tentang hasilnya, apakah menyetujui pemilihan atau tidak; dalam kasus terakhir pemilihan baru akan diadakan. Dalam sepuluh tahun terakhir pemilihan kepala distrik tidak dilakukan menurut sistem tetap yang diuraikan di atas. Metode ini jarang diikuti lagi tetapi sering

diganti dengan metode di mana kepala-kepala distrik yang lebih rendah datang dengan dua atau lebih kandidat kepada Jogugu, yang, setelah berkonsultasi dengan "kumies ampat" lainnya, membuat usulan untuk diangkat kepada raja. Metode lain adalah bahwa Swapraja memberi pemilih yang memenuhi syarat pilihan dari antara dua atau tiga pemilih yang memenuhi syarat yang ditunjuknya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan dewan distrik telah sangat berkurang selama bertahun-tahun; sebagian besar dari mereka telah menjadi badan-badan yang tidak lagi memiliki kekuatan dan yang bagi sebagian penduduk Muslim kurang dihormati.

Para kepala distrik juga menerima pendapatan seperti itu; saya tidak tahu untuk apa semua itu. Meskipun berikut ini tidak lengkap, dapat disimpulkan sampai batas tertentu apa yang diterima oleh kepala distrik-kepala distrik lainnya. Dimulai dengan Sengaji di Pulau Banggai, para kepala distrik di *Tanobanunungan* menerima setiap tahun:

65 kati lilin (tidak murni) senilai	f32.50,
1/2 kati kasturi senilai	f25.-,
3 lembar kain katun tidak diputihkan senilai	f 4.50,
Total	f 62.-

Untuk ini harus ditambahkan hasil dari satu sawah dan satu ladang ubi yang ditanam oleh penduduk dengan kerja paksa; mereka dari *Dodung* dan *Moonsongan* masing-masing menerima 20 kati lilin tidak murni (f10 gulden), ¼ kati kasturi (f12,50 gulden) dan hasil dari dua sawah yang ditanam dengan kerja paksa;

Dari *Gonggong* f13,- dalam bentuk tunai, 1/5 kati kasturi dan 20 kati lilin mentah (total f33);

Para kepala distrik di pulau Peleng *Lipua-*

dino dari *Lolantang* menerima:

a. dari masing-masing Sengaji Lalantang, Sui dan Palabatu 1 ekor kambing, 5 lilin kati dan 100 kalamata (= keranjang) kombili (sejenis buah tanah) yang semuanya bernilai *f*27 gulden.

b. dari masing-masing Sengaji Batukoki dan Tambus 30 kati malam, 60 kalamata kombili, 10 bansung sagu, dan 2 sampai 3 lembar kapas mentah dengan nilai gabungan sebesar *f*47,50;

c. dari gabungan Sengaji Kaléké dan Loingsam 44 bansung beras sebanyak 5 kati, 44 ekor ayam dan 44 hasta kapas mentah, dengan nilai gabungan sebesar *f*30.

Selain itu, penduduk diwajibkan untuk membangun dan memelihara rumah pribadi bagi kepalanya;

Sengaji Liang: 25 gulden tunai dan 1 dari hasil sero, sementara penduduk juga harus menggarap ladang ubi dan membangun rumah serta menyediakan dua orang pembantu setiap hari;

Sengaji Paisulunu: 25 kati lilin mentah (12,50 gulden), penduduk juga harus membangun rumah untuk kerja paksa dan mengolah ladang ubi serta menyediakan dua pembantu setiap hari;

Sengaji Tinankom: 20 kati lilin mentah dan 1 kambing, penduduk selanjutnya diwajibkan membangun rumah, mengolah ladang ubi dan menyediakan 2 pembantu setiap hari, semuanya dalam bentuk kerja paksa;

Sengaji Banitom: 7 gulden tunai, 10 kelapa dan 1 botol minyak kelapa, penduduk juga harus membangun rumah dalam bentuk kerja paksa dan mengolah ladang ubi, yang hasilnya diperkirakan mencapai 20 gulden;

Sengaji Popisi: uang tunai 10 gulden, 10 butir kelapa, dan 3 botol minyak kelapa; penduduk di sini juga harus membangun rumah dan menggarap ladang ubi (hasil \pm *f*20);

Sengaji Tolikom: uang tunai 10 gulden dan 1

pikol beras, penduduk juga diwajibkan menyediakan 2 pembantu setiap hari, pembangunan dan pemeliharaan rumah, serta penggarapan satu padi, satu ladang ubi, semuanya dengan kerja paksa. Diterima oleh bupati-bupati di daratan Sulawesi.

Sengaji Batui: hasil kerja paksa yang dilakukan penduduk di kebun padi yang akan digarap (\pm 500 hingga 1000 ikat padi hingga 20 pikol beras);

Sengaji Tangkiang: 1 pikol lilin mentah (*f*50.-), 120 gantang (10 kati) beras dan hasil dari satu atau dua kebun padi atau ubi yang akan diolah oleh penduduk sebagai kerja paksa (\pm *f*75.-);

Sengaji Kientom: 40 tutubi (= keranjang) beras seharga 10 kati (= 4 pikol), yang akan disediakan oleh rakyat Dakanjo Lengketi; 7 tutubi beras (= 0,7 pikol) yang akan dibayarkan oleh bawahan Dakanjo Tombang; 1 pikol lilin mentah, tetapi ini hanya boleh diberikan sekali setiap 3 atau 4 tahun kepada To Luinan yang tunduk pada Kientam;

Sengaji Mandono: hasil hak membeli padi dari penduduk segera setelah panen padi sebanyak 8 helai kain katun mentah, masing-masing senilai *f*1,50 gulden, sampai dengan jumlah $8 \times 80 = 640$ ikat, setara dengan 13 pikol beras -, praktik ini disebut "balu salah";

Sengaji Lantiu dan *Nambo*: hasil dari sebidang padi atau ubi yang akan diolah oleh penduduk sebagai rodi;

Sengaji Luwok: 25 kati lilin murni dan 10 kati lilin tidak murni (*f* 22,50 + *f* 5,-), 30 bansung beras seharga 5 kati (*f* 7,50 hingga *f* 8,-), 40 bambu tembakau (= 10 kati, nilai *f*2,50), 25 ekor ayam (*f* 3,75), 9 lembar kapas tidak diputihkan (13,50), hasil dari sawah atau ladang ubi yang diolah oleh penduduk sebagai kerja paksa (\pm *f* 30,-), hasil dari sero kerja paksa penduduk di sana dan pemeliharaannya (\pm *f* 20).

Selain itu, untuk semua Sengaji di daratan, penduduk membangun dan memelihara rumah untuk mereka dengan kerja paksa.

Hal di atas mengajarkan kepada kita bahwa pendapatan yang seharusnya diizinkan bagi kepala distrik itu kecil; selama mereka tidak mempunyai pekerjaan lain kecuali memastikan bahwa haçil raja dan anggota Swapraja lainnya dikumpulkan oleh penduduk setiap tahun, dan pergi ke Banggai setiap dua atau tiga tahun untuk menerima apa yang disebut "printah" dari raja dan akhirnya menyelesaikan perse-lisihan kecil antara bawahan mereka yang, tentu saja, sejumlah kompensasi harus diberikan, kasus-kasus besar harus diselidiki secara nominal dan tetap ditunda atau, seperti yang kita lihat di atas, diselesaikan dengan penge-naan denda; pendapatan yang terkait dengan jabatan dianggap cukup. Jika kita memaksakan persyaratan lain kepada mereka, kita juga harus meningkatkan pendapatan mereka secara pro-porsional dan dalam hal itu sistem pembayaran remunerasi berkala yang tetap lebih baik daripada sistem di mana para kepala berhak atas pungutan tertentu; manipulasi jauh lebih sulit dideteksi dalam sistem yang terakhir daripada yang pertama.

Sebelum mengakhiri paragraf ini, saya ingin menunjukkan bahwa di distrik-distrik yang penduduknya sebagian besar masih terdiri dari orang-orang kafir, pintu terbuka lebar bagi para pemimpin Muslim untuk melakukan perusak-an. Penduduk Alfur secara tradisional sudah terbiasa dijarah dan dihisap oleh para pemim-pin sehingga mereka tidak lagi berpikir untuk mengeluh tentang hal itu. Selain itu, Mayoritas dari mereka hampir tidak memiliki kontak dengan orang asing. Kejahatan-kejahatan ini terutama terdiri dari pemerasan uang atau memaksa penduduk untuk mengumpulkan dan mengirimkan hasil hutan dengan sedikit biaya. Jadi saya mendengar dari Utusan Mandano

bahwa ketika belum lama ini Sengaji dan Jurutulis Kientom mengunjungi To Luinan yang tinggal di daerah pegunungan, mereka harus membayar f 2,50 per orang; kepala distrik dikatakan telah kembali dengan f 500, Jurutulis dengan f 300.

§4. Anggota Kerajaan saat ini dan pendapatan mereka.

Raja Banggai saat ini, bernama *Abdurrah-man*, dinobatkan dengan gelar itu sekitar empat tahun yang lalu. Kandidat lainnya saat itu adalah Mayoor Ngofa saat ini yang saat itu hanya Letnan Ngofa; *Haji Awaluddin*, putra pendahulu Abdurrahman yang dipecat; Raja Abdul Adjied, dan Kapitan laut saat ini: *Dadau*, yang ayahnya bernama Nang yang sudah meninggal, adalah pendahulu dari yang baru tersebut Abdul Adjied. Abdurrahman sendiri hanyalah cucu dari raja sebelumnya dan karena itu tidak termasuk, seperti para pesaingnya sebelumnya, ke dalam golongan "tomundo pauno" (= anak-raja dalam arti sebenarnya dari kata tersebut), tetapi ke dalam golongan yang jauh lebih banyak jumlahnya "bangsa pauno" (= keturunan dari para raja sebelumnya). Pada masa-masa sebelumnya, "tamundo pauno" tidak dapat dilewati oleh "bangsa pauno" untuk jabatan raja. Karena Banggai telah sepenuhnya berada di bawah pengaruh Ternate, adat lama itu tidak lagi diperhitungkan; pada waktu itu, persyaratan untuk menjadi raja adalah: berasal dari golongan tamudo atau bangsa pauno dan berada di pihak yang diuntungkan Sultan Ternate; satu-satunya batasan adalah bahwa pengganti yang cocok harus dicari terlebih da-hulu dari garis keturunan laki-laki, oleh karena itu perempuan hanya dipertimbangkan sebagai yang kedua. Tidak boleh ada raja perempuan. Lebih jauh, tidak ada perhatian lebih lanjut yang diberikan pada apakah ibu dari anak bangsa atau anak tamundo termasuk dalam

salah satu golongan orang ini atau tidak; yang penting adalah bahwa anak tersebut merupakan hasil dari pernikahan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Raja memperoleh penghasilan sebagai berikut, yaitu

a. Dari masing-masing distrik Lolantang, Bulagi, Peleng, Paisulunu, Tinangkom, Pondi-Pondi, Tatakalad, Tambòlòq, Séa-séa, Sinohowan, Pu'u mbana, Botui, Tangkiang, Kientom, Mandano, Lontiu, Luwuk, Lamala Basama, Pokobondollong dan Bwokang setiap tahunnya 1 picol (dimurnikan sempurna maupun tidak; nilai rata-rata $\pm f 75$.-) = $f1500$.

b. Dari masing-masing kecamatan Liang, Popisi, Totikom, Sambiut, Kombutokan dan Luwuk, sagu, 100.
per tahun tunai = $f600$.

c. Dari Kecamatan Apal, Bonitom, Labobo dan Bangkulo masing-masing setiap tahunnya tunai $f80$.- . $f50$.-, $f25$. dan $f35$. $f190$.

d. Dari masing-masing kecamatan Tangkiang, Kientom dan Mandono setiap tahunnya 40 tutubis beras (1 tutubi = keranjang berisi ± 6 kati) = 2.4 picol, seluruhnya bernilai 3×2 , $4 \times f5$. $f36$.

e. Dari masing-masing Kabupaten Lontiu dan Luwuk 15 tutubi beras per tahun.

f. Dari masing-masing kecamatan Basama, Lamala dan Pokabondollong, 30 tutubi beras dan 300 tandan padi (= 6 picol beras) = $f78$.

f1. Dari masing-masing kecamatan Tinangkom, Totikom, Sambiut dan Kombutokan, 3 picol beras setiap tahunnya. = $f60$.

f2. Dari distrik Sinohowan + Pu'u mbana 200 bambu beras = $f25$.

g. Dari kabupaten Batui dan Sinohowan + Pu'u mbana setiap tahunnya masing-masing 300 sampai 500 dan 120 butir telur Maléo (masing-masing dengan $f 0,10$). = $f52$.

h. Dari masing-masing kecamatan Lolantang, Bulagi, Peleng, Liang, Apal, Paisulunu, Tiang-

kom, Bonitom, Popisi, Totikom, Sambiut, Kombutohan, Sea-sea, Bwokang sejumlah ubi hingga nilai gabungan $f20$.

i. Dari masing-masing kecamatan Tambòlòq, Luwuk Soga, Tatakalad dan Pondi Pondi 30 bansung sagu (pada $f 0.20$) $f24$.

k. Dari masing-masing kecamatan Lolantang, Bulagi, Peleng, Paisulunu, Pinangkom, Apal, Liang, Bonitom, Popisi, Totikom, Sambiut, Kombutokan, Luwuk, Sagu, Pondi-Pondi, Tatakalal, Tamboloq, Séa-Séa, Labobo, Bangkulu dan Bwokang per tahun 1 ekor kambing. $f60$.

l. Dari Kecamatan Bonitom, Popisi, Totikom, Sambiut, Kombutokan, Labobo dan Bangkulu sebanyak 600-800 buah kelapa setiap tahun $f17.50$.

m. Dari distrik-distrik yang disebutkan dalam l. bersama-sama 60 botol minyak kelapa per tahun $f15$.

n. Ikan kering dari Bangkulu dan ikan asap dari Labobo. Ayam dan telur dari Bonitom, Popisi, Totikom, Sambiut dan Kombutokan $f15$.
bersama-sama $f2701.50$

yang harus dikurangi $3 \times f90 = 270$ gulden, nilai 3 picol yang harus dikirim ke Sultan Ternate. Raja menikmati apa yang disebut pendapatan tetap $\pm f 2.500$ per tahun; sebagai tambahan, sejumlah $f0,02 \frac{1}{2}$ ditambahkan untuk setiap pohon kelapa yang ditanam di daerah Banggai oleh orang non-pribumi (lihat di atas pada bagian §2).

Lebih jauh, Sengaji Popisi, Totikom, Sambiut, Kombutokan dan Luwak, Sago masing-masing harus menyediakan dua orang pembantu bagi raja setiap hari; para orang rodi ini, yang disebut lambanuwa atau lambunuwa, harus melakukan pekerjaan rumah tangga selama sebulan untuk makanan tetapi tanpa dibayar dan kemudian digantikan oleh orang lain. Layanan ini sering kali dibeli seharga 2,50

gulden per bulan dan per orang.

Jika raja membutuhkan uang untuk suatu perayaan atau jika ia diduga dalam kesulitan (dan ini sering terjadi), ia mungkin (?) meminta bantuan kepada berbagai kepala distrik yang kemudian akan diberikan dalam bentuk uang atau barang seperti kain katun yang tidak diputihkan, dsb. Ia juga mungkin sesekali meminta kepala distrik Peleng - tanpa pembayaran! - untuk membawa rotan dari hutan untuknya, sebuah permintaan yang dalam praktiknya ditafsirkan sebagai perintah karena sifat kasusnya. Pendapatan variabel ini, sebagaimana telah saya yakinkan dari berbagai sumber, dapat berjumlah sangat besar selama setahun. Pendapatan tetap telah meningkat sedikit di bawah raja saat ini. Kepala distrik Kientom dan Mandono memberi tahu saya bahwa hanya sejak raja ini berkuasa mereka harus mengumpulkan 40 tutubi beras per tahun, bukan sepuluh. Kepala-kepala distrik Batui tampak sangat terkejut ketika saya memberi tahu dia bahwa saya telah mendengar dari raja bahwa, selain lilin dan telur maleo, ia mengambil 6 pikol beras sebagai pendapatan dari distrik itu setiap tahun. Mereka mengaku tidak pernah menaikkan upeti itu dan mengaitkan informasi yang diberikan raja kepada saya dengan niatnya untuk memperkenalkan pajak yang dimaksud mulai tahun ini. Ketika pernyataan mereka dikonfirmasi kepada saya oleh Mayoer Tano, saya bertanya-tanya apakah pendahulu Posthouder sementara Banggai saat ini akan mengetahui tindakan sombong raja tersebut. Dua kasus yang menarik perhatian saya memberi saya kesan bahwa mereka tidak termasuk pengecualian, kesan yang semakin diperkuat oleh pernyataan Sengaji Batui ini: "Tetapi apa yang dapat kami lakukan jika raja kami memerintahkan kami untuk melakukannya?"

Jogugu, yang disebut Hanafi, kerabat jauh

raja, memiliki penghasilan sebagai berikut:

- a. Dari distrik Pèlèd: per tahun dalam bentuk tunai *f*70.-, 2 helai kain katun yang tidak dikelantang senilai *f*2.-, 4 kambing, 200 kelapa, 120 botol minyak kelapa, 3 pikol beras, 1000 ikat padi, 3000 potong ubi. = *f*200.
- b. Dari distrik Pololo: 60 kati lilin per tahun, 1 kambing, 6 helai kain katun yang tidak dikelantang. = *f*69.
- c. Dari Luwuk Papanèntèng: 60 kati lilin, 1 kambing dan 6 helai kain katun yang tidak dikelantang per tahun. = *f*69.
- d. Dari Mésélésé: seperti di Pololo. = *f*69.
- e. Dari Tonggol Tobonunu: 30 kati lilin, 1 kambing dan 3 helai kain katun yang tidak dikelantang. = *f*36.
- f. Dari Tonggol Tolobuan: 40 kati lilin, 1 kambing dan 4 helai kain katun yang tidak dikelantang. = *f*47.
- g. Dari kampong Kembani: 20 kati lilin, 1 kambing dan 3 helai kain katun yang tidak dikelantang. = *f*27.
- h. Dari distrik Labobo: *f*25. dalam bentuk tunai. 100 buah kelapa, 5 botol sirup dapur, 10 botol minyak kelapa dan 200 1000 buah ubi per tahun, 1 perahu jarangka sekali setiap 4 tahun (nilai *f* 30.-) = *f*45.
- i. Dari distrik Bangkulu: 35 gulden per tahun dalam bentuk tunai, 100 buah kelapa, 10 botol sirup dapur, 10 botol minyak kelapa, 1 kambing dan 500 buah ubi. = *f*58.
- k. Dari distrik Lontiu: 25 kati cucian yang sudah dicuci dan satu helai kain katun yang tidak dikelantang = *f*14.
- l. Dari Kabupaten Luwuk: per tahun 25 kati lilin mentah, 60 kati beras dan 2 helai kain katun yang tidak dikelantang = *f*20.
- m. Dari Kabupaten Patun: per tahun 2 helai kain katun yang tidak dikelantang dan 25 kati beras = *f*5.
- n. Dari masing-masing kecamatan Tangkiang, Kientom, Mandono, Lamala, Basama, Poko-

bondolong, Lalantang, Liang, Apal, Paisulunu, Tambòlòq, Peling, Tinankom, Bonitom, Pondi-Pondi, Tatakalal dan Luwuk Sagu $f2,50$ per tahun = $f42,50$ bersama-sama $f700.-$ per tahun. Lagipula, Sengaji Pèlèd harus menyediakan dua orang pembantu - Ambunuwa - setiap hari sementara Jogugu juga mempunyai hak setiap kali ia membutuhkan uang, dan ini terjadi sedikitnya sekali setiap tahun, untuk meminta hadiah - yakni menuntut - dari distrik Luwuk, Lontiu, Pèlèk, Pololo, Luwuk Papanèntèng, Mésélésé dan Tolobuan yang masing-masing berjumlah $f10$, $f20$, $f10$, $f20$, $f20$, $f30$, 2 talam tembaga seharga $f5$, 2 talam tembaga seharga $f5$, 3 talam seharga $f5$, dan 1 talam seharga $f5$.

Pendapatan Kapitan laut, yang disebut Dadau atau Daud, terdiri dari:

- a. $f100.-$ tunai, 5 pikol beras dan 25 kati lilin mentah per tahun dari masing-masing distrik Basama, Lamala dan Pokobondolong;
- b. $f10$. tunai, 1 kambing, 10 botol minyak kelapa, 100 kelapa dan 3000 ubi per tahun dari distrik Apal; dengan demikian totalnya adalah $f450$.

Selain itu, ia berhak atas 2 pembantu setiap hari dari distrik Apal.

Hukum Tuwa, yang disebut Idries, - mertua Kapitan laut- menikmati pendapatan berikut:

- a. Dari distrik Bonitom: $f10$ tunai dan $\pm f10$ dalam ubi, beras, ayam dan minyak kelapa per tahun = $f20$.
- b. Dari distrik Peleng: per tahun 10 kati lilin murni dan 15 kalamatas ubi = $f8.50$
- c. Dari pulau Peleng 1 pikol beras dan 3 pikol kopi = $f65$.
- d. Dari masing-masing distrik Kientom dan Tangkiang: 25 kati beras dan 1 helai kain katun

yang tidak dikelantang per tahun = $f6.50$
Total $f100$.
per tahun

Setiap distrik Bonitom dan Peleng juga harus menyediakan 2 pembantu setiap hari; selanjutnya, ketika Hukum Tuwa membutuhkan uang, ia dapat meminta bantuan kepada Sengaji dari Kientom, Tangkiang, Bonitom dan Peleng, hak yang digunakan setidaknya sekali setiap tahun.

Hukum To Lolak, yang disebut Uda, memiliki pendapatan berikut, yang semuanya diambilnya dari distrik Tinankom, yaitu 20 kati lilin mentah, 300 ikat padi, 3 botol minyak kelapa, 3 fl. sirup dapur, 1 kambing, 2000 potong ubi dan 10 potong helai kain katun yang tidak dikelantang, 6 ayam = $f50$.

Kepala distrik juga harus memberinya 2 lambanuwa setiap hari. Ia juga memiliki hak untuk mengemis untuk dirinya sendiri!

Hukum Buyu yang bernama Raup ini hanya menerima penghasilan dari distrik *Bulagi*, yaitu 50 kati lilin, 1 picol beras, dan 10 helai kain katun yang tidak dikelantang = $f50$.

Selain itu, kepala distrik harus menyediakan dua orang pembantu setiap hari. Meminta bantuan juga diperbolehkan di sini.

Mayoor Ngofa — Haji Awaluddin— memperoleh penghasilan dari distrik *Popisi*, yaitu uang tunai 20 gulden, minyak kelapa 5 gulden, 300 ubi, 4 ekor ayam, dan

15 butir kelapa = $f23$.

Selain itu, ia berhak atas 2 orang pembantu yang dikirim setiap hari melalui distrik tersebut dan bantuan saat ia mengalami kesulitan. Banyak pengaduan yang disampaikan kepada kepala distrik sebelumnya mengenai kejahatan yang dilakukan; hal ini masih dalam penyelidikan.

Seorang saudara tiri raja, bernama Abdur-
rayak, memperoleh penghasilan berikut dari
distrik Totikom: f20 tunai, 8 botol minyak
kelapa, 8 ekor ayam, dan 50 buah kelapa per
tahun. Distrik harus menyediakan 2 orang
pembantu setiap hari dan mendukungnya saat
ia membutuhkan uang. f25.

Jabatan Kapitan Ngofa sudah lama tidak
diisi; peran itu bersama dengan peran Mayoor
Tano dipegang oleh Husain, cucu Raja Agama,
yang diusir dari wilayahnya oleh Ternate seki-
tar 50 tahun yang lalu. Setelah pemecatan
Abdul Ajid, pendahulu penguasa Banggai saat
ini, Husain untuk sementara ditugaskan untuk
menjalankan tugas-tugas raja. Kenaikannya
menjadi raja pada umumnya diharapkan pada
saat itu tetapi ternyata berbeda karena, konon,
ia tidak disukai oleh sultan Ternate. Sebagai
obat mujarab untuk lukanya, ia kemudian di-
angkat menjadi Mayoor Tano menggantikan
Abdurrahman, sebuah jabatan kehormatan
yang tampaknya tidak disukainya. Pendapatan
yang terkait dengan jabatannya

berjumlah f10 gulden per tahun!

Dari tiga kepala bangsawan, Miantu Pala-
batu — Amier, putra Walikota Tano yang
disebutkan di atas dari distrik Lotantang —
menerima yang berikut ini per tahun: 20 kati
lilin mentah, 120 kombili kalamata, 8 helai kain
katun yang tidak dikelantang, 4 kambing, 24 fl.
minyak kelapa, 24 botol sirup dapur dan 60 kati
beras = f54.

Distrik ini selanjutnya berkewajiban untuk
menyediakan 2 pembantu setiap hari dan
memberikan bantuan jika Miantu memintanya.

Miantu Basaang —Abdul-Rajak —setiap
tahun mengambil 25 kati lilin murni dari
Paisulunu = f22.50
Miantu Liang —Arawi— dari distrik Liang
dalam bentuk uang tunai dan 15 kalamata ubi =

f25.—

sementara mereka juga berhak atas 2 orang
pembantu per hari, yang disediakan untuk
mereka oleh Sengaji Paisulunu dan Liang. =
f27,—

Sekretaris Raja —Abdul Kadir — menik-
mati dari Kombutokan = f20,- dalam bentuk
uang tunai, 2,5 pikol beras, 150 potong ubi, 18
botol minyak kelapa dan 18 ekor ayam = f40,-
sementara kepala distrik juga harus
memastikan bahwa ia memiliki dua
lambanuwa.

Saya tidak dapat memperoleh pernyataan
yang dapat diandalkan tentang pendapatan
rutin mereka dari Kapitan Kié, Kié Sadaha dan
Kadato, Simalaha dan Sowohi. Mereka ma-
sing-masing memperolehnya dari distrik-
distrik yang tidak saya kunjungi: Pondi-Pondi,
Tambòlòq, Séa-Séa, Nambo, Tatakalai dan
Sambiu. Distrik-distrik ini juga menyediakan
pembantu bagi mereka.

Semua kepala yang disebutkan di atas juga
berwenang menuntut penduduk untuk mem-
bangun rumah bagi mereka dan meminta
mereka menyediakan perahu dengan penda-
yung yang diperlukan saat mereka harus me-
lakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas juga
mencakup perjalanan yang dilakukan hanya
untuk tujuan mengumpulkan haçil, jika per-
jalanan tersebut tertunda terlalu lama. Para
pendayung harus menyediakan makanan mere-
ka sendiri sampai ke tempat tujuan; sesam-
painya di sana, mereka selanjutnya dirawat
oleh distrik terkait yang juga menyediakan
tempat tinggal dan makanan bagi mereka yang
bepergian untuk bertugas, sementara di sisi lain
merupakan kebiasaan untuk memberi mereka
hadiah, baik berupa uang maupun barang.

Apa yang saya tulis di akhir §3 tentang

campur tangan kepala distrik juga berlaku sepenuhnya bagi anggota kerajaan, ya, mereka bahkan tidak mengampuni bagian penduduk Mohamedan. Pemerintah Eropa jarang mengetahui hal ini karena para korban kejahatan ini, yang takut akan balas dendam dari para pelaku atau kerabat mereka, lebih suka bungkam tentang hal itu. Hal ini juga sebagian disebabkan oleh sangat sedikitnya kontak yang terjalin selama ini antara pemerintah dan sebagian besar penduduk sehingga mereka masih kurang percaya pada perwakilan Pemerintah. Selama perjalanan saya menjelajahi bentang alam, saya menemukan kesempatan untuk memperhatikan hal ini hampir setiap hari, tidak hanya di desa-desa pegunungan, tetapi juga di desa-desa pesisir yang lebih beradab.

Berita tentang kedatangan saya yang sudah dekat sering kali cukup untuk membuat kampung menjadi gempar dan mengusir wanita dan anak-anak ke gunung atau hutan sambil membawa barang-barang.

Kebanyakan anggota kerajaan bertempat tinggal utama di Banggai; hanya Mayoora Tano dan putranya: Miantu Palabatu yang sebagian besar tinggal di distrik Batui tempat mereka memiliki istri.

Raja tinggal di rumah yang dibeli di pedesaan seharga f3000; oleh karena itu rumah tersebut adalah milik negri. Bahkan, hal ini juga berlaku untuk rumah-rumah yang dibangun oleh penduduk melalui kerja paksa, tetapi praktik menunjukkan bahwa para kepala suku menganggap rumah-rumah tersebut sebagai milik pribadi mereka.

§5. Hubungan dengan Landschap lainnya.

Di atas telah kita lihat hubungan antara Landschap Banggai dan Kesultanan Ternate. Pengaruh Ternate terlihat jelas dalam hampir segala hal; pemerintahan nasional maupun

pemerintahan distrik hanyalah tiruan dari lembaga Ternate. Tidak berbeda dengan organisasi ulama. Meskipun jumlah kepala adat sudah sangat banyak, jumlah itu masih kalah dengan jumlah ulama. Sebagai contoh, ulama distrik Batui, distrik ini memiliki +165 orang laki-laki yang sehat jasmani, terdiri dari 4 orang imam, 17 orang chatibi, dan 12 orang modin. Jika dihitung 13 orang kepala di distrik, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa untuk setiap 4 orang laki-laki di kabupaten tersebut terdapat satu orang kepala. Keadaan tidak lebih baik di kabupaten lainnya.

Saya dapat menjelaskan secara singkat tentang hubungan dengan Landschap yang berdekatan, yaitu Tajo dan Bungku. Banggai sama sekali tidak memiliki hubungan dengan penguasa kerajaannya; tidak ada pula ikatan kekeluargaan di antara mereka. Dengan geram raja dan pembesar Banggai membantah pernyataan rekan-rekan mereka dari Bungku dan Mori bahwa tiga keluarga kerajaan Banggai, Bungku, dan Mori memiliki nenek moyang yang sama dengan keluarga kerajaan Tojo, Motanno (di Luwu), Kendari, dan Butan. Sejauh pengetahuan mereka, mereka hanya berkerabat dengan keluarga kerajaan Jawa dan Ternate (?).

§6. Penduduk, pembagiannya menjadi penduduk asing dan penduduk asli; pembagian penduduk asli menurut agama, suku, dan golongan; jumlah laki-laki yang mampu.

Penduduk Banggai dapat dibagi terlebih dahulu menjadi dua golongan berikut:

- a. penduduk asli.
- b. orang asing.

Suku Bajo tersebar di berbagai pulau dan Landschap di daratan utama Sulawesi, tetapi semuanya tinggal di kampung-kampung pesisir. Mereka dianggap sebagai subjek langsung Pemerintahan Belanda dan karena itu secara langsung berada di bawah perintah wakil

pemerintah di Banggai yang kepadanya mereka membayar pajak yang menjadi hak pemerintah setiap tahun (pajak pemungutan suara). Hanya orang-orang yang disebut Bajau atau Bajo yang menjadi pengecualian. Meskipun mereka bukan bagian dari penduduk asli Banggai, mereka dianggap sebagai subjek Sultan dan membayar pajak kepada gubernur Ternate untuk bisnis penangkapan ikan mereka seperti disebutkan di atas. Mereka adalah "orang laut", orang-orang yang hidup secara eksklusif di atas air, baik lahir dan dibesarkan di perahu-perahu yang cukup besar - disebut padéwakan - atau di rumah-rumah yang dibangun di atas panggung di laut. Awalnya mereka berada di bawah kekuasaan raja Gowa - mereka kemudian menukarnya selama pemerintahan Tori Sompat Aru Palakka yang agung - teman Admiral Speelman - dengan raja Bone, salah satu dari mereka mengizinkan mereka untuk menetap di kampung Bajowe - dinamai menurut nama mereka - pelabuhan Watampone. Di sinilah berdiam pemimpin tertinggi mereka dengan gelar Lolo, penguasa, dan para pemimpin bawahan seperti Punggawa dan Galarang. Hal ini tetap demikian hingga sekitar delapan tahun yang lalu ketika Lolo dan Galarang meninggalkan Bajowe untuk menetap di Kendari dan Salabangka (daerah Bungku) masing-masing karena tindakan sewenang-wenang anakarung Boni, dan lelah selama pemerintahan Lapawawooi yang salah. Contoh mereka diikuti dua setengah tahun yang lalu oleh Punggawa. Secara eksklusif sebagai orang-orang pelaut sebagaimana mereka dulu dan sekarang, tanggungan mereka telah lama menyebar ke seluruh Sulawesi. Dengan demikian kampung-kampung Bajo secara bertahap muncul di perairan Banggai, yang ditempatkan di bawah kepala bersama dengan gelar Punggawa. Kemudian seorang Kapitan bergabung dengannya dan bersama-sama dengan mereka berdua, mereka

memastikan bahwa bagian upeti Banggai Bajo diterima untuk pembayaran tahunan yang harus diberikan oleh kepala mereka, Lolo, kepada raja Boni. Oleh karena itu, ia tetap menjadi raja mereka tetapi mereka juga mengakui wewenang sultan Ternate demi kepentingan penghidupan mereka. Situasi ini tidak berubah dengan pembentukan Posthouder di Banggai dan ketika pejabat ini ingin mulai melakukan penghitungan populasi di kampung-kampung Bajo tahun lalu, ia mengalami betapa sedikitnya otoritasnya dihormati oleh orang Bajo. Mereka tidak ragu-ragu untuk datang bersenjata ke ibu kota untuk membuat Posthouder mengerti bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan dia dan bahwa mereka hanya akan mematuhi perintahnya ketika dia memberi mereka surat instruksi dari Sultan Ternate dan Raja Boni. Mereka tidak mau percaya atau setidaknya pura-pura tidak percaya bahwa yang terakhir diasingkan ke Jawa. Mereka tampaknya tidak ditegur tentang tindakan brutal ini pada saat itu. Bagaimanapun, sikap mereka terhadap pemerintah tetap tidak pantas, itulah sebabnya Posthouder saat ini meminta saya untuk mengunjungi kamp utama Bajo, yang disebut Kalambatang dan terletak di selat antara pulau Peleng dan Banggai, dalam perjalanan saya melalui Landschap selama penugasan saya ke Banggai pada akhir tahun 1906. Ditemani oleh sepuluh orang, saya memenuhi permintaan ini. Setelah tinggal di rumah seorang pedagang Gorontalo saya memanggil dua kepala suku Bajo dan beberapa bawahan mereka ke hadapan saya.

Mereka datang tetapi ketika mereka duduk mereka bersikap tidak hormat kepada Posthouder yang telah saya perkenalkan kepada mereka. Sikap itu sudah berubah menjadi lebih baik ketika saya mulai berbicara kepada mereka dalam bahasa Bugis dan mereka menurut setelah saya mengkritik perilaku mereka

sebelumnya dengan kata-kata yang keras dan menjelaskan kepada mereka bahwa otoritas Pemerintah adalah yang tertinggi di Hindia Belanda, oleh karena itu para pemegang otoritas itu berhak diperlakukan dengan keistimewaan yang sebesar-besarnya oleh mereka, dan terlebih lagi, bahwa mereka sendiri mengakui bahwa mereka sampai sekarang telah menjadi rakyat Boni sejak wilayah itu diserahkan kepada Pemerintah, dan bahwa orang-orang Boni lainnya harus mematuhi perintah yang diberikan kepada mereka oleh Pemerintah atau atas nama Pemerintah oleh wakil-wakilnya tanpa syarat. Dua hari kemudian saya mengetahui bahwa mereka telah menemui mantan tuan rumah saya untuk menanyakan apakah dia bisa segera membayar pajak mereka untuk tahun berjalan kepada Pemerintah tanpa saya harus mengatakan sepatah kata pun tentang pajak yang harus mereka bayar. Jawabannya, tentu saja, bahwa mereka harus menunggu perintah yang relevan.

Punggawa Banggai Bajo saat ini bernama Uwa Lupa, seorang laki-laki berusia sekitar 70 tahun, yang menyerahkan penyelesaian pertikaian yang timbul di antara orang Bajo kepada Kapitannya yang bernama Uwa Mici. Namun, orang ini adalah seorang To Mandar, yang tidak mengherankan, karena di antara orang Bajo banyak terdapat unsur-unsur asing seperti Makassar, Bugis dan sebagainya, yang karena menjalankan usaha yang sama dan sering menikah dengan gadis-gadis Bajo, menganggap diri mereka dan juga dihormati oleh penduduk Banggai lainnya, ya, bahkan dianggap oleh Posthouder sebagai orang Bajo, dan tidak membayar pajak kepada Pemerintah seperti mereka. Permukiman utama Suku Bajo di perairan Banggai adalah sebagai berikut, setelah Kalombatang yang telah disebutkan dengan 249 orang laki-laki yang sehat jasmani:

Lapéta, tepat di selatan Kalombatang,

dengan jumlah \pm 25 orang, Tokoluwan babasal atau Liang, yang terletak di pantai timur semenanjung tengah Peleng, dengan 43 orang laki-laki yang sehat jasmani dan Bwokang dengan 15 orang laki-laki.

Orang asing lainnya terdiri dari orang Bugis, Makassar, Tojo, Gorontalo dan Menadono, Ternate, Arab dan Cina, beberapa orang Indo-Eropa dan beberapa orang Jepang. Orang Jepang dipekerjakan sebagai penyelam mutiara oleh Perusahaan Dagang Nugini Belanda.

Tahun lalu, 759 orang dikenakan pajak pribadi dengan jumlah gabungan sebesar f1979. Sebagian besar dari orang-orang ini tinggal di pantai utara semenanjung timur laut Sulawesi, yaitu di kota-kota pesisir:

Bunta dengan 169 orang.

Pagimana (tempat pengawas bea masuk dan ekspor serta cukai) dengan 136 orang,

Lobu dengan 81 orang,

Siuna dengan 28 orang dan

Bualemo dengan 80 wajib pajak.

Kecuali 76 orang yang berlokasi di kota utama Banggai, sisanya tinggal tersebar luas di berbagai kota pesisir di pantai selatan semenanjung timur laut Sulawesi (\pm 100) dan di berbagai pulau di kepulauan Banggai.

Penduduk asli dapat dibagi berdasarkan agamanya menjadi:

Muslim dan *Alfur* (atau penyembah berhala). Mereka yang terakhir ini adalah yang paling tertindas sepanjang masa. Merekalah yang harus membayar bagian terbesar dari pungutan yang dibayarkan oleh para pemimpin penduduk dengan berbagai macam nama.

Sistem penjarahan dan ekstraksi yang diterapkan kepada mereka sejak awal telah menumpulkan semangat mereka, mengurangi kekuatan mental mereka hingga nol, dan keinginan mereka untuk bekerja telah hampir hilang sama sekali. Mereka sekarang menjadi orang-

orang malas, sama sekali tidak peduli dengan kondisi mereka dan kenyataan bahwa istri dan anak-anak mereka menderita, yang merasa sangat bahagia ketika mereka mendapatkan bagian mereka dari ubi setiap hari dan menganggap diri mereka sangat diberkahi oleh keberuntungan jika mereka juga dapat minum arak sepuasnya. Hanya dengan ini mereka dapat dibuat melakukan upaya luar biasa; para pedagang memanfaatkan sifat-sifat ini untuk mendorong mereka mengumpulkan hasil hutan untuk diri mereka sendiri sebagaimana terlihat dari impor arak tahunan ke ibu kota Banggai; impor pada tahun 1906 berjumlah 2535 peti dengan kapasitas 22 1/2 liter per peti, suatu jumlah yang dapat dikatakan penting mengingat sebagian besar didatangkan dari daerah Alfur di kepulauan Banggai.

Lebih jauh, hal tersebut di atas juga lebih berlaku bagi orang-orang ini daripada bagi sesama penyembah berhala yang tinggal di daratan Sulawesi: suku To Luinan. Lebih lanjut tentang suku ini di bawah ini.

Di atas saya telah menemukan kesempatan untuk mencatat bahwa penduduk Banggai pada awalnya berasal dari berbagai suku yang merdeka tanpa tempat tinggal tetap. Bukti untuk ini juga diberikan oleh fakta bahwa penduduk kepulauan Banggai berbicara dalam bahasa yang hampir sepenuhnya berbeda dari bahasa daratan dan bahwa keempat bahasa terakhir - mungkin empat dialek yang sangat berbeda dari bahasa yang sama - tetap dipertahankan. Bahasa-bahasa ini dinamai sesuai dengan terjemahan kata "tidak" atau "tidak menjadi". Maka bahasa kepulauan Banggai disebut sebagai "bahasa *aki*" yang bertolak belakang dengan "bahasa kusi" yang merupakan bahasa daerah Balanta yang meliputi tiga distrik yaitu Basama, Lamala dan Pokkobondolong, "bahasa *madi*" (juga disebut bahasa *basasalu*) yang terdapat di distrik Luwok, Lantiu, Mandono,

Kientom dan Tangkiang, "bahasa *baha*" yang terdapat di distrik Batui dan bahasa "*ta*" yang dituturkan oleh sebagian penduduk distrik Sinohowan dan Pu'umbana. Penduduk lain di distrik kecil ini, yang disebut Sinohwana, menuturkan bahasa yang dapat disebut sebagai campuran dari beberapa bahasa lain; Namun ada pula kata-kata yang tidak terdapat dalam bahasa-bahasa lain yang digunakan di Land-schap Banggai (untuk "tidak" ada, misalnya, kata "ido" dan "daido"), tetapi jumlah ini relatif sedikit, kemiripannya dengan bahasa "ta" begitu besar, dan jumlah penuturnya pun sangat sedikit, +40 orang laki-laki yang sehat jasmani, sehingga saya pikir saya tidak akan menyebutkan bahasa itu selain yang tersebut di atas. Memang benar bahwa orang Pu'umbana, yang menggunakan bahasa Ta, jumlahnya tidak jauh lebih banyak, ± 46 orang, tetapi bahasa atau dialek tersebut, juga digunakan oleh suku To Wana yang cukup besar, yang mendiami wilayah yang dilintasi oleh sungai Bangka dan Ondokan. Akan tetapi, mereka telah menunggu sekitar 12 tahun kedatangan utusan dari raja itu untuk menunjukkan ketundukan mereka meskipun ada banyak klaim dari kerajaan Banggai bahwa sebagian orang To Wana menganggap diri mereka sebagai bagian dari rakyat Raja Banggai. Suku tersebut telah lama tidak mengenal penguasa lain selain penguasa Tojo dan Bungku, dengan pengertian bahwa sebagian dari suku tersebut secara teratur hanya milik Tojo, sisanya hanya milik Bungku. Selama beberapa tahun ini, 250 jiwa dari bagian Tojo telah tinggal sekitar tiga jam dari muara Sungai Mehaki (atau Menahaki) di sepanjang kedua tepi sungai ini, oleh karena itu di daerah Banggai, terpicat ke sana oleh perkembangan perdagangan damar di mana daerah hulu Mohaki (kabupaten Batui) pasti kaya. Namun, banyak dari mereka sekarang terlibat dalam hortikultura. Mereka berada di bawah kepala

tanpa gelar khusus, yang nama aslinya adalah Tamposi Papai-i-dau. Namun, mereka tidak mematuhi otoritas yang lebih tinggi. Mereka tidak membayar upeti kepada raja Tojo yang telah gagal membujuk mereka ke negaranya sendiri, juga tidak kepada raja Banggai atau salah satu kepala suku yang berada di bawahnya. Mereka tidak ada sangkut pautnya dengan Sengaji Batui yang wilayah hukumnya mereka tempati sehingga mereka seolah-olah membentuk negara dalam negara. Bahkan pejabat di Banggai pun tidak pernah terlibat dengan mereka.

Saya juga menganggap penduduk distrik Sinohowan dan Pu'umbana, yang awalnya lebih ke pedalaman, sebagai segerombolan suku To Wana yang tinggal di Matindok di wilayah Tangkiong; mereka telah menetap lebih jauh ke arah pantai selama bertahun-tahun dan sekarang tinggal di tepi kanan Sungai Sinohowan (orang Bugis telah mengubah nama ini menjadi Sinorang) di Kampong Boné limpi. Untuk mendukung pendapat saya yang diungkapkan di atas, tidak hanya ada kesamaan dalam bahasa tetapi mereka menetap di daerah yang dimiliki oleh suku-suku yang berbicara bahasa lain lebih lama dari yang dapat dilacak, serta kesamaan dalam moral dan adat istiadat antara bagian pagan yang tersisa dari orang-orang Pu'umbana dan To Wana. Meskipun Sinohowana dan Pu'umbana hidup bersama di kampong yang sama, mereka berada di bawah kepala suku yang berbeda, masing-masing Towakanna dan Basal, yang memiliki kedudukan yang sama dan sepenuhnya independen dari administrasi distrik Batui. Di sisi lain, sebagaimana telah kita lihat di atas, mereka membayar upeti tahunan kepada raja Banggai, yang terdiri dari beras, telur Maleo, dan lilin.

Penduduk di distrik Batui seluruhnya adalah Mohamedan, sedangkan di distrik Tangkiong dan Kientom sebagian besar terdiri dari suku

Alfur yang menyandang nama umum To Luinan. Suku Mohamedan pada awalnya mungkin juga termasuk suku itu sebagaimana terlihat dari kemiripan bahasanya yang mutlak. Berbeda dengan suku Alfur di kepulauan Banggai, suku To Luinan adalah ras yang kuat yang, meskipun wajib membayar upeti kepada para kepala suku, tidak menoleransi segala sesuatu dan tidak membiarkan penghinaan apa pun tidak dihukum. Bagi suku Alfur dari Peleng, pengayauan adalah tindakan pengecut tetapi masih populer di kalangan suku To Luinan. Pengayauan tidak hanya dilakukan terhadap suku To Wana, To Ampana dan selatan, yang berada di bawah kekuasaan Tojo atau Bungku, tetapi juga dilakukan di antara mereka sendiri antara suku To Luinan Tangkiong dan suku To Luinan Kientom. Sementara dalam kasus pertama, alasannya sering kali tidak lain adalah keinginan untuk membunuh atau ambisi, perburuan kepala di antara mereka sendiri umumnya terjadi karena satu bagian suku menyeberangi wilayah bagian lain untuk mencari damar atau rotan. Karena beberapa tahun yang lalu pemerintah Banggai memutuskan bahwa wilayah hulu sungai Toili dan Sinohowan harus dianggap milik Sengaji Tangkiong, maka pohon damar yang ditemukan di sana adalah milik Tangkiong To Luinan. Menanggapi keputusan itu, telah diumumkan kepada para Alfur Kientom bahwa jika mereka mencari damar di wilayah tersebut tanpa izin dari para kepala suku Tangkiong, dan dengan demikian mengalami ketidaknyamanan dari To Luinan yang bergantung pada mereka, dan memiliki keluhan tentang hal ini, mereka akan dinyatakan tidak dapat diterima; orang tidak lagi mendengar tentang perburuan kepala ini dan To Kientom pergi mencari damar dan rotan hanya ke wilayah Mehakie hulu, yang, seperti telah kami sebutkan di atas, milik Batui.

Sebelum melanjutkan pembagian penduduk

ke dalam kelas-kelas, saya ingin mencatat bahwa suku Alfur yang tinggal di pedalaman Semenanjung Barat Peleng dan hidup di bawah Sengaji Sea-sea atau Buko berada pada tahap peradaban terendah; sebagian besar dari mereka tinggal di gua-gua atau di bawah naungan di bawah pohon-pohon besar, hampir tidak berpakaian yang berlaku untuk pria dan wanita; dan mereka menghindari kontak dengan siapa pun yang tidak termasuk dalam suku yang sama seperti mereka; dan hidup dalam kebodohan terbesar yang bisa dibayangkan; sisanya sedikit lebih baik dan bahkan para kepala suku tidak diajak bicara selain dengan bantuan Sadaka kadato, yang mereka anggap sebagai raja mereka, yang juga menerima hasil yang ditujukan untuk "tuutu" dari mereka. Para kepala suku Sea-sea, ditemani oleh beberapa bawahan mereka, pergi setahun sekali dengan kepala suku Banggai ini ke kota utama tempat yang terakhir ditugaskan untuk memotong rumput liar di dalam kota - bekas desa yang hanya tersisa temboknya - dan jalan menuju ke sana. Maka muncullah kebiasaan aneh bahwa tidak seorang pun boleh melewati mereka saat mereka bekerja tanpa memberi mereka sesuatu atau yang lain dan bahwa mereka boleh menyatakan kambing atau ayam sebagai milik mereka saat mereka melewati mereka saat bekerja.

Di §4 kita telah bertemu dengan tamundo dan bangsa-pauno; selain itu, penduduknya dibagi dalam tingkatan berikut:

- keluarga Bobato-pauno atau hukum dan Sengaji;
- mian poi poi atau kelas yang paling banyak diwakili oleh orang merdeka
- dan budak. Yang terakhir ini umumnya dianggap sebagai anggota keluarga dan karenanya tidak seburuk yang mungkin tersirat dari namanya, tetapi berdasarkan sifat kasusnya mereka tidak memiliki hak untuk pergi ke mana

pun mereka mau. Mereka juga adalah orang-orang yang menggantikan tuan ketika ia dipanggil oleh para kepala suku untuk melakukan tugas kerja paksa.

Melalui kunjungan saya ke berbagai kabupaten Banggai. Saya dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang jumlah penduduk yang telah saya sertakan dalam bagan berikut. Angka yang ditandai dengan * hanyalah perkiraan, sisanya adalah hasil perhitungan.

Nomor	Nama Distrik	Jumlah Pria yang sehat Jasmani
	Ibukota Banggai	125
I	Tanobonunungan	86
II	Dodung	31
III	Moonsongan	12
IV	Gonggong	44
V	Boneaka	19
VI	Lampa	26
VII	Putal	36
VIII	Pao Banggaai	28
IX	Lolantang	1067
X	Bulagi	423
XI	Peling	225*
XII	Liang	343
XIII	Apal	137
XIV	Paisulunu	135
XV	Tinangkom	69
XVI	Bonitom	62
XVII	Popisi	129
XVIII	Totikom	473
XIX	Sambuit	185
XX	Kumbutokan	200*
XXI	Pèlèi	130*
XXII	Pondi Pondi	90
XXIII	Tambolog	83
XXIV	Luwok Sago	60*
XXV	Meslese	78
XXVI	Sea-sea	500*
XXVII	Pololo	325
XXVIII	Tatakalai	89
XXIX	Batui	164
XXX	Tangkiang	307
XXXI	Kientom	409
XXXII	Mandono	315
XXXIII	Lontiu	43
XXXIV	Nambo	61
XXXV	Luwòk	342
XXXVI	Basama	198
XXXVII	Lamala	207

XXXVIII Pokobondolang	297
XXXIX Sinohowan dan	
Pu-Umbana	68
XL Bangkulu	274
XLI Mansalean	133
XLII Lipu Lalongo	29
XLIII Biookan	60*
XLIV Pangkalsiang	101
XLV Powat	40*
Total	8258

yang mana \pm 50% penganut agama Islam

§7. Mata pencaharian.

a. Pertanian dan pengumpulan hasil hutan.

Mata pencaharian utama penduduk asli adalah pertanian. Sama seperti di Mori, sawah tidak ditemukan di Landschap Banggai. Penanaman padi dan jagung hanya dilakukan di ladang atau kebun kering, sebagian besar di sepanjang lereng gunung atau bukit. Kerbau atau ternak lainnya tidak digunakan. Pulau utamanya tandus; oleh karena itu penduduknya memperoleh makanan utamanya dari Peling, kecuali beras yang dibawa dari Landschap di daratan Sulawesi.

Berbeda dengan beras Peling, yang kualitasnya buruk dan hanya digunakan untuk memberi makan penduduknya sendiri, beras Sulawesi berwarna putih, bulirnya besar dan rasanya sangat enak; terutama di Landschap yang terdiri dari distrik Bassama, Lamala, dan Pokkobandong. Balanta terkenal akan hal ini; 300 pikol beras diekspor dari sana ke Gorontalo setiap tahun; harga rata-rata 1 pikol beras adalah 4 hingga 5 gulden. Selain itu, sekitar 500 pikol jagung dikirim dari Balanta ke tempat yang sama setiap tahun; Landschap lainnya hanya menanam tanaman ini dalam skala kecil, mungkin sebagai akibat dari kekayaan sagu yang merupakan makanan pokok penduduk di kepulauan Banggai dan di distrik Balanta bagian barat setelah ubi. Selain itu, nasi jarang dikonsumsi, biasanya hanya pada saat hari raya.

Ubi dibudidayakan dengan sukses dalam

berbagai varietas sebagian besar di Kepulauan Banggai, dari mana sejumlah besar diimpor setiap tahun ke distrik Mandang, Kientom dan Tangkiah terutama dari distrik Peling di Sea-sea.

Budidaya kelapa telah berkembang pesat dalam lima belas tahun terakhir. Sebagian besar orang dari luar telah menciptakan perkebunan kelapa yang luas, tetapi penduduk asli juga secara bertahap mulai melihat manfaat atau lebih tepatnya keuntungan dari budaya itu, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya perkebunan muda milik mereka.

Sekitar 50 tahun yang lalu, tidak seorang pun berpikir untuk mengeksploitasi banyak pulau kecil di gugus Banggai tetapi sekarang sejumlah besar dari mereka menyaksikannya karena layanan penting yang telah kita berikan kepada kepulauan itu dengan membebaskan penduduknya dari belenggu yang membebani-nya selama era bajak laut.

Di sisi lain, dalam budaya kopi dan kakao, penurunan besar dapat diamati; penduduk mengklaim bahwa pohon kopi menghasilkan lebih sedikit buah seiring berjalannya waktu dan karena itu mengabaikan budaya itu. Namun, saya yakin bahwa justru kelalaian inilah yang menjadi penyebab rendahnya produksi kacang-kacangan; meskipun kualitasnya tidak unggul, rasanya tetap enak. Di bidang buah-buahan, Banggai memasok mangga dan nanas berkualitas baik, manggis dan kanari, selain beberapa varietas pisang yang ditanam dalam jumlah cukup.

Hasil bumi lainnya adalah berbagai jenis kacang-kacangan, sirih dan pinang. Selain itu, hutan menghasilkan berbagai jenis kayu yang cocok untuk membuat rumah dan perahu. Saya hanya menyebutkan pohon-pohon yang terdapat di Peling, yaitu kayu biti, cempaga dan kayu besi, juga kayu hitam dan kamuning, selain kayu garu, jenis kayu kemenyan ber-

warna kuning halus dan Kayu lelinkas yang paling umum menghasilkan pewarna merah. Seorang pembuat mebel Tionghoa yang berkantor di kota utama Banggai mengolah kayu dari pulau utama dan Peleng. Namun, tidak ada ekspor. Selama tiga puluh tahun terakhir, penduduk juga mengumpulkan damar dan rotan; yang terakhir juga terdapat di Peleng dan Banggai. Damar hanya terdapat di hutan-hutan di daratan; harga bagus yang baru-baru ini dicapai artikel ini di pasaran telah menarik orang-orang dari daerah lain, terutama Laiwui dan Tojo, ke daerah-daerah ini.

b. Peternakan, perburuan, dan penangkapan ikan.

Babi merupakan satu-satunya mamalia asli yang hidup di kepulauan Banggai; suku Alfur memburunya tetapi juga memelihara babi peliharaan.

Di pulau utama terdapat sapi liar yang merupakan milik raja sebelumnya dan merupakan keturunan dari sapi-sapi yang didatangkan dari Gorontalo. Jumlah sapi ini diperkirakan sekitar 200 ekor. Siapa pun boleh memburunya dengan izin dari pemiliknya dan membayar masing-masing 30 gulden.

Kepala distrik Kientom, Tangkiang, dan Batusui memiliki sapi peliharaan, juga dari Gorontalo; sapi-sapi yang saya lihat meyakinkan saya bahwa peternakan sapi di daratan memiliki peluang besar untuk berhasil; padang rumput yang luas menjamin hal ini sementara air minum yang baik tersedia cukup. Hal ini tidak dapat disaksikan di Pulau Peleng. Kecuali beberapa bagian kecil, sama sekali tidak ada air minum yang baik di seluruh wilayahnya. Penduduk harus puas dengan air payau dan keruh kecuali pada musim hujan, air hujan dikumpulkan dan disimpan dalam kaleng minyak tanah. Tidak mengherankan jika penyakit perut dan kulit pun banyak diderita penduduk.

Kambing ditemukan dalam jumlah besar baik di pulau-pulau utama maupun di daratan: kerbau dan kuda, di sisi lain hanya ditemukan di dataran Célébes, paling sering di distrik Batusui untuk hewan yang disebutkan pertama, di distrik Kientom dan Mandano sejauh menyangkut kuda. Sedikit perawatan diberikan kepada hewan-hewan ini yang menyebabkan mereka menjadi semakin liar; manfaat yang diperoleh dari mereka juga tidak besar. Kuda-kuda adalah keturunan hewan yang diimpor dari Gorontalo; kerbau tampaknya asli.

Rusa dan anuwang juga asli; yang terakhir adalah persilangan antara rusa dan sapi dan karena itu juga disebut sapi-utan. To Luinan kadang-kadang memburunya dan menjual hewan tangkapan hidup kepada penduduk pesisir. Yang terakhir banyak berfokus pada perkembangan biakan unggas.

Tingalong adalah umum; jenis musk (tiempaus) yang diperoleh darinya adalah komoditas yang cukup mahal (*f* 50 de kati).

Kecuali pulau utama, semua pulau Banggai dan daerah di daratan menghasilkan lilin dalam jumlah yang cukup besar tetapi tidak sebanyak tiga puluh hingga empat puluh tahun yang lalu ketika produksi gabungan dapat diperkirakan mencapai 400 hingga 500 pikol. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlahnya tidak lebih dari 150 hingga 200 pikol. Perairan Banggai menghasilkan banyak sekali ikan dan sangat beragam; terumbu karang yang ditemukan di sana sangat kaya akan spesies dari selatan. Ikan clipfish, yang sering ditangkap dan dikeringkan oleh orang Bajo, merupakan barang dagangan penting bagi mereka dan juga berfungsi sebagai makanan. Penduduk asli jarang pergi menangkap ikan. Dulu alasannya mungkin karena mereka merasa tidak nyaman melaut di sore atau malam hari karena ketidakamanan yang disebabkan oleh bajak laut Tobeloro dan Mangindano. Karena tindakan bajak laut tersebut telah

berakhir, alasan yang disebutkan di atas tentu tidak berlaku lagi dan sekarang kita harus lebih memikirkan kemalasan. Orang Bajo telah menangkap ikan selama beberapa dekade di banyak terumbu karang di sekitar pulau Banggai. Tripang yang ditangkap dan diolah oleh mereka dengan senang hati dibeli oleh pedagang Cina dan dibawa lebih jauh ke Cina; hal yang sama terjadi pada sirip dan ekor ikan hiu; hasil laut lainnya adalah karet; orang Bajo juga menangkap kerang.

c. Perdagangan dan Perindustrian.

Perdagangan sebagian besar dilakukan oleh orang Bugis dan Makassar, orang Kristen Gorontalo dan Manado, orang Arab, dan orang Tionghoa.

Produk eksportnya adalah:

damar (\pm 800 pikol; barang ini sebagian besar dibawa ke To Bungku dengan perahu dan dari sana diangkut ke Makassar dengan kapal uap Paketvaart),

rotan (4000 pikol, sebagian besar dikirim ke Gorontalo),

lilin (\pm 150 hingga 200 pikol),

kopra (\pm 10.000 pikol),

kopi (\pm 100 pikol),

kakao (\pm 50 »),

beras (300 hingga 400 pikol),

jagung (400 hingga 500 pikol),

tripang (200 hingga 300 »),

karet (6 pikol). Produk impor utama adalah: arak (2000 peti), gambir (\pm 15 pikol), garam, tembakau, minyak bumi, barang-barang (\pm f 100.000) dan korek api. Selain pembuatan topi dan kotak sirih, yang telah dibahas di atas, dan penenunan karpet, yang dikenal sebagai karpet Mandoni dan digunakan untuk keperluan pribadi, tidak ada industri yang dipraktikkan di Landschap tersebut. Karpet-karpet ini ditenun dari kapas dari semak yang tumbuh di distrik Tangkiang, Batui, Kientom dan Mandono.

Budaya kapas, yang dulunya banyak ditanam, telah sangat memburuk; kapas mentah tidak diekspor.

§8. Sarana lalu lintas dan transportasi.

Di kepulauan Banggai, lalu lintas dan transportasi sebagian besar dilakukan melalui laut; jalan setapak terdapat di empat pulau utama yang membentang dari kampung pantai ke kampung pedalaman. Akan tetapi, jalan setapak tersebut tidak terlalu penting untuk lalu lintas.

Jalan setapak terpenting di daratan adalah sebagai berikut:

1. jalan setapak yang membentang dari kampung Tangkiang di pantai selatan ke kota dagang penting Bunto di pantai utara. Meskipun jarak antara kedua tempat tersebut tidak terlalu jauh jika diukur dari garis lurus karena medan pegunungan yang sulit, namun dapat ditempuh oleh pelari yang baik dalam waktu tidak kurang dari 7 hari.

2. jalan setapak yang membentang dari kampung Bouw (biasanya disebut Kientom) ke arah barat laut ke kampung Lobu yang sama pentingnya yang terletak di pantai utara. Jalan setapak ini juga melewati medan yang sulit, sementara rute tersebut ditempuh dalam waktu 5 hari.

3. Di sebelah kanan jalan setapak sebelumnya terdapat jalan dari desa Bouw ke Pinapuwang, yang baru dapat ditempuh pada hari ke-3.

§9. Ketahanan penduduk.

Saya ingin mengakhiri catatan ini dengan menyampaikan kesan yang saya terima mengenai ketahanan penduduk. Penduduk terdiri dari sejumlah besar orang yang, jika bersatu, akan mampu berbuat banyak dalam pertempuran yang mungkin terjadi. Akan tetapi, penyebaran mereka di wilayah yang luas, sehubungan

dengan kurangnya ikatan yang kuat antara berbagai suku tempat mereka berasal, membuat perlawanan terorganisasi yang berasal dari mereka sangat tidak mungkin.

Secara sepintas, orang dapat menganggap Kerajaan sebagai ikatan yang dimaksud. Akan tetapi, pada kenyataannya, raja tidak memiliki kekuatan misterius yang, sebagai suatu peraturan, berasal dari penguasa di antara orang-orang Timur, dan tidak peduli betapa tidak dicintainya dia di antara orang-orangnya, rakyatnya akan mematuhi pada kata pertama yang diucapkannya untuk mengangkat senjata guna mendukungnya dalam rencananya melawan orang asing, dengan kekerasan jika perlu.

Orang Banggai telah berada di bawah kekuasaan Ternate terlalu lama sehingga tidak lagi memiliki rasa kebangsaan dan menganggap raja mereka sebagai makhluk selain Sultan Ternate yang jauh lebih tinggi pangkatnya. Sifat pengecut dan malasnya juga menghalanginya untuk melaksanakan rencana perlawanan dengan tegas.

Mengenai persenjataan, saya dapat memberitahu Anda bahwa senjata yang biasa digunakan adalah klewang dan tombak, tombak panjang dan, seperti yang saya yakini, senapan harus tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi keterampilan dalam menangani senjata api ini bergantung pada perawatannya yang hampir tidak diperhatikan, sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki.

Landschap Bungku.

§1. Batas-batas.

Landschap Bungku disapu oleh laut di sebelah timur; tempat batas utara dimulai di pantai ini ditentukan oleh mantan Resident Ternate (Tuan Bensbach) menyusul pertikaian yang terjadi antara Banggai dan Bungku Kerajaan. Bungku mengklaim bahwa wilayah

pesisir timur Célébes di utara, mulai dari Pasi Lamba (disebut Tanjong Mantawá oleh orang Bugis), adalah miliknya. Keputusan itu berpihak pada Banggai karena ditetapkan bahwa Pulau Togontéon akan menjadi batasnya.

Kenyataan bahwa Kerajaan yang bersangkutan mengangkat kembali masalah batas ini di setiap kesempatan semata-mata merupakan konsekuensi dari keinginannya agar pohon damar yang ditemukan di wilayah yang disengketakan dianggap sebagai miliknya. Sebelum damar menjadi komoditas umum, pemerintahan Bungku tidak terlalu peduli kepada siapa wilayah yang dimaksud seharusnya menjadi milik; sekarang ada kepentingan di situ, mengingat adanya buang-tana (hak hutan) yang dipungutnya sebesar $f3$ per tahun untuk setiap pengumpul asing damar atau rotan. Mengingat hal tersebut di atas, sehubungan dengan sulitnya menentukan batas wilayah masing-masing suku yang benar, yang penduduknya masih tinggal di suku-suku yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, saya lebih memilih untuk menegakkan batas wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Ternate.

Mengenai pertanyaan apakah garis pantai dari Ujung Poso sampai Pebotoa termasuk sebagian atau seluruh Landschap Mori, saya kira saya dapat merujuk pada catatan saya mengenai Landschap tersebut (lihat §1).

Sejauh mana pantai Bungku membentang ke selatan tidak dapat dikatakan hanya dalam beberapa kata. Namun, jika merujuk pada Kerajaan Bungku saat ini, mereka akan menunjukkan Tanjong Toro-nipa-nipa sebagai batas paling selatan. Penelitian yang saya lakukan di Sakita dan Kendari serta di daerah yang dimaksud telah mengajarkan saya hal berikut ini.

Pada mulanya, pantai Bungku di selatan

tidak membentang lebih jauh dari sebelah utara kampung Labota. Ini, seperti halnya distrik-distrik yang terletak di sebelah selatannya (yang semuanya secara bersama-sama disebut Tindi inia) termasuk dalam wilayah Raja Kunawi, kepala terpenting Konfederasi Negara-negara Laiwui; selain hal ini diakui oleh pemerintahan Bungku, tampaknya hal ini disebabkan oleh masih adanya kemiripan bahasa antara masyarakat Tindi inia dan Kunawi, bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Bungku sendiri. Lebih dari seabad yang lalu, perpecahan antara masyarakat Tindi inia dan Kunawi terjadi. Perpecahan ini begitu menyeluruh sehingga penduduknya kini tidak lagi menganggap diri sebagai bagian dari Landschap lain selain Bungku sementara Kunawi telah sepenuhnya pasrah dengan situasi tersebut selama bertahun-tahun.

Sekitar enam puluh tahun yang lalu ketika pertempuran pecah antara Bungku dan Kunawi, kemenangan berada di pihak Bungku; ia memperoleh kekuasaan atas jalur pantai selatan Matarapé sejauh Toréo, mengangkat kepala suku di sana dengan gelar Sengaji dan memaksa penduduk untuk membayar upeti tahunan dalam bentuk beras. Tanpa disadari, ia kemudian memperluas kekuasaannya ke Lémbo yang lebih selatan, di mana ia juga mengangkat seorang Sengaji.

Situasi hingga beberapa tahun yang lalu kini sedemikian rupa sehingga penduduk pesisir Kunawi dari Matarapé hingga Lémbo menganggap diri mereka sepenuhnya milik penduduk Bungku, hanya milik raja di Landschap ini dan karenanya bukan milik Kunawi atau raja lain dari Laiwui, setiap tahun menaikkan upeti yang dikumpulkan oleh kepala mereka yang ditunjuk oleh Bungku, yaitu para Sengaji dari Lasolo (atau Bahosolo; la = baho = air, sungai), Molafé, Tumovu

(dengan Toréo) dan Lémbo. Upeti tersebut biasanya diterima oleh salah seorang pejabat Ternate yang bertugas di Sakita ketika ia bersama seorang kepala suku Bungku melakukan perjalanan ke selatan menuju Suku Bajo yang menjalankan usaha penangkapan ikan di perairan Bungku. Upeti tersebut mereka kumpulkan untuk Sultan Ternate sebagai “béa pasi” (pajak terumbu karang).

Lebih jauh, Pemerintah Bungku tidak memberikan perhatian sedikit pun kepada daerah-daerah yang disebutkan, suatu ketidakpedulian yang lambat laun meningkat sedemikian rupa sehingga ketika para Sengaji yang bersangkutan meninggal, tidak terpikir untuk mengangkat penggantinya.

Akibatnya, tidak hanya upeti tidak lagi dibayarkan secara teratur, tetapi juga bahwa kekuasaan atas penduduk pesisir secara bertahap jatuh sepenuhnya ke tangan seorang bernama Haji Tata. Haji ini, yang masih berkerabat dengan keluarga kepala suku Kunawi, memperoleh pengaruhnya dari hal ini dan dari keberanian serta semangatnya terhadap penduduk Lasolo, Melafe, Tomoó'u, dan Lémbo; selama beberapa tahun ini mereka hanya menurutinya. Keadaan ini diterima oleh Bungku yang menerima upeti tahunan dari Lasolo dari tangannya hingga dua tahun yang lalu Haji Tata tampaknya sudah muak dengan supremasi Landschap tersebut dan membantah bahwa jalur pantai yang dimaksud adalah milik Bungku, pemegang jabatan Tombuku (baca: Bungku), dengan mengaku sebagai bagian dari Landschap Laiwui; ini menyusul keputusan yang diambil oleh Resident Bensbach, dan menurutnya, sudut Fatu Tinuda (dekat pulau Labengke) akan membentuk batas selatan Bungku.

Ketika administrasi Landschap ini menanyakan tentang kebenaran klaim Haji Tata, pemegang jabatan itu menerima jawaban

negatif, setelah itu ia membawa masalah itu ke perhatian Resident Ternate dan, sambil menunggu keputusannya, ia melarang Kerajaan Bungku untuk mencampuri urusan Lasoli. Namun, ini tidak berarti bahwa saya ingin menyerahkan daerah yang dimaksud kepada Bungku. Mempertimbangkan jaraknya, jauh lebih mudah untuk berkendara dari Kendari daripada dari Sakita; apalagi, populasinya sama sekali mirip dengan Laiwui dalam hal asal, bahasa, adat istiadat dan kebiasaan, jumlahnya sedikit (sekitar 150 orang pria yang sehat), ikatan yang menghubungkannya dengan Bungku telah menjadi sangat longgar selama bertahun-tahun; di sisi lain, ia menjalin hubungan terus-menerus dengan orang-orang Kunawi, di lanskap mana mereka sering tinggal selama bertahun-tahun untuk membangun ladang.

Dengan menetapkan Pulau Labengke tersebut di atas sebagai batas selatan Bungku, maka Bungku Swapraja dapat memperoleh ganti rugi atas pelepasan haknya atas wilayah di sebelah selatannya, yang selanjutnya menjadi milik Laiwui, dengan pembayaran sekaligus sebesar $10 \times 4 \times f135 = f270$. Hampir tidak akan ada keberatan dari Pemerintah Bungku atas hal ini.

Selain Labengke, aset Landschap tersebut meliputi pulau-pulau berikut: Manui, Padei Besar dan Padei Kecil, yang berada di sebelah selatan. Pulu Tiga dan Pulu Dua, serta kelompok Salabangka. Pulau Wawonii (sering disalahartikan sebagai Wowoni atau Boboni), yang terletak di sebelah selatan Manui, mengakui kewenangan Bungku dan Buton dan harus memberikan penghormatan kepada keduanya. 1)

1) Berdasarkan definisi batas yang terkait dengan kontrak Ternate, pulau tersebut adalah milik Bungku. Jadi, tidak perlu ada masalah mengenai hal ini.

Jika saya tidak salah informasi, Buton tidak lagi peduli dengan urusan Wowoni dalam beberapa tahun terakhir tetapi lebih peduli lagi dengan Kerajaan Laiwui; Lakino (=gelar kepala Wawoni-i) yang disebut Puwana Lasongko dan tinggal di pantai barat pulau, pastilah saudara atau saudara tiri dari Haji Tata yang disebutkan di atas. Hal ini, sehubungan dengan keberadaan banyak suku To Kia yang berasal dari Laiwui di pulau tersebut, menjelaskan pengaruh yang diberikan oleh raja Laiwui terhadap urusan Wawoni selama bertahun-tahun. Pengaruh itu terus meningkat. Hal ini tidak dapat berbeda ketika keterlibatan Kerajaan Bungku terbatas pada kunjungan Wawoni-i sekali setahun atau setiap dua tahun oleh satu atau lebih kepala bawahannya, semata-mata untuk tujuan mengumpulkan upeti. Mengingat jarak yang sangat jauh antara pulau tersebut dan Sakita, maka disarankan untuk memisahkannya seluruhnya dari Bungku, yang kemudian dapat dikompensasi dengan pembayaran sekaligus sebesar $10 \times f f. 30 = f 300$.

Jika seseorang bertanya kepada Kerajaan Bungku sejauh mana Landschap ini membentang ke Barat, orang tersebut tidak akan menerima jawaban atau jawaban seperti ini: sejauh mata memandang, "dua puluh empat jam ke pedalaman" dst.; masalahnya adalah Kerajaan sendiri tidak mengetahuinya. Perbatasan dengan dependensi Luwu Mengkoka dan Lelewau, Weula dan Nuha dan di sebelah utaranya, Mori terletak di sisi Landschap tersebut. Bungku terbagi menjadi dua bagian oleh Landschap ini dan teluk dengan nama yang sama, bagian utara dan selatan, yang pertama dibatasi di sebelah barat oleh Tojo dan Mori dan di sebelah utara seperti yang telah kita lihat di atas oleh kepemilikan Banggai yang terletak di daratan Célébes.

Menurut definisi batas ini, wilayah yang

terletak di sebelah timur dan tenggara Danau Towuti dan dihuni oleh suku To Ro-uta, To Wiwirano dan To Epe termasuk dalam batas-batas Bungku; mengenai hubungan antara suku-suku ini dan Luwu, lihat § 5.

§ 2. Administrasi dan peradilan.

Kerajaan Bungku terdiri dari: seorang raja, yang disebut Péa Poa dalam bahasa nasional, dan dua dewan, yang utamanya, yang disebut "kumis empat" terdiri dari:

1. Jogugu atau administrator pemerintah,
2. Kapitan laut,
3. den Hukum soa sio dan
4. Hukum Sengaji,

Pemerintah juga melibatkan Sekretaris, sedangkan dewan kedua, yang disebut "Soa sio Sengaji," terdiri dari:

1. Gimalaha Marsauli,
2. Sengaji ToBungku,
3. Gimalaha Bajo,
4. Hukum Mendui,
5. Sengaji Tofutie,
6. Sengaji To Matanno,
7. Gimataha To Lobani dan
8. Lulunane to Voiso.

Semua kepala suku ini terutama adalah penasihat Raja; "kumis empat" hampir selalu dimintai pendapat, sedangkan "soa sio Sengaji" hanya dimintai pendapatnya dalam hal-hal penting. Lebih jauh, mereka semua adalah pelaksana perintah raja; perintah-perintah ini disampaikan kepada mereka oleh Jogugu.

Ketiga, anggota dewan kedua juga merupakan kepala desa di kota utama di Landschap tersebut. Secara keliru, kota ini disebut Sakita oleh kami; namun, Sakita terletak satu jam di pedalaman di sungai dengan nama yang sama. Nama asli yang sudah tidak digunakan lagi adalah Pombaleya.

Meskipun gelar "Bobato" adalah milik siapa

saja yang memegang jabatan apa pun, kepala suku yang disebutkan di atas secara khusus diberi nama demikian. Jika raja meninggal atau telah diberhentikan dari jabatannya, mereka bertemu untuk berunding mengenai pertanyaan tentang pangeran mana yang akan mereka rekomendasikan kepada Sultan Ternate untuk diangkat ke jabatan yang lowong. Biasanya mereka kemudian memilih dua atau tiga orang dari para penggugat yang sah yang dikirim ke Ternate untuk diperkenalkan kepada Sultan; Sultan mengamati tindakan kandidat tersebut untuk jangka waktu yang lebih pendek atau lebih panjang dan kemudian memilih raja dari antara mereka, kecuali jika tidak ada di antara mereka yang menyenangkannya, dalam hal ini ia berhak untuk memanggil penggugat sah lainnya ke kota utamanya. Pilihan yang dibuat oleh Sultan harus disetujui oleh Resident Ternate. Hal yang sama berlaku untuk Bobato dalam arti yang lebih sempit; kepala suku lainnya ditunjuk oleh raja.

Semua jabatan yang disebutkan di atas bersifat turun-temurun dalam keluarga tertentu dengan pengertian bahwa ayah tidak selalu harus digantikan oleh anak laki-laki. Selain asal usul, perhatian juga harus diberikan pada perilaku dan kompetensi para kandidat.

Hal di atas sudah menunjukkan hubungan subordinat Kerajaan Bungku dengan Ternate; Landschap sebelumnya ditaklukkan oleh tentara Ternate lebih dari dua ratus tahun yang lalu. Pada tahun 1682, wilayah ini diambil alih oleh Gubernur Padbrugge atas nama Perusahaan Hindia Timur untuk menghukum Sultan Ternate atas pemberontakannya terhadap otoritas Perusahaan; setelah penyerahannya, Bungku dikembalikan kepadanya tetapi dengan pengakuan kedaulatan Perusahaan sehingga negara ini dimiliki oleh Ternate hanya sebagai wilayah kekuasaan dan oleh raja Bungku sebagai

wilayah kekuasaan bawahan.

Agar dapat memastikan bahwa tidak ada yang dilakukan atau diputuskan di sini yang bertentangan dengan kepentingan dan maksud Sultan, pejabat Ternate telah ditempatkan di Bungku selama lebih dari lima puluh tahun, yang terpenting di antaranya adalah Utusan. Di antaranya adalah Kapitan kruis dan Kapitan kota serta Jurutulis, yang, seperti Utusan sendiri, didirikan di Labua; lebih jauh, Utusan kedua telah ditempatkan di Wasu atau Osu, yang umumnya dipilih dari peranakan To Ternate. Mereka harus memastikan bahwa kasbian (upeti) dibayarkan secara teratur kepada Sultan, dan mereka memungut "bea pasi" dari orang Bajo. Mereka harus diajak berkonsultasi oleh pemerintah nasional Bungku dalam segala hal; ketika belum ada perwakilan pemerintah yang ditempatkan di Sakita, mereka bahkan diizinkan untuk menangguk keputusan yang diambil oleh Landschap sambil menunggu keputusan yang akan diambil oleh Sultan. Akibatnya, kekuasaan mereka sudah sangat besar, pengaruh mereka makin meluas, dan kewibawaan raja dan kepala-kepala suku lainnya hampir tak ada lagi karena mereka didukung oleh angkatan bersenjata yang terdiri dari 40 orang bersenjata senapan. Ketika seorang pemegang jabatan Eropa ditugaskan di Banggai sekitar 25 tahun yang lalu, ia juga dipercaya untuk mengawasi Landschap Bungku. Jelaslah bahwa pengawasan ini kurang berarti karena jarak yang jauh dan komunikasi yang buruk antara Sakita dan Banggai. Pada tahun 1901, seorang pemegang jabatan pertama kali diangkat untuk Bungku dan Mori, yang berkedudukan di Sakita. Sejak saat itu, pengaruh pejabat Ternate berkurang; namun pengaruh ini masih begitu besar saat ini sehingga raja tidak berani melaksanakan perintah dari pemegang jabatan tanpa terlebih

dahulu berkonsultasi dengan Utusan. Selama saya tinggal di Bungku, saya mendapat banyak kesempatan untuk memperhatikan bahwa para kepala negara ingin agar perwalian ini dicabut. Ini akan terjadi segera setelah Ternate melepaskan haknya atas Landschap-Landschap ini.

Mengenai pendapatan Sultan dan pejabatnya, lihat § 5.

Yurisprudensi dalam semua perkara perdata dan pidana atas penduduk asli Bungku, kecuali yang diancam hukuman mati dan harus ditangani oleh dewan negara di Ternate, berada di tangan apa yang disebut "hakim-sultan", sebuah majelis yang terdiri dari Posthouder sebagai ketua, pejabat Ternate, dan anggota Kerajaan. Apa yang saya tulis dalam catatan saya tentang Landschap Banggai tentang penerapan sistem denda untuk kejahatan juga berlaku sepenuhnya untuk Bungku.

Meskipun pengenaan denda hanya dapat dilakukan oleh hakim-sultan, praktik menunjukkan bahwa denda juga dapat dijatuhkan oleh para kepala suku. Ketika saya bertanya kepada beberapa dari mereka mengapa mereka bertindak demikian yang melanggar larangan yang dijatuhkan kepada mereka, saya menerima jawaban bahwa itu hanya denda kecil dan bahwa pengenaan denda tersebut merupakan satu-satunya sumber pendapatan bagi kepala suku yang bersangkutan.

Namun, saya mengetahui bahwa denda berkisar antara *f*40 sampai *f*80 juga dijatuhkan dan Jogugu atau administrator pemerintah khususnya yang harus disalahkan.

Semua orang yang bukan penduduk asli, termasuk orang Bugis, Makassar, dsb., dianggap sebagai subjek Pemerintah. Oleh karena itu, kasus-kasus yang melibatkan mereka sebagai terdakwa atau tertuduh akan dibawa ke pengadilan negeri atau ke dewan di

Ternate.

Hanya orang Bajo yang membuat pengecualian untuk hal ini, seperti di Banggai. Jika mereka tidak membayar pajak kepada Pemerintah, tetapi "béa pasi" kepada Sultan Ternate, mereka di sisi lain tidak dianggap sebagai subjek sultan; perselisihan yang mungkin timbul di antara mereka diselesaikan oleh kepala suku mereka sendiri, yang paling penting, yaitu Lolo, Punggawa di Tumoóu (lihat § 1), galarang di Salabangka. Punggawa dari Buku Bajo juga tinggal di sini dan sekarang dia adalah hakim biasa orang laut ini; keputusannya dapat diajukan banding kepada kepala suku yang terhormat.

§ 3. Pembagian wilayah menjadi distrik, sub-distrik dan kampung; Pemerintah di wilayah tersebut.

Bungku secara administratif dibagi menjadi:

1. kota induk dan
2. distrik Bungku Utara dan Selatan.

Kita telah melihat di paragraf sebelumnya siapa kepala kampung kota induk. Segala sesuatu yang sekarang terletak di utara kota induk adalah milik Bungku Utara, segala sesuatu yang terletak di selatannya adalah milik Bungku Selatan. Sementara Jogugu adalah kepala distrik yang terakhir, Kapitan laut adalah kepala distrik yang pertama.

Masing-masing distrik ini dibagi lagi menjadi kecamatan dan ini dibagi lagi menjadi kampung:

Kepala sub-distrik Towatu, Tobahu, To-bahomsuwaai, To Kandiendi, Ambuno, To Pogaru, dan Usu tidak secara langsung berada di bawah Kapitan laut; perantaranya bergelar Hukum Sengaji Usu.

Seperti yang telah disebutkan di atas, kecamatan Labota (Bété-Bété), Bahomumpa,

Tangofa, Ona-été, Tandaoléo, To-rété, Bulele, Tulangbatu, Matarapé, To-Faya, dan Lalémo secara kolektif disebut "Tinde inia"; kepala sub-distrik ini biasanya diringkas dengan nama "Sengōji sepuluh duwa Tinde inia". Dapat dikatakan bahwa nama-nama To Watu, To Faya dst. tidak lain adalah orang Watu, orang Faya dst. Memang pada mulanya hanya nama-nama suku yang berbeda dan masih disebut demikian, tetapi lambat laun penduduk juga mulai menyebut daerah-daerah yang dihuni oleh suku-suku tersebut dengan sebutan itu; ini tidak berbicara tentang sub-distrik Watu atau Faja, sebagaimana yang mungkin diyakini oleh para ahli bahasa.

Kecuali Makole dari To Wana, semua kepala sub-distrik yang disebutkan dalam bagan tersebut menerima pengangkatan mereka dari raja Bungku, yang juga memberi mereka pakaian seragam dinas Ternate. Sejak penempatan Posthouder di Sakita, pengangkatan kepala kecamatan telah dilakukan sesuai dengan Posthouder tersebut.

Makole dari suku To Wana dipilih oleh orang-orang kaya dari suku tersebut. Pemerintah Bungku sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap pilihan tersebut. Oleh karena itu, lebih baik menyebut suku To Wana sebagai salah satu pengikut Bungku.

Pengikut lainnya adalah suku To Ro-uta, To Epe dan To Wiwirano, yang tidak disebutkan dalam bagan, biasanya diringkas dengan nama yang disebutkan di tempat kedua. Di kepala masing-masing suku ini ada seorang Makola yang, selain membayar upeti tahunan kepada Bungku, sepenuhnya bebas dalam tindakannya. Ia dipilih oleh para kepala suku tanpa campur tangan dari Pemerintah Bungku, yang pilihannya hanya diberitahukan kepada yang terakhir.

Makole Ro-uta saat ini adalah seorang wanita bernama Wo-u; ia menikah dengan

Makole dari Wiwirano yang disebut La Patiku, yang menjalankan pemerintahan untuknya. Ia adalah pribadi yang kuat dengan rasa kemandirian yang besar dan memiliki otoritas atas rakyatnya, yang telah ia berikan kepada orang-orang yang bukan milik Ro-uta maupun To Wiwirano. Misalnya, kampung Léré-éya, Laromirui, Watupali, To Waru, dan Padaléré kini sepenuhnya berada di bawah pengaruhnya, yang mana kampung ke-1, ke-4, dan ke-5 dulunya berada di bawah pimpinan To Epe. Selain itu, ia menjadi teror bagi penduduk pesisir Mohamedan dan To Epe akibat serangan pengayauan yang tidak ragu-ragu ia lakukan terhadap mereka yang tidak menyukainya.

Untuk tujuan ini, ia mengusir suku To Epe dari bekas tempat tinggal mereka: Padabaho atau Padalá - tempat kedudukan Makole suku itu - Mata-Epe-i, Puhowa, Masara, dan Poontaduwa, yang dapat ia lakukan karena tidak seperti suku To Epe, ia (dan masih) memiliki senjata api. Eksodus suku To Epe ini terjadi +/- delapan tahun yang lalu dan merupakan awal dari seluruh sejarah penderitaan bagi anggota suku itu. Menetap di wilayah pesisir antara Kolono dan Labota, sejumlah besar dari mereka menjadi korban demam yang mematikan dan epidemi cacar sehingga dari bekas penduduk Mata-Epe-i, Puhowa, Masara, dan Poontaduwa, 8 tahun yang lalu sekitar 200 pria yang sehat, saat ini tidak lebih dari 60 hingga 70 pria dewasa yang masih hidup; mereka tinggal di kampung pesisir Safaé-tolé, Timbé, Bahong-kolangu dan Baho-dopieng dan kampung yang lebih pedalaman: Larontolé, Kontabomamea, Limboméa, Bantasi dan Matamusung, yang semuanya terletak di selatan Kolono dan utara Labota. Mereka menganggap Haji Ta-i, yang tinggal di Baho-Doping, sebagai Makole mereka sementara mereka juga berada di

bawah dua Sengaji yang ditunjuk oleh Kerajaan Bungku yang masih disebut Sengaji Masara dan Poontaduwa; pemegang kekuasaan saat ini disebut Bosuwa dan Linaha, yang pertama tinggal di Larontolé, yang terakhir di Kontabomamea, yang kampung-kampungnya terletak di kedua tepi Baho (= sungai)-Doping pada jarak 5 dan 4 jam dari muara.

Penduduk asli Tadabaho pada saat yang sama melarikan diri ke Lasolo. Makole mereka juga pergi ke sana: La Tomi, sepupu pertama Haji Ta-i. Dengan izin Haji Tata, wakil Sao-Sao, raja Laiwui, para pengungsi itu meletakkan ladang mereka di sepanjang tepi La-Solo, dengan demikian berada di luar wilayah Bungku. Kadang-kadang sebagian dari mereka pergi ke Baho-Doping tetapi mayoritas tetap tinggal di wilayah Laiwui. Ini masih benar; saya mendengar dari Haji Ta-i bahwa La Tomi berencana untuk menetap di Baho-Doping. Jika ini terjadi, sebagian besar pengikutnya niscaya akan mengikutinya. Orang To Epe tidak lain ingin kembali ke tanah kelahiran mereka. Mereka dengan tidak sabar menunggu saat rekonsiliasi tuan mereka dengan La Patiku. La Tami juga menginginkan rekonsiliasi itu. Baik dia maupun sesama anggota Epe menyalahkan Kerajaan Bungku karena tidak pernah menanggapi dengan serius permintaan mereka untuk campur tangan.

Sekitar 15 sampai 20 tahun yang lalu, saudara perempuan Haji Ta-i meninggal dunia. Pada saat itu, umumnya diasumsikan bahwa ia telah disihir oleh pamannya, Hani. Dalam sebuah musyawarah keluarga yang juga dihadiri oleh La Patiku dan dengan sepengetahuan kerajaan Bungku saat itu, diputuskan untuk membunuh Hani. Hal ini dilakukan oleh para pengikut La Tomi atas perintahnya.

La Patiku, yang sebelumnya tidak dapat melawan niat untuk melakukan pembunuhan,

kini menemukan alasan untuk memburu orang-orang dari La Tomi; perbuatan ini tidak tetap tidak terbalaskan dan selama bertahun-tahun suku To Epe dan To Ro-uta saling melakukan penyerangan; suku To Epe menyerah dan beberapa kali meminta campur tangan pemerintah pribumi di Sakita. Ketika hal ini tidak terjadi dan mereka tidak dapat lagi melawan La Patiku, mereka meninggalkan negara mereka seperti yang disebutkan di atas.

Mengenai kekuatan jumlah suku To Ro-uta dan Wiwirano, lihat § 6.-

Pendapatan resmi para kepala sub-distrik sangat kecil sehingga saya pikir saya harus membiarkan mereka sendiri. Meskipun campur tangan dari pihak mereka bukanlah pengecualian, mereka jauh kurang mahir dalam melaksanakannya dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Banggai. Selain itu, mereka tidak dalam posisi untuk melakukan hal ini seperti yang terakhir: penduduk Bungku - tanpa mengecualikan suku To Wana, To Epe, To Ro-uta dan To Wiwirano, yang mana para kepala suku Bungku sebenarnya hanya mempunyai sedikit kewenangan, jika memang ada - sebagian besar adalah penganut agama Islam, meskipun hanya namanya saja; selain itu, karena mereka sebagian besar tinggal di pesisir, mereka terus-menerus berhubungan dengan orang asing. Jauh lebih dari kepala mereka sendiri, mereka menoleransi korupsi yang dilakukan oleh banyak keturunan bangsawan yang terlalu malas untuk bekerja dan membutuhkan banyak uang untuk memuaskan nafsu besar mereka terhadap wanita dan opium. Ketakutan, dan mungkin juga gagasan bahwa ini menyangkut anggota suku yang paling penting, mencegah mereka untuk memberi tahu pemerintah Eropa tentang korupsi ini.

§4. Anggota Swapraja saat ini dan pendapatan

mereka.

Raja Bungku saat ini, Kesil Nggeru Haji Abdul Wahab, diangkat ke jabatan tersebut beberapa tahun yang lalu, melewati putra sah pendahulunya (Kesil Laopéké), Kumisi. Akan tetapi, ia memiliki reputasi yang buruk di mata Sultan Ternate dan karenanya telah bermukim di Kendari selama beberapa waktu dan berkecimpung dalam perdagangan. Kesil Nggeru lahir dari pernikahan La Mando, seorang anak bangsa, dalam kehidupannya Kalim dari Bungku dan Tampi', putri salah seorang mantan raja Bungku: Kesil Dongké Kumbi. Oleh karena itu, ia bukan seorang ana'-péa pua atau anak-raja dalam arti kata yang lebih sempit tetapi termasuk golongan ana'-bangsa yang lebih banyak jumlahnya. Di Banggai masih diperhitungkan apakah seorang ana'-bangsa merupakan keturunan bangsawan dalam garis keturunan laki-laki atau tidak. Di Bungku satu-satunya syarat untuk menjadi raja adalah: tergolong ana'-bangsa dan disukai oleh Sultan Ternate.

Raja masih memiliki 2 saudara tiri yang masih hidup, yaitu Haji Abdullah yang memegang peranan sebagai Kapitan laut, dan La Kafa, Imam bangsa La Nona; mereka bertiga memiliki satu ayah.

Raja memiliki tiga orang anak dari seorang perempuan dari kelas kaya, yaitu Sunde, Chatib bangsa, Lamba, yang menikah dengan Sekretaris yang sekarang berada di Mekkah, Haji Alaudin, dan Katupa, yang memiliki seorang pedagang Banjar, Abukasim, sebagai suami.

Baru-baru ini raja menikahi seorang ana'-bangsa, yaitu Jamila, janda dari salah seorang pendahulunya: Kesil La Tojo.

Dari mereka, hanya satu orang putri yang masih hidup, yaitu Na-Imu, istri Jogugu, tetapi bukan ibu dari Kesil Gani, menantu La Patiku. Dari raja sebelumnya: Laopéké, selain Kumisi

yang disebutkan di atas, ada seorang putri yang masih hidup bernama Fanti, yang menikah dengan Chatib bangsa di Sakita: Jahari. Nama-nama anggota Swapraja lainnya adalah:

Dollé	Hukum Soa Siu,
Saulu	Hukum sengaji,
Atahamies	Gimalaha Marsauli,
Tombo	Sengaji Tobungku,
Pangki	Gimalaha Bajo,
La Sofa	Hukum Mendui,
Indo'etta	Sengaji Tofuti,
Jalali	Sengaji Ke Matano,
Pajaya	Gimalaha Ke Lobani,
Vihoki	Lutunane Ke Voiso,

Pendapatan kerajaan terutama mencakup hasil dari berbagai distrik dari pajak padi, yang bagaimanapun, tidak dipungut di mana-mana menurut standar yang sama.

Distrik-distrik yang memungut pajak padi adalah sebagai berikut: Tironga, To-kalla, To-Watu, To-bahu, To kandiendi, To-pogaru, To pada, Ipi, Bahomohoni Bungi, Tombélala, Matangkoni, Ungsongi, Nambo, Lara-uwé, Kolono, Sium-batu dan "Tinde Tinia"; total hasil panen adalah 50 pikol beras per tahun (termasuk padi yang akan dikonversi menjadi beras) pada $f5.=f250.-$

Raja menerima dari ini: 36 pikol pada = $f180.-$

Jogugu dan Kapitan laut masing-masing 4 $\frac{1}{4}$ p. = $f22.50$

Hukum Soa Sio 3 pikol = $f15.-$

Hukum Sengaji 2 hal. = $f10.-$

Selanjutnya, Kecamatan Ona-été, Tanda-oléo, Torété, To-faya, Lalémo dan Matarapé wajib membayar hasil tahunan tripang yang masing-masing berjumlah 135 kati, dan raja menerima total 300 kati

Jogugu 150 kati

Kapitan laut 150 kati

Hukum Soa Sio 90 kati

Hukum Sengaji 60 kati

Distrik-distrik lain yang termasuk dalam "Tinde inia" (kecuali Bété-Bété, yang saat ini tidak berpenghuni) setiap tahun membayar kepada raja lilin sebesar 50 kati lilin atau bersama-sama $2\frac{1}{2}$ pikol sebesar $f50.=f125$

Suku To Wana juga berkewajiban untuk membayar hasil penjualan kepada raja; dari suku ini, barang tersebut dibeli dengan harga yang sangat rendah; setiap 2 tahun mereka harus mengirimkan 320 sangka lilin murni seharga $\frac{2}{3}$ kati dengan harga 40 real atau $f80.-$, yang berarti pendapatan sebesar $f 40.-$ per tahun.

Dari Pulau Menui raja setiap tahun memperoleh:

2 tempayan minyak kelapa. =160 L $f 40.-$;

1 kodi kain sarung hitam. $f 60.-$;

1 pikol tripang susun. $f 8.-$;

====

Hasil dari "lungkabata" atau hak untuk membuat perahu berjumlah $f1$ untuk satu soppé, $f2$ untuk satu padéwakang; "kumis ampat" dari Menui masing-masing memperoleh 120, 120, 100 dan 100 L minyak kelapa dalam setahun.

Lebih jauh, raja dan kumis ampat berhak untuk memiliki perahu-korra-korra yang dibangun untuk mereka sendiri oleh penduduk Menuik untuk keperluan pribadi; hak ini digunakan sekali setiap 4 sampai 5 tahun; korra-korra yang akan diserahkan bernilai $f 60.- f 100.-$

Sengaji Masara dan Poontaduwa (suku To Epé) diwajibkan untuk membayar hasil tahunan kepada raja sebesar 30 kati beras, 1 kerbau dan 2 kati wax $f 28.-$; lebih jauh lagi, mereka berkontribusi pada penilaian tahunan yang menjadi kewajiban orang Epe lainnya kepada Bungku. Upeti ini sama besarnya dengan upeti yang harus dibayarkan oleh To

Ro-uta (termasuk To Wiwirano) juga kepada Bungku, yaitu 50 basung beras seharga 4 kati 2 picol dan satu kerbau setiap dua tahun sekali. Ketika To Epe masih berhubungan baik dengan To Ro-uta, mereka bergantian mengumpulkan upeti itu, satu tahun To Epe, tahun berikutnya To Ro-uta. Akan tetapi, ketika hubungan berubah menjadi permusuhan, pembayaran upeti yang teratur juga berhenti; para pemuka yang terlibat tidak lagi berpikir untuk menyatukannya dan baru setelah peringatan berulang-ulang dari Pemerintah Bungku kewajiban itu dipenuhi lagi selama satu tahun. Maka La Patiku, setelah tiga tahun tidak terdengar kabarnya, sekarang sekali lagi sibuk mengumpulkan upeti tersebut di atas. Baik ini maupun itu yang harus dinaikkan oleh To Epe tidak menguntungkan kerajaan, tetapi disisihkan untuk pejabat Ternate.

Selama beberapa tahun terakhir, pendapatan raja juga mencakup hasil dari buang-tana, pajak hutan yang dipungut secara eksklusif pada pencari hasil hutan asing dan jumlahnya mencapai 3 gulden per orang per tahun. Dari sumber daya ini, raja menerima rata-rata 300 gulden per tahun, yang sebagiannya ia berikan kepada Kapitan laut.

Akhirnya, kecamatan Usu, Baho-éya réko², Lanona, Tombélalá, Bungi dan Uingsangi pada gilirannya harus menyediakan bagi raja orang-orang rodi yang harus bekerja sebagai pelayan atau sebagai pengurus di kediaman kerajaan secara cuma-cuma, tetapi sebagai imbalannya mereka akan diberi makanan.

§ 5. Hubungan dengan bentang alam lain.

Banyak yang telah diutarakan di atas tentang hubungan dengan Ternate. Saya hanya perlu menyebutkan di sini pendapatan yang diperoleh Sultan dan para pejabatnya dari Bungku;

a. Sultan:
 2 pikol lilin *f* 150.
 3 kodi sarung hitam *f* 180.
 = *f* 330.
 4 kodi sarung Bug. *f* 140.
 300 potong ujjang (pakaian yang terbuat dari kulit pohon yang diketuk) *f* 80.
 Pendapatan dari “béa padi” *f* 300.
 Total *f* 850.

Selanjutnya, 7 kléwang, 7 tombak dan 7 tongkat besi. Semuanya diangkut ke Ternate dengan menggunakan 2 korra-korra besar, yang substrukturnya harus disediakan oleh orang-orang Menui; penyelesaian perahu selanjutnya sebagian dilakukan dalam rodi oleh orang-orang Tinde-inia dan penduduk sub-distrik Tombélala, Bungi, Ipi, To-pada, Bahomohomi, Lanona, Baho-éya réko², Usu, milik Bungku Utara, Topogaru, Ambuno, To kandiendi, To-bahonsuwasi, Tobahu dan To Watu. Mereka diawaki oleh orang rodi, setiap perahu 12 sampai 24 orang, yang disediakan oleh sub-distrik yang sama. Perjalanan pergi dan kembali, termasuk tinggal wajib di Ternate, memakan waktu 7 sampai 8 bulan. Tidak mengherankan banyak yang mencoba menghindari kewajiban ini. Bila hal ini tidak memungkinkan dan orang yang bersangkutan tidak dapat meninggalkan rumah dan kebun untuk waktu yang lama, penebusan dapat dilakukan dengan jumlah mulai dari *f* 100 hingga *f* 125. Sering kali mereka ditunjuk untuk melakukan perjalanan yang dimaksud seperti dalam kasus yang baru saja disebutkan. Pejabat Ternate kemudian menunjuk satu atau lebih pengikut mereka sebagai pengganti, memberi mereka sebagian dari uang tebusan tetapi mengantongi bagian terbesar. Salah satu korra-korra tetap tinggal di Ternate; yang lain akan mengembalikan awak kapal ke Sakita.

Jika masih dalam kondisi baik setelah kembali, yang jarang terjadi karena kayu dari mana korra-korra dibuat biasanya berkualitas rendah, maka korra-korra tersebut menjadi milik nĕgri.

Seperti halnya di Banggai, pejabat Ternate yang ditempatkan di Bungku tidak memiliki penghasilan tetap; jika To Epe dan To Ro-uta membayar upeti tahunan mereka kepada kerajaan maka kerajaan akan menyerahkannya kepada Utusan dan pejabat bawahannya; mereka juga menerima dari "Sengaji sepuluh duwa Tinde-inia" 120 béu beras, yang setara dengan +/- 2 pikol beras.

Saya merujuk pada catatan saya tentang negara-negara tersebut mengenai hubungan Bungku dengan Landschap Banggai dan Mori.

Kerajaan Bungku tidak memiliki hubungan dengan Tojo maupun Laiwui; hubungan dengan Landschap tersebut dapat digambarkan sebagai hubungan yang netral. Tidak ada ikatan kekeluargaan di antara para anggota badan pemerintahan sendiri tersebut. Mereka tidak memiliki kepentingan yang sama.

Sekarang tinggal menjelaskan beberapa hal tentang hubungan dengan Luwu. Dalam catatan saya tentang Landschap Mori, saya telah menyebutkan pernyataan kerajaan Luwu seolah-olah Bungku telah berutang budi padanya di masa lalu. "Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran," kata orang Bungku - "sebaliknya, Luwu masih memiliki utang lama yang harus dibayar kepada kita." Dan kemudian kita mendengar hal berikut tentang hal ini.

Ketika Kolono Bobu menjadi Sultan Ternate ia melakukan perjalanan ke Bungku dengan sejumlah besar perahu. Ketika ia tiba di dekat Nambo di pesisir Bungku, ia menemukan sebuah armada di sana yang kemudian ternyata milik Datu Luwu; ia sendiri berada di salah satu perahu tersebut. Pangeran Luwu segera memenuhi panggilan Sultan untuk menghadap

kepadanya; ia ditangkap oleh Sultan dan diserahkan ke dalam tahanan raja Bungku. Kemudian Kolono Bobu pergi. Orang-orang Luwu meminta raja Bungku untuk membebaskan tuan mereka. Raja hanya menginginkan ini dengan membayar tebusan, yang terdiri dari, antara lain, tujuh gong yang diisi dengan debu emas dan 1 tempayan yang diisi dengan air buah pinang muda.

Setelah beberapa lama orang-orang Luwu datang kepada raja lagi, membawa sebagian uang tebusan; mereka tidak dapat mengumpulkan sisanya. Atas permintaan pangeran Luwu, raja Bungku mengizinkannya kembali ke negerinya dan mengurus sendiri sisa uang tebusan. Sang Datu pun pergi tetapi sampai sekarang Luwu belum juga membayar utang lama itu.

Apa pun kebenaran pernyataan Bungku dan Luwu, yang pasti tidak ada hubungan apa pun antara Kerajaan yang bersangkutan selama lima puluh tahun terakhir. Tidak pula ada ikatan kekeluargaan di antara mereka. Penduduk yang saling bertetangga itu juga hampir tidak pernah berhubungan satu sama lain selama kurun waktu itu; di seluruh Luwu tidak ditemukan satu pun To Bungku; sebaliknya, hanya sedikit To Luwu yang ditemukan di daerah Bungku. Kedua Landschap ini tidak memiliki kepentingan yang sama. Satu-satunya ikatan yang terjalin di antara mereka, yang sangat longgar, dibentuk oleh suku To Epe, To Ro-uta, dan Wiwirano yang telah disebutkan beberapa kali di atas.

Mereka juga dikatakan tunduk kepada Luwu, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini hanya sebatas nama. Upeti yang sebelumnya harus mereka bayarkan kepada Luwu hampir tidak berarti apa-apa; omong-omong, tidak ada maksud lain dengan membayar upeti ini selain untuk memberikan bukti ketundukan mereka. Upeti-upeti tersebut

diterima oleh Andé-guru (sekarang disebut Macoa, dari Malili), yang menyerahkannya kepada Opu Mencara Malili, seorang keturunan raja Luwu, yang dalam kasus ini bertindak sebagai wakil Datu. Didampingi oleh kepala-kepala To Epe, To Ro-uta dan To Wiwirano atau pengganti-penggantinya, para Mencara kemudian melanjutkan perjalanan ke Palopo di mana upeti-upeti tersebut dipersembahkan kepada Datu dan kepala-kepala tersebut atau pengganti-penggantinya tinggal beberapa saat, yang konon katanya untuk menunggu printas dari kerajaan.

Sudah menjadi kebiasaan pula bahwa ketika seorang Opu Mencara Malili yang baru diangkat, ketiga kepala suku yang bersangkutan datang ke Malili dengan membawa beberapa hadiah yang ditujukan untuk kepala suku Luwu tersebut. Ketika ia datang mengunjungi mereka di negeri mereka sendiri, ia diterima dengan penghormatan yang sangat tinggi.

Ketika 2 tahun yang lalu Andi Jaling, saudara tiri Datu Luwu saat ini, diangkat menjadi Mencara Malili, ia memberi tahu kepala suku Ro-uta tentang hal ini; pengganti kepala suku ini dan kepala suku To Wiwirano kemudian datang ke Malili untuk memberi penghormatan kepada Mencara yang baru, dan memberikan beberapa hadiah kepada yang terakhir.

Di tepi timur Danau To-wuti terdapat Pasar Tokolimbo, pasar yang hampir sama pentingnya dengan pasar yang terdapat di tepi utara Danau Matano, yaitu Sokoio (lihat catatan tentang Mori). Di pasar yang diadakan setiap 15 hari itu, penduduk Ro-uta, Léré-éya, Wiwirano, Laromirui, dan Watu-pali, yang secara ringkas disebut To Ro-uta, bertemu dengan penduduk Wé-réla (sisi barat danau) dan Wuha (sisi utara danau). Para pedagang Bugis dan Luwu dari tempat-tempat

perdagangan Malili, Warau dan Sorowako juga datang ke sana dengan membawa berbagai macam barang dagangan, terutama kain linen yang mereka tukarkan dengan beras. Di sinilah juga para pencari damar yang banyak jumlahnya dari berbagai daerah di Luwu, seperti Rongkong, Masamba, Baibunta, Wada, dan lain-lain mendapatkan pasokan makanan. Sejak damar menjadi komoditas umum, hutan di sebelah timur Danau Towuti dan milik suku To Ro-uta telah dihuni oleh penduduk yang sangat berpindah-pindah yang tidak harus membayar buang-tana kepada Makole Ro-uta untuk bisnis mereka tetapi harus membayar kepada kepala Malili sesuai dengan kesepakatan antara kedua kepala suku. Pajak hutan ini, yang disebut sassungalâ dalam bahasa Bugis, dulunya berjumlah 10% dari yang dikumpulkan; Controleur Luwu, Krapels, mengurangnya menjadi 50 kati damar per orang per tahun.

Damar yang dikumpulkan di hutan Ro-uta telah sampai di Malili dan Palopo hingga ke Makassar. Diperkirakan 2000 pikol diperoleh dari hutan tersebut setiap tahun.

Pengumpulannya sebagian besar dilakukan oleh orang-orang dari luar; orang Ro-uta dan orang Wiwirano lebih suka fokus pada pertanian.

§ 6. Jumlah penduduk, pembagiannya ke dalam suku dan kelas.

Data yang saya peroleh mengenai jumlah penduduk asli telah saya masukkan ke dalam tabel berikut.

Penduduk asli Bungku dapat dibagi ke dalam suku-suku berikut:

1. To-Bungku sebenarnya atau penduduk sub-distrik: Ambuno, Usu, Baho éya réko², Lanona, Bahomohoni, Ipi, Bungi, kota induk Matangkoni, Ungsongi Nambo, Kolono, Sium-

batu dan Menui.

2. suku To-pagaru (mereka menyebut dorée sebagai ganti bare'e), To kandiendi, To-bahu, To kalla dan Tironga, yang berbicara dalam bahasa bare'e atau dialeknya;

3. satu bahasa yang sangat mirip dengan suku To-bahonsuwaai dan To-Watu yang berbahasa Mori;

4. suku To wana yang berbahasa Ta;

5. suku To Tinde inia, yang dalam hal bahasa, adat istiadat, dan kebiasaannya sama dengan suku Tokia atau To lolaki (suku utama dari Laiwui);

6. suku To Epe, To Ro-uta, dan To wirirano, yang biasanya diringkas dengan nama To Epe; mereka berbicara dalam bahasa yang memiliki banyak penyimpangan, tetapi juga banyak kesamaan dengan bah. Bungku; seperti To Bungku, mereka mengatakan nahina yang berarti "tidak" atau "tidak boleh";

7. Suku To-pada, yang konon katanya berasal dari daerah Bada (Luwu).

Seperti halnya di Banggai, penduduk Bungku terbagi dalam lima kelas

Ana' péa-puwa atau anak raja sejati (kelas ini sekarang hanya diwakili oleh beberapa orang), golongan ana-bangsa yang banyak jumlahnya.

keluarga ana bobato atau Sengaji,
orang merdeka dan
budak.

Penduduk non-pribumi terdiri dari, selain sekitar 20 orang asing oriental (Tionghoa dan Arab): Bajo, Bugis dan Makassar, To lolaki dan To lolayo.

Suku Bajo tinggal di perahu atau di rumah-rumah yang mereka bangun di atas panggung di laut; tempat berlindung utama mereka di musim hujan yang buruk ketika mereka tidak dapat melakukan perdagangan ikan adalah Kepulauan Salabangka. Jumlah mereka 200

hingga 250 orang pria yang sehat jasmani dan memiliki 80 perahu besar dan 20 perahu kecil (padéwakan dan sopé) dan sekitar 100 rumah.

Suku Bugis dan Makassar terlibat dalam perdagangan atau penangkapan ikan. Mereka dapat ditemukan di hampir semua kampung pantai. Namun, mereka sebagian besar berlokasi di Sakita, Salabangka, Mosombuano dan Morowali. Sementara di tempat pertama mereka langsung berada di bawah perintah pemegang jabatan, di tiga tempat terakhir Kapitan telah ditunjuk untuk mengawasi mereka. Sejak 1894 mereka telah membayar pajak pribadi suara kepada Pemerintah. Jumlah mereka ±325 orang laki-laki yang sehat jasmani.

Suku To lolaki berasal dari Laiwui, suku To lolayo dari Tojo; mereka secara eksklusif disibukkan dengan pengumpulan hasil hutan, kembali ke negara mereka setelah beberapa tahun dan selalu digantikan oleh orang lain.

Suku To lolaki sebagian besar terdapat di Kecamatan To-Watu (80 orang di bawah anakia To hamba) dan di Sompolëmo di Sungai Rano (25 orang di bawah anakia Tafunga).

Suku To lolayo menjalankan usahanya di sub-distrik To-bahu (35 orang) dan di DAS Morowali (38 orang).

Selain itu, terdapat juga para pencari damar di hutan Rano, Morowali, dan Tiworo, yang berasal dari "Tinde inia", Lagé, dan berbagai wilayah Luwu (+ 100 orang).

§ 7. Mata pencaharian.

Mata pencaharian utama penduduk asli adalah pertanian; mata pencaharian ini hanya dilakukan di ladang kering dan tanpa bantuan kerbau atau ternak lainnya. Berikut ini adalah hasil pertanian yang ditanam: padi (berkualitas baik), jagung, ubi, dan kacang, serta sedikit tembakau. Padi tidak dibudidayakan secara memadai; makanan pokok penduduk adalah

sagu; Ladang-ladang seperti ini dapat ditemukan di sepanjang pantai. Beras hanya dikonsumsi selama bulan-bulan pertama setelah panen dan pada hari-hari besar keagamaan. Sebagian kecil dijual kepada pedagang dengan harga f 8,00 per pikol; pedagang tersebut terpaksa mengimpor beras dari tempat lain, yang harganya f 10 per pikol.

Budidaya kelapa telah mengalami kemajuan pesat dalam dua puluh tahun terakhir dan merupakan sumber pendapatan penting, terutama bagi penduduk pantai.

Kayu berlimpah di pegunungan. Varietas terbaiknya adalah: dua jenis *Michelia* (cempaga), *Vitex cofassus* atau kayu bitu, kayu ulin dan kayu nyato.

Kayu-kayu tersebut digunakan untuk konstruksi rumah dan kano tetapi tidak diekspor ke tempat lain; hanya sejumlah kecil kayu nyato yang diekspor dari Salabangka ke Makassar dalam bentuk papan.

Peternakan sangat sedikit dilakukan; kerbau terutama ditemukan di wilayah yang dihuni oleh suku To Ro-uta, To Wiwirano dan To Epe, serta di kecamatan selatan dan di Pulau Menui. Hewan-hewan ini kurang dirawat dan hampir tidak dimanfaatkan. Saya tidak menemukan kuda di mana pun tetapi kambing dan babi dalam jumlah besar. Rusa banyak ditemukan di alam liar; orang-orang pegunungan suka memburunya. Ayam dan bebek sangat langka di desa-desa pantai tetapi umum di kampung-kampung pedalaman.

Lautnya sangat kaya akan ikan. Akan tetapi, penduduk pantai terlalu malas untuk mengabdikan diri pada penangkapan ikan; mereka menangkap ikan sepuasnya untuk kebutuhan mereka sendiri. Mereka lebih suka menyerahkan keuntungan dari industri itu kepada orang asing: Suku Bajo, Bugis, dan Makassar. Orang-orang tersebut memanfaatkan sero secara luas. Suku Bajo

terutama menekuni penangkapan ikan tripang.

Seperti yang telah kita lihat di atas, penduduk juga menyerahkan pengumpulan hasil hutan kepada orang asing; hanya penduduk "Tinde inia" yang membuat pengecualian untuk ini.

Perdagangan sebagian besar dilakukan oleh orang asing. Meskipun hal ini tidak terlalu berarti sekitar 50 tahun yang lalu, perdagangan telah meningkat pesat sejak kenaikan harga rotan. Akan tetapi, sebagian besar perdagangan dilakukan di pesisir Teluk Mori, yang menjelaskan mengapa sebagian besar damar berasal dari sana. Diekspor setiap tahun dari Sakita ke Makassar

+/- 25.000 pikol damar (+20.000 pikol berasal dari Mori)

+/- 7000 pikol rotan, (\pm 3000 dari Mori),

+/- 10 pikol lilin (penurunan signifikan dapat dicatat dalam artikel ini)

+/- 150 pikol kopra;

Barang-barang ekspor juga meliputi: kerang, tripang, kulit, sagu dan pinang. Saya tidak dapat memperoleh angka apa pun mengenai ini.

Barang-barang impor utama adalah:

barang produksi ($\pm f$ 45.000),

benang dan barang hiasan ($\pm f$ 3000),

gambir 30 pikol,

garam 800 pikol,

barang dari tanah liat, kaca, emas, perak, besi, tembaga, dan beras.

(Jumlah atau nilai tidak diketahui).

Diimpor di Salabangka:

barang produksi senilai f 1.000.

benang dan barang hiasan 2500.

beras 1000 pikol

garam 300 pikol

gula 40 pikol

minyak bumi 400 kisten

gambir 20 pikol

barang dari tanah liat, kaca, besi, tembaga korek api 120 bruto, dst.

Ekspor dari Salabangka meliputi:

3500 pikol damar,

4000 pikol rotan,

450 pikol tripang,

600 pikol kerang,

2000 pikol agar-agar,

30 pikol kulit,

3 pikol sirip hiu dan juga sedikit kopra dan kelapa.

Ekspor dan impor dari dan ke tempat-tempat yang disebutkan sebagian besar dilakukan oleh kapal uap Paketvaart; setiap 4 minggu kapal itu singgah di Salabangka dan Sakita. Produk ekspor dipindahkan ke gudang-gudang ini dengan menggunakan perahu dengan berbagai ukuran; hal yang sama juga terjadi pada barang-barang impor.

Jalan tidak ada di Landschap Bungku. Meskipun banyak ditemukan jalan setapak, jalan setapak tersebut tidak kalah pentingnya untuk lalu lintas; terlebih lagi, jalan setapak tersebut terus dimodifikasi, yang terkait dengan penanaman padi atau jagung yang tidak teratur.

Satu-satunya sarana lalu lintas di wilayah damar dan rotan biasanya adalah sungai-sungai yang mengalir melaluinya - sebenarnya hanya sungai-sungai kecil.

Landschap MORI.

§ 1. Batas-batas.

Saat ini belum dapat ditetapkan batas-batas Landschap Mori secara tepat; para anggota kerajaan, kecuali pimpinan tertinggi, tetap bungkam dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang masalah tersebut atau memberikan jawaban-jawaban yang samar dan tidak jelas, sedangkan raja memberikan gambaran tentang batas-batas wilayahnya yang

mungkin dulunya benar, tetapi untuk saat ini tidak diragukan lagi harus dianggap tidak benar, karena ia sendiri mengakui bahwa selama bertahun-tahun raja-raja To Bungku dan Tojo lainnya telah berkuasa atas sebagian besar wilayah yang termasuk dalam batas-batas wilayahnya.

Landschap Mori berbatasan di sebelah utara dengan Landschap Poso dan Tojo yang termasuk dalam divisi Sulawesi Tengah. Sementara wilayah di utara La¹⁾ sebelumnya tidak berpenghuni, hal ini berubah sekitar empat puluh tahun yang lalu karena perkembangan perdagangan damar, yang membawa banyak orang Toraja dari Luwu dan wilayah Poso dan dari Laiwui ke pohon damar, yang sangat banyak terdapat di pegunungan Pu'umbana, Pelleru, Lambolo dan Tambusisi, yang semuanya terletak di utara sungai La, yang menarik dan menciptakan populasi yang sangat cair di sana. Populasi ini sekarang mengakui otoritas penguasa Mori, sebagaimana terlihat dari hasil dari apa yang disebut buangtana (pajak hutan, sebesar f2,50 per tahun untuk setiap pengumpul damar atau rotan) kepadanya. Oleh karena itu, pegunungan yang disebutkan berada dalam lingkup pengaruh raja Mori.

1) Sungai terbesar yang mengalir ke Teluk Tomori.

Di sebelah barat, Mori berbatasan dengan wilayah yang dihuni oleh suku To Pasa, To Lamusa dan To Palandé yang termasuk dalam subdivisi Poso, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah jajahan Luwu, yaitu Nuha dan Matano (= Matanna), dan wilayah seperti Ro-uta yang berada di bawah Luwu dan Bungku. Di sebelah timur, terakhir berbatasan dengan wilayah To Bungku, yang menurut mereka berarti wilayah itu benar-benar terputus dari laut. Akan tetapi, Swapraja Mori tidak mengakui hal ini dan mengklaim bahwa pesisir

dari Ujung Poso hingga Pebotoatu adalah milik Mori. Akan tetapi, ia mengakui sejak lama bahwa ia tidak lagi memiliki apa pun untuk dikatakan di bagian antara Ujung Poso dan Rano dan di bagian dari selatan Lingkobu ke Pebotoa, dan bahwa bagian-bagian ini sejak saat itu berada di bawah supremasi raja Bungku, yang melaluinya buang-tana diterima dari para pengumpul damar dan rotan yang mengangkut hasil produksi mereka ke bagian-bagian pesisir tersebut. Hasil produksi yang diangkut ke bagian pesisir Rano-Tanjong Pakka Pakka berutang buang-tana kepada Bungku dan Mori ketika pengumpul tersebut termasuk suku To lolaki (Laiwui) dan hanya kepada Mori di mana pengumpul lainnya terlibat. Akhirnya kerajaan Bungku saat ini abstain dari semua pelaksanaan otoritas dari Tanjong Pakka Pakka ke Lingkobu.

§ 2. Administrasi dan Peradilan.

Kewenangan tertinggi dalam Landschap berada di tangan dua kepala suku, yang sama sekali tidak bergantung satu sama lain, yang menyandang gelar Makole (= tuan tanah), yang untuk membedakan mereka dari para bangsawan yang sama-sama berhak atas predikat Makole, sering ditambahkan kata "Wawa-inia" (= pembawa atau pemandu tanah).

Untuk memisahkan kedua kepala suku tersebut, nama kepala suku ditambahkan setelah gelar Makole sehingga sekarang orang berbicara tentang Makole Marunduh dan Édé, atau predikat tersebut diikuti oleh nama kursi Pemerintah saat ini atau salah satu kursi Pemerintah sebelumnya. Misalnya, Marunduh disebut Makole Pantaulé Petasia atau Matandouw, biasanya Makole Petasia, sedangkan Édé adalah Édé Makole Wawontuko atau NgUsumbuatu.

Meskipun sekarang mereka saling

bergantung, Landschap tidak terbagi di antara mereka. Masing-masing dari mereka memiliki desanya sendiri dengan dusun-dusunnya sendiri di mana ia sendiri memiliki hak bicara dan yang dihuni oleh sukunya sendiri. Suku-suku lainnya menjadi yang menjadi bagian dari populasi To Mori adalah 'palili' atau pengikut Marunduh dan Édé, yang taat kepada keduanya, tetapi hanya diwajibkan membayar upeti tahunan kepada yang pertama. Dua suku membuat pengecualian untuk ini karena mereka tidak dianggap "palili", tetapi setara dengan To Petasia dan To ngUsumbuatu, yaitu To Kangua, yang disebut To Sorombu sesuai dengan tempat tinggal mereka saat ini, dan To Toli Toli atau Pampawu. Akan tetapi, kepala suku mereka, yang juga disebut Makole, kurang lebih tunduk kepada Makole dari Petasia dan NgUsumbuatu yang merupakan kerabat mereka dan yang menjadi tempat mereka meminta bantuan jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang harus diputuskan oleh bawahan mereka.

Jika menyangkut masalah kepentingan umum, keempat pangeran ini bertemu bersama untuk berunding; maka Makole dari Petasia diakui, jika bukan yang terpenting, setidaknya sebagai yang tertua.

Administrasi negara juga mencakup dua Karua dan satu Bonto. Keduanya bersama-sama membentuk, seolah-olah, Hadat Landschap yang harus diajak konsultasi oleh Makole dalam hal-hal penting dan juga dalam administrasi peradilan.

Dari dua Karua, yaitu Karua Moiki dan Karua Pansu atau Lémbu, yang pertama adalah yang paling penting. Di masa lalu ia juga berada di atas Bonto dalam hal pangkat dan pengaruhnya dominan dalam pemilihan Makole wawa inia baru yang menerima jabatan raja dari tangannya tetapi untuk waktu yang lama sekarang Bonto dan Karua Moiki

memiliki pangkat yang sama tinggi dan bersama-sama menunjuk raja baru. Akan tetapi, mereka tidak bebas dalam memilih tetapi harus mempertimbangkan keinginan rakyat. Setelah raja Mori meninggal, semua kepala suku berkumpul di istana kerajaan, di mana mereka memutuskan di antara mereka sendiri anggota keluarga kerajaan mana yang akan diangkat menjadi Makole wawa inia. Makole yang paling lama hidup tidak diizinkan untuk menggunakan pengaruhnya dalam pemilihan ini.

Karua dan Bonto dipilih dari golongan kaya dan dikukuhkan perannya oleh Makole Petasia. Dua suku pertama tidak hanya penasihat tetapi juga kepala suku, Karua Moiki dari To Moiki, Karua Pansu dari To Watu Lémbu; dengan demikian mereka adalah “palili” dari pangeran Mori.

Kepala suku lainnya menyandang berbagai gelar seperti “Makole palili”, “anaMakole”, “méa MuTuwa” dan “Karua”, sementara ada juga di antara mereka yang hanya dipanggil dengan nama mereka sendiri,

Di bawah kepala suku ini adalah kepala kampung.

§ 3. Anggota Kerajaan saat ini dan pendapatan mereka.

Seperti yang telah kami nyatakan di atas, raja Petasia saat ini disebut Marunduh (= guntur). Meskipun sudah berusia 60 tahun, ia masih sangat cepat dalam gerakannya, pelari yang baik dan mampu menahan kelelahan yang paling berat. Di Célébes bagian tengah ia dikenal sebagai "Datu ri tana", sebuah nama yang diberikan kepadanya secara mengejek oleh To Luwu, ia mengklaim bahwa gelar yang sangat disukainya tersebut diterimanya dari mantan Datu Luwu.

Ia adalah pribadi yang kuat yang selalu mencampuri urusan para pengikutnya secara

pribadi, sehingga menjadikan pertikaian sebagai urusannya dan mengajak seluruh rakyat untuk berperang guna menyelesaikannya. Ia tidak suka menunda-nunda suatu masalah, itulah sebabnya ia menyelesaikan pertikaian tanpa terlebih dahulu memanggil salah seorang Karua atau Bonto. Para penasihat ini, yang hanya dimintai pendapatnya dalam kasus-kasus yang sangat mendesak, tidak banyak bicara dan karena itu lebih suka bergabung dengan Makole wawa inia yang lain.

Ia cukup mengenal negaranya, telah melintasinya ke beberapa arah sehingga ia dapat menjadi pemimpin yang baik, seandainya saja kecanduannya terhadap minuman keras tidak sering membuatnya melakukan kekejaman dan kejahatan lainnya.

Seorang pedagang kaya di Tambayoli, seorang Haji Lagangka alias La Mohamad Jafar, yang menikah dengan salah seorang dari banyak budak Marunduh, memiliki pengaruh yang besar padanya. Ia mungkin berutang pengaruh ini pada kenyataan bahwa ia terutama yang memastikan bahwa Marunduh mendapatkan buangtana yang menjadi haknya.

Marunduh memiliki anak dari beberapa budaknya; ia tidak pernah memiliki istri yang sah. Putra-putranya yang sudah dewasa bernama Lалуasa dan Owolu, yang pertama tinggal di NgUsumbatu, yang terakhir tinggal di rumah terpisah di Matandouw. Dua putra Marunduh yang lebih muda, bernama Makita dan Pabesé, tinggal bersama sang ayah. Tak seorang pun dari anak-anak ini berhak menggantikan sang ayah sebagai Makole karena betapa pun bebasnya para kepala suku dalam memilih raja baru, mereka harus memperhatikan kelahiran para kandidat karena orang yang lebih tinggi tidak akan pernah bisa dilewati dan digantikan oleh orang yang kelahirannya lebih rendah. Hanya satu

pengecualian untuk hal ini yang dibolehkan dan itu adalah ketika pilihan harus jatuh pada anak yang terlalu muda.

Kasus ini terjadi baik dengan terpilihnya Marunduh maupun dengan terpilihnya Édé. Baik ibu dari salah satu maupun yang lainnya adalah perempuan dari kelas bawah. Akan tetapi, ketika para pendahulu mereka meninggal, yang paling berhak terlalu muda untuk menjadi Makole. Sebagai calon penggantinya di Pemerintahan, Marunduh menunjuk saya seorang La Bolio (atau Wolio) Papa-i Madusila, putra almarhum saudara tirinya Waunggé dan lahir dari perkawinan sah. La Bolio ini disebutkan kepada saya sebagai orang yang baik hati terhadap Pemerintahan. Ia tinggal di Matandouw.

Makole wawa inia kedua bernama Édé; ia juga dikenal sebagai Makole Kamisi dan tinggal di Tògò. Ia adalah saudara jauh Marunduh dan menikah dengan sepupunya Dawa, yang telah diceraikannya sekitar empat tahun lalu. Sejak saat itu, Marunduh dan Édé tidak lagi hidup rukun satu sama lain, tanpa menimbulkan permusuhan sejauh ini.

Marunduh dengan senang hati menyelesaikan masalah tersebut dan telah melakukan beberapa upaya untuk melakukannya, yang semuanya ditanggapi dengan keras kepala Édé; ia didukung oleh istri-istrinya yang tidak sah, yang satu di antaranya tinggal di Tògò, satu di kebunnya di Koromatombi, dan satu di kebun lainnya di Talangaré.

Kedua kebun ini terletak di jalan Tògò-Tompira, satu jam perjalanan dari Tògò, satu di sebelah kanan, yang lainnya di sebelah kiri jalan. Makole Édé adalah seorang pria berusia + 35 tahun, bertubuh sedang dan berkulit sangat cerah. Ia mengonsumsi minuman keras (arak) secara bebas namun tidak berlebihan, tidak seperti Marunduh, memiliki tata krama

yang beradab dan tidak keberatan bertemu dengan orang Eropa. Akan tetapi, ia bukanlah seorang administrator yang tegas dan lebih suka menyerahkan penyelesaian masalah kepada Bonto atau salah seorang Karua.

Seperti Marunduh, ia tidak memiliki anak sah. Calon penggantinya yang disebut La Pasila, adalah putra almarhum saudaranya Makole To Sugi dan tinggal di Tògò.

Tokoh-tokoh berdarah bangsawan berikut ini juga masih hidup, yaitu:

1. Makole Pumbeu, kepala suku To Kangua, tinggal di Sorombu; salah seorang putrinya menikah dengan seorang keturunan bangsawan dari Motandouw;

2. Makole Sampalea; ia juga tinggal di Sorombu;

3. Makole La Getie atau Poketi, kepala suku To Toli-Toli atau Pampawu, tinggal di Poontangowa; salah seorang keponakannya, bernama Taba, menikah dengan saudara tiri Marunduh.

4. Landika, tinggal di Motandouw dan menikah dengan Wé Gili, saudara tiri Makole Édé.

Orang-orang yang disebutkan pada nomor 1 hingga 3 disebutkan kepada saya sebagai orang-orang yang dicintai oleh bawahan mereka dan bersikap baik terhadap Pemerintah. Akan tetapi, saya enggan menjawab pertanyaan apakah mereka akan tetap menjadi orang-orang yang baik jika Pemerintah melaksanakan niatnya untuk menjadikan Landschap Mori sebagai sasaran pengawasan administratif Eropa dan perpajakan terkait. Selama perjalanan saya, saya mendapat kesan kuat bahwa banyak kebijakan politik harus diterapkan, khususnya yang berkaitan dengan Marunduh jika kita ingin melaksanakan reformasi yang kita maksudkan tanpa menggunakan kekerasan.

Makole Édé memiliki hubungan dekat dari pihak ibunya dengan Bonto saat ini, yang disebut Poondelu. Orang ini bertindak sebagai komandan pasukan di masa perang; di masa damai ia sering ditugaskan untuk menyampaikan beberapa pesan dari salah satu Wawa inia Makole kepada palili atau kepada raja di daerah tetangga.

Karua Moiki saat ini disebut Kolapa; ia tinggal di Wawa inia.

Karua lainnya disebut Taralelu dan tinggal di Pansu, di tepi kanan Sungai Sakita.

Pendapatan semua kepala suku ini awalnya hanya berupa pungutan dalam bentuk barang dari bawahan mereka. Seiring berkembangnya perdagangan damar dan rotan, hak atas hutan pun bertambah. Marunduh menerima bagian terbesar dari hasil hak ini, seperti yang saya ketahui setelah melakukan penelitian bahwa ia setiap tahun menerima sejumlah f 1000 dari hasil buangana saja.

Pajak hutan ini hanya dikenakan kepada para pengumpul damar dan rotan yang bukan penduduk asli Mori dan dapat dibayar tidak hanya dengan uang, tetapi juga dengan kain, yang kemudian dinilai lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Jumlah mereka yang berhasil mengelak tidaklah sedikit, jika memperhitungkan jumlah pengumpul hasil hutan asing diperkirakan mencapai 600 hingga 700 orang di wilayah kekuasaan Marunduh. Menurut informasi yang ada, rekan Makole-nya hanya akan menerima tidak lebih buangana dari 300 gulden setahun.

Yang disebut To Mori pegunungan, tentang siapa saya akan ceritakan lebih lanjut, dan beberapa pengikut lainnya setiap tahun membawa beras ke Marunduh, dan ayam, sirih, pinang, arak yang disuling dari tuak atau Tuwak yang disuling dari beras; jumlah uang dari hasil pungutan ini tidak dapat dihitung karena tidak ada patokan pasti untuk pungutan

tersebut. Sebagian akan diberikan kepada Makole Édé.

“Palili” lainnya membuktikan ketergantungan mereka pada Mori melalui hasil produksi lilin dan kerbau setiap kali perayaan kurban besar yang dirayakan oleh salah satu wawa inia Makole, atau ketika seorang anggota keluarga kerajaan meninggal. Jadi, To Pakambia dan To Pu'umbana menghasilkan 75 pipa lilin dan To Pada dua kerbau ketika seorang pangeran dari keluarga bangsawan meninggal. Jika seorang keturunan bangsawan yang lahir dari keluarga bangsawan meninggal, hasilnya hanya setengahnya.

Pendapatan Makole Petasia juga harus mencakup apa yang disebut pembelian kerbau dari To Pada; pembayaran per kerbau berjumlah satu gong atau satu dulang (piring tembaga dengan alas) yang dilubangi terlebih dahulu agar benda itu tidak dapat digunakan.

Sumber pendapatan lain bagi Makole dan kepala suku yang lebih rendah disediakan oleh pengadilan. Hukuman yang dijatuhkan untuk kejahatan, termasuk pembunuhan, adalah denda sementara pembayaran juga diperlukan untuk penyelesaian kasus perdata. Terakhir, raja memiliki akses yang hampir tak terbatas terhadap para pekerja milik rakyatnya, yang sering mereka manfaatkan untuk mengambil damar dan rotan dari hutan untuk diri mereka sendiri.

§ 4. Hubungan Landschap Mori dengan Landschap Pemerintahan Sendiri di sekitarnya.

a. Hubungan dengan Luwu.

Luwu juga menganggap Landschap Mori sebagai salah satu negara bawahannya atau palili. Kerajaan Luwu saat ini bahkan mengklaim bahwa, seperti halnya Palu, Buton, dan wilayah Poso, Landschap Bungku dan Banggai pernah menjadi bagian dari Luwu yang dulu begitu kuat dan bahwa pada saat itu

Bungku menguasai Banggai dan Mori. Mengapa? upeti yang menjadi hak Luwu dari ketiga bentang alam ini dikumpulkan di Bungku. Bungku kemudian selalu mengurus pemindahannya ke Palopo hingga Datu Luwu ke-22 yang disebut Matinro Eri Malangké, melanggar adat menunggu upeti, mengirim utusan ke Bungku untuk mengklaimnya. To Bungku tidak menoleransi pelanggaran adat kuno ini, diduga membunuh utusan tersebut, suatu tindakan yang hingga kini tidak dihukum. Sejak saat itu, Luwu tidak lagi berhubungan dengan Bungku maupun Banggai. Namun, hubungan dengan Mori tetap terjalin.

Begitulah Kerajaan Luwu.

Pemerintah Mori saat ini, bagaimanapun, tidak mau mendengar tentang subordinasi kepada Bungku, bahkan di tahun-tahun sebelumnya tetapi mengakui bahwa Landschap di bawah administrasinya telah berada di bawah kekuasaan Luwu sejak dahulu kala. Baik Makole Marunduh dan Édé maupun Toli-Toli dan Kangua sepenuhnya mengakui kepada saya bahwa mereka adalah pengikut Datu Luwu dan tidak akan menolak untuk memenuhi panggilan dari yang terakhir untuk datang ke Palopo. Mereka selanjutnya mengakui bahwa Mori berkewajiban untuk membuat penampilan tahunan di Palopo pada kesempatan itu yang berikut ini dipersembahkan sebagai upeti kepada Datu: 1 budak (méa), (banrangang),

3 tombak dengan bulu kuda

3 perisai (kanta),

1 kléwang (pisau),

sejumlah kulit kayu yang dipukul (Bunta) dan sejumlah lilin (pantieng). Namun, Mori belum memenuhi kewajiban ini selama sembilan tahun; alasan yang diberikan Marunduh dan Édé kepada saya untuk ini sama persis dengan alasan yang diberikan kepada saya oleh Makole dari Matano dan Nuha, dua

daerah jajahan Luwu yang berbatasan dengan Landschap To Mori, yang menurut pandangan Luwu dan Mori, daerah jajahan Marunduh sangat erat hubungannya.

Demi kelengkapan, saya ingin menyebutkan di sini bahwa Makole dari Petasia harus memastikan bahwa bilah-bilah lantai diamankan dengan pasak kayu selama pembangunan istana di Palopo.

b. Hubungan dengan Bungku.

Para raja Mori membantah keras bahwa Bungku menguasai Mori pada tahun-tahun sebelumnya. Hingga empat puluh tahun yang lalu para pendahulu mereka terus-menerus berperang dengan rekan-rekan mereka dari Bungku. Perseteruan yang tak terelakkan tampaknya terjadi antara kedua Negara, yang saling berperang dengan berbagai keberuntungan hingga ekspedisi yang dikirim oleh Pemerintah untuk melawan Mori pada tahun 1855 mengakhiri pertikaian itu untuk selamanya. Makole dari Wawantuko saat itu menyerah setelah jatuhnya benteng Insaondau, sementara Makole dari Petasia pasti berhasil menghindari penangkapan dengan melarikan diri. Pasukan kita saat itu didukung oleh pasukan pembantu Ternate dan Bungku, suatu keadaan yang masih memberi alasan bagi kerajaan dari negara bagian terakhir untuk berbicara tentang Mori sebagai milik Pemerintah dan Sultan Ternate. Akan tetapi, pemerintah Mori menolak untuk mengakui subordinasi kepada Ternate, dengan alasan bahwa raja Petasia saat itu tidak akan menyerah. Bahkan jika Pemerintah dan Ternate menuai keuntungan dari hal ini segera setelah ekspedisi tersebut, dapat dipastikan bahwa baik kami maupun Sultan tidak peduli dengan Mori dalam tiga puluh tahun terakhir dan mereka juga tidak memperoleh keuntungan apa pun darinya sehingga raja-raja Mori pada saat itu,

menurut saya, bersikap sepenuhnya netral terhadap kami dan terhadap Ternate.

Meskipun ekspedisi tahun 1856 juga mengakhiri permusuhan antara Bungku dan Mori, setelah itu hubungan antara raja-raja mereka tetap sangat dingin. Petani Mori memang datang untuk menjual padi atau beras mereka, sering kali juga tembakau di daerah Bungku, tetapi hubungan antara kedua keluarga kerajaan tersebut gagal berkembang. Situasi ini tidak berubah hingga saat ini, bahkan setelah upaya pada tahun 1902 oleh Residen Ternate saat itu, Dr. Horst, untuk mendamaikan raja-raja Bungku dan Mori di Tompira.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak dapat diragukan lagi bahwa kedua kepala Landschap itu memiliki hubungan yang erat. Akan tetapi, kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka memiliki leluhur yang sama, yaitu seorang pangeran yang turun dari surga, yang juga merupakan leluhur raja-raja Tojo, Banggai, Buton, dan Kendari serta Makole dari Matano.

c. Hubungan dengan Landschap-Landschap yang termasuk dalam Sub-Distrik Poso.

Marunduh dan Édé menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan keluarga atau ikatan lainnya dengan kepala-kepala daerah tersebut. Mereka tidak hidup dalam permusuhan dengan kepala-kepala daerah tersebut, sebagaimana terlihat dari banyaknya penduduk Landschap Mori yang mencari damar tetapi tidak ada hubungan kekerabatan yang tetap antara kepala-kepala daerah tersebut.

§ 5. Persebaran penduduk dan jumlah laki-laki yang sehat jasmani.

Penduduk di Landschap Mori dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu penduduk asli dan penduduk asing. Penduduk asing terdiri

dari:

1. To Lolaki, yang berasal dari Laiwui dan sekitar 150 orang laki-laki yang sehat jasmani, yang 80 hingga 90 orang di antaranya tinggal di utara sungai La dan sisanya di daerah hulu sungai Puabu dan Sokita yang bekerja sebagai pengumpul damar dan rotan. Mereka adalah pemain dadu ulung, yang tidak ragu-ragu bermain dadu sendiri dan, selain beberapa orang Bugis, mengajarkan penduduk Mori cara bermain dadu; sebagian besar dari mereka tinggal di gubuk-gubuk di hutan yang telah mereka ubah menjadi tempat bermain yang sebenarnya;

2. Orang-orang dari Luwu dan Sub-Distrik Poso; mereka merupakan komponen utama para pencari damar yang ada di pedalaman Mori, populasi terapung yang jumlah laki-lakinya dapat diperkirakan dengan pasti antara 7 hingga 800 orang;

3. Suku Bugis; Mereka sebagian besar berprofesi sebagai pedagang namun ada juga yang berprofesi sebagai pemain dadu atau membangun kebun di sepanjang tepian Sungai La. Jumlah keseluruhan + 200 orang laki-laki yang sehat jasmani.

Semua orang asing ini, sebagaimana yang diberitahukan oleh Posthouder Bungku kepada saya, dianggap sebagai subjek Pemerintah. Perselisihan kecil yang timbul di antara mereka diselesaikan oleh Kapitan mereka atau, jika menyangkut kelompok yang disebutkan di bawah 2, oleh Haji Lagangka yang disebutkan di atas; jika perselisihan ini timbul di antara mereka dan subjek raja-raja Mori, penyelesaian akan dilakukan oleh kepala-kepala tersebut sesuai dengan raja-raja ini. Jika tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai atau jika menyangkut perselisihan penting atau kasus pidana, keputusan Posthouder tersebut akan diberlakukan.

Sejak 1894, orang Bugis telah membayar

pajak pribadi kepada Pemerintah; orang asing lainnya dinilai pajak itu untuk pertama kalinya pada tahun 1901; banyak dari yang terakhir, termasuk orang-orang To Lolaki yang mengumpulkan damar di utara La, berhasil menghindari penilaian ini.

Kita dapat membedakan penduduk asli Mori menjadi tiga divisi, yaitu:

- a. To Mori yang sebenarnya;
- b. suku-suku yang telah berhasil ditundukkan oleh raja-raja Mori di bawah otoritas mereka selama perjalanan waktu dan
- c. suku-suku yang datang dari Landschap lain telah lama menetap di wilayah To Mori, sehingga terpaksa mengakui raja Petasia sebagai tuan mereka.

Suku-suku yang disebutkan di bawah b dan c adalah "palili" atau pengikut Mori yang sebenarnya; namun, mereka juga mencakup berbagai suku yang termasuk dalam divisi a, yaitu yang disebut Tomori-Pegunungan, karena mereka telah dikuasai sepanjang masa dan masih dikuasai hingga saat ini oleh Tomori-dataran selatan yang mendiami wilayah antara hulu Sungai Puabu dan hulu Sungai La. Dari hulu Sungai La, peran Makole wawa inia secara bertahap berkembang.

Sub a. Bahwa Tomori-Pegunungan Hilir awalnya milik satu suku yang sama terbukti tidak hanya dari fakta bahwa moral dan adat istiadatnya sepenuhnya identik tetapi juga dari kesamaan bahasa, kecuali beberapa penyimpangan kecil. Mereka adalah orang-orang pegunungan yang hidup sangat tersebar di masa damai, baik di pegunungan maupun di tepi Sungai La dan hanya berkumpul di desa-desa induk di masa bahaya.

Desa-desa induk ini benar-benar hancur ketika keadaan damai berlangsung lama;

seluruh penduduknya kemudian berada di luar dan tidak mempedulikannya. Sementara desa-desa di Tomori Hilir lebih banyak terletak di dataran, desa-desa di Gunung Tomori terletak di pegunungan yang tidak ramah. Kesamaan mereka adalah bahwa mereka sangat rentan terhadap penggusuran. Kita telah melihat ini di atas dari tempat tinggal kedua wawa inia Makole.

Sub. b. Ini termasuk suku-suku berikut.

1. Suku To Moiki; mereka mendiami sebagian wilayah Tomori bagian bawah antara Tògò dan Tompira; Mereka tidak memiliki kampung yang berarti, karena rumah mereka tersebar seluas rumah-rumah di To Mori;
2. Suku To Watu, yang selanjutnya dibedakan menjadi To Watu Lembo, To Watu Baturede dan To Watu Malupu, mereka semua tinggal di daerah aliran sungai Puabu dan Sokita yang lebih rendah, yang terakhir lebih ke arah laut, yang pertama lebih jauh ke pedalaman;
3. Suku To Molongkuni,
4. Suku To Ulowooi dan
5. Suku To Lasi (nama umum untuk suku To Mobahono dan To Reaa yang disebutkan di atas). Ketiga suku ini mendiami bagian selatan wilayah Mori, To Lasi yang berjarak setengah hari berjalan kaki dari pantai utara Danau Matano, To Ulowaai atau Ulubaho (= asal air) di hulu Sungai Sokita dan di wilayah pegunungan di sekitarnya, To Molongkuni di utara dari yang sebelumnya dan selatan pegunungan tepi Mori. Mereka termasuk suku Kinadu, musuh turun-temurun suku yang berbahasa Bare'e.

To Ulowaai (lebih baik: To Ulu Uwai) khususnya sangat menderita akibat ekspedisi pengayauan yang dilakukan oleh suku yang terakhir yang terakhir pada tahun 1899 ketika seluruh desa mereka dibantai.

Sub c. Ini termasuk suku-suku yang berbahasa Barée dari To Pakambia, To Pusumbana, To Pada, To Watu, To Tananda dan To Kalal. ("Bare'e" berarti "tidak" dalam bahasa mereka; untuk ini suku To Mori, serta To Bungku dan To Nuha, mengatakan "nahina", untuk "ada" suku To Mori mengatakan "ndiao", suku To Bungku "nukuwa" dan penutur Barée "reeya"). Suku To Pakambia berasal dari Landschap Ondal yang termasuk dalam sub-distrik Poso, sisanya dari Lagé, yang juga termasuk dalam distrik administratif itu. Kita menemukan buktinya dalam kenyataan bahwa sebagian dari To Pakambia sekarang masih dianggap milik Ondal dan bahwa tidak ada festival pengorbanan yang signifikan dapat dirayakan oleh suku To Pada, To Pu'umbana, To Watu, To Tananda dan To Kolor tanpa banyak tamu dari Lagé yang hadir di sana. Tiga suku yang terakhir mendiami bagian timur dataran luas yang dilalui Sungai La, To Pada di tengah dataran tersebut, To Pu'umbana di pegunungan sebelah barat rangkaian pegunungan Pelleru, sementara To Pakambia juga mendiami pegunungan sebelah barat Pu'umbana di sepanjang tepi kiri Sungai Yuento, salah satu dari tiga sungai besar tempat Sungai La mengalir.

Saya memperoleh informasi dari Marunduh, Édé, dan beberapa kepala suku bawahan mengenai jumlah laki-laki sehat di antara penduduk asli, yang sebagian saya peroleh, baik dengan menanyakan langsung kepada beberapa kepala suku mengenai nama-nama bawahan mereka, atau saya dapat memverifikasi dengan bantuan pedagang Bugis yang sering berada di pedalaman Mori.

Karena hasil yang saya peroleh dengan verifikasi ini mendukung keandalan pernyataan yang disampaikan kepada saya oleh Marunduh dkk., saya berani menyebutkannya dalam

pernyataan berikut, sementara saya juga ingin mencatat di sini bahwa ketidakpercayaan yang saya terima di pedesaan oleh para kepala suku dan penduduk, sehubungan dengan rumor yang beredar tentang perlawanan yang akan datang, menghalangi saya untuk melakukan penyelidikan lebih rinci mengenai kredibilitas informasi yang diberikan kepada saya.

Bagan yang menunjukkan jumlah laki-laki sehat jasmani dari berbagai suku yang membentuk penduduk asli Mori:

Di bawah Ke Mori 258 laki-laki sehat jasmani.

Gunung Ke Mori 1618.

Suku To Taipa tidak termasuk dalam bagan meskipun mereka tinggal di wilayah Mori di tiga kampung, yaitu Pombalaan, Tinolili dan Korolobani yang bersama-sama memiliki 18 rumah dan 30 orang laki-laki yang sehat jasmani. Setahun yang lalu suku To Taipa meninggalkan bekas wilayah mereka di selatan Danau Matano tanpa menarik diri dari otoritas kepala suku Nuha yang mana mereka adalah "palili" atau pengikut. Mereka masih menjadi pengikut, menurut pernyataan mereka sendiri dan menurut Marunduh. Akan tetapi, suku To Taipa tidak datang dengan urusan mereka ke Sorowako, tempat tinggal Makole Nuha tetapi menyerahkannya kepada Tobeti untuk mengurusnya karena mereka tinggal di sekitar Poontangowa, tempat tinggal Makole Pobeti dan yang terakhir ini tidak hanya berhubungan dengan Makole Nuha tetapi juga berteman baik dengannya.

§6. Persenjataan, metode perang, dsb.

Tidak ada To Mori yang meninggalkan desanya, meskipun hanya untuk jarak dekat, tanpa sedikitnya kléwang atau pangko, tetapi

biasanya juga tombaknya, yang merupakan senjata yang sangat ia kuasai; banyak To Mori yang bangga karena mampu memenggal kepala seseorang dengan sekali tebasan kléwang. Klewang sering kali dilengkapi dengan seikat rambut pada gagangnya, yang berasal dari orang-orang yang dipenggal oleh pemiliknya; para kekasih menggunakan rambut tunangan mereka untuk tujuan ini, sementara yang lain menggunakan seikat rambut kambing. Ujung tombak memiliki bentuk yang berbeda-beda, dengan atau tanpa satu atau lebih duri; tombak ini paling sering digunakan untuk melempar.

Sumpitan juga digunakan dalam perang untuk menembakkan anak panah beracun. To Mori sangat ahli dalam hal ini. Di sisi lain, hanya sedikit yang tahu cara menggunakan senjata api. Selain itu, jumlah senjata ini kecil dan dapat diperkirakan dengan pasti tidak lebih dari 100, yang sekitar 30 di antaranya dimiliki oleh Marunduh. Ia dan Èdé masing-masing memiliki beberapa senapan isi ulang belakang (Beaumont); selain itu, hanya ada senapan isi ulang drum dan senapan flintlock, yang sebagian besar kurang dirawat.

Selain itu, suku To Lolaki yang mencari damar memiliki beberapa senapan laras panjang, sementara senapan terbaik ditemukan di antara para pedagang Bugis. Seperti yang diberitahukan oleh pemegang pos kepada saya, mereka tidak memiliki izin untuk kepemilikan itu.

Menurut kapten Bungimtimbé, ada 15 senapan di pulau ini. Saya tidak dapat memperoleh pernyataan dari Tambayoli karena jumlah senapan di sana diperkirakan oleh posthoulder sebanyak 80.

Pada masa perang, suku To Mori berkumpul di desa induk mereka yang mereka persiapkan untuk menahan badai sebaik mungkin, atau memilih titik-titik yang sulit diakses di pegunungan tempat mereka mendirikan tempat

perlindungan sementara. Kadang-kadang tembok pembatas tanah setinggi 1 meter dipasang dan ditanami ranju, sementara ini juga sering dimasukkan ke dalam pagar bambu yang digunakan untuk mengepung kampung induk dengan tergesa-gesa. Sarang serigala juga dibuat di jalur akses, yang mereka sendiri tahu cara mengenalinya tetapi bisa sangat berbahaya bagi musuh. Alat pertahanannya juga termasuk meriam tembaga dan lilla, yang jumlahnya relatif banyak, namun tidak terlalu berbahaya di tangan suku To Mori.

Suku To Mori tidak pernah bertempur di medan terbuka; peperangan mereka terbatas pada pengorganisasian penyerbuan untuk pengayauan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terdiri dari 2 hingga 300 orang yang diberi persediaan makanan selama 2 hingga 3 bulan. Mereka bergerak ke hutan-hutan di wilayah musuh, tempat mereka bersembunyi di dekat jalan setapak yang melewatinya untuk melampiaskan nafsu membunuh mereka kepada orang-orang yang lewat yang tidak waspada, yang merupakan anggota kelompok musuh dan jumlahnya jauh lebih sedikit daripada mereka. Begitu satu atau dua kepala berhasil direbut, kelompok itu pulang dan disambut dengan sorak-sorai oleh orang-orang yang tertinggal, seolah-olah mereka telah meraih kemenangan besar. Kepala-kepala yang direbut kemudian disimpan di “lobo” atau rumah kurban desa. Kadang-kadang penyerbuan ke kampung-kampung dilakukan pada malam hari yang jika berhasil, akan dibakar.

§7. Mata pencaharian.

a. Pertanian.

Penduduk asli mencari nafkah utamanya dari pertanian. Umumnya, padi ditanam di lahan kering; sawah tidak ditemukan di mana pun meskipun pembangunannya di berbagai

tempat yang tidak akan menimbulkan kesulitan. Namun, orang To Mori merasa lebih mudah untuk mengolah lahan hutan yang diolah selama dua hingga tiga tahun, setelah itu dibiarkan untuk orang lain. Setelah dibiarkan terlantar selama beberapa tahun, ladang tersebut diolah kembali oleh para pembuka ladang. Oleh karena itu, terjadi perpindahan penduduk secara terus-menerus, sementara salah satu konsekuensi dari situasi ini adalah pegunungan secara bertahap menjadi gundul.

Pengolahan sawah tidak dimulai pada waktu yang sama di mana-mana. Sementara di daerah yang lebih rendah pengolahan ladang baru sudah dimulai pada bulan September, di daerah pegunungan, di sisi lain, panen baru saja berakhir.

Curah hujan turun sepanjang tahun tetapi sebagian besar jatuh antara bulan Januari dan Juli. Padi yang dipanen sebagian disimpan di lumbung-lumbung yang dibuat khusus untuk keperluan ini, kemudian dibawa keluar pada saat perayaan dan sebagian lagi dibawa ke pasar Sokoio atau Tompira dan Sampo-lowo, yang kemudian ditukar dengan kain linen, arak, gambir atau garam kepada pedagang dan kios Bugis, atau kepada To Bungku untuk dijadikan sarung tenun. Makanan utama To Mori adalah sagu yang banyak dibudidayakan. Jagung juga dikonsumsi, yang seperti tembakau, kapas dan beberapa varietas kacang-kacangan, ditanam sebagai tanaman kedua. Dari produk-produk ini, hanya sebagian tembakau yang diekspor ke Bungku.

b. Peternakan sapi.

Kerbau ditemukan dalam jumlah besar; hewan-hewan tersebut kurang mendapat perhatian; mereka dibiarkan berkeliaran bebas sehingga mayoritas kini hidup liar di hutan; ketika dirawat, mereka disimpan di bawah rumah. Oleh karena itu, kita tidak dapat

berbicara tentang operasi peternakan tertentu; hanya suku To Pada yang mengembangbiakkan kerbau dalam skala besar yang dimungkinkan oleh padang rumput luas yang ditinggalkannya. Beberapa kali dalam setahun rumput-rumput tinggi dibakar di sana; tunas-tunas muda kemudian menjadi makanan yang sangat baik bagi kerbau.

Hewan-hewan ini tidak digunakan dalam pertanian atau pekerjaan lain apa pun; dagingnya hanya dikonsumsi pada acara-acara perayaan.

Kuda hanya ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit di Landschap Mori; sebagian besar kuda ditemukan di antara suku To Pu'umbana.

Babi domestik dapat ditemukan di setiap kampung; akibatnya penduduknya tidak mempraktikkan agama Islam. Kecuali raja dan anggota keluarga kerajaan, semua suku To Mori memakan daging babi. Daging babi asap sering dijual di pasar di Sampo-lowo. Namun, secara umum, To Mori hanya menjual babi lokalnya kepada orang asing dengan harga tinggi (10 gulden hingga 25 gulden).

Hal yang sama berlaku untuk unggas.

c. Perburuan dan penangkapan ikan.

Rusa dan babi, yang umumnya ditemukan di alam liar, sering diburu oleh suku To Mori. Ular air besar juga diburu, yang dagingnya sering dikonsumsi.

Penangkapan ikan tidak terlalu penting; sebagian besar penangkapan kerang dilakukan di Sungai La.

d. Industri.

Cabang-cabang utama industri meliputi:

1. penempaan besi; besi diperoleh dari pegunungan di sekitar Danau Matano; bilah yang terbuat dari besi tersebut telah memperoleh reputasi tertentu. Namun,

ekspornya telah menurun drastis karena suku To Mori tidak dapat bersaing dengan produk asing.

2. pengecoran tembaga, yang menggunakan tembaga dari barang-barang tembaga yang diimpor dari tempat lain dan dari koin. Cincin lengan, jari, dan pergelangan kaki, lonceng, dan bel dibuat dari tembaga, yang dikenakan oleh suku To Mori dan suku Toraja lainnya pada tali di pinggang mereka dan tabung untuk menghancurkan sirih bagi mereka yang tidak dapat lagi mengunyahnya dengan gigi mereka. Benda-benda ini biasanya dibuat dengan hasil akhir yang kasar tetapi sangat diminati di Sulawesi Tengah.

3. pembuatan tembikar;

4. memukul pakaian dari kulit pohon;

5. menenun tikar, yang sebagian besar dilakukan oleh kaum perempuan

6. pembuatan garam, yang untuknya suku To Mori melakukan perjalanan ke Towara di pantai Bungku.

e. Pengumpulan hasil hutan.

Pengumpulan hasil hutan terutama dilakukan oleh penduduk dari daerah lain, di antaranya suku Toraja dari Kulawi, Bada, Leboni, Rongkong, Masamba, dan daerah Poso, di samping penduduk dari Laiwui dan Bungku. Sebagian besar dari mereka kembali ke negaranya setelah tinggal beberapa bulan; sebagian kecil hanya tinggal selama 2 sampai 3 tahun, yang selama itu mereka mengabdikan diri untuk bertani di samping mengumpulkan damar.

Penduduk asli Mori baru mengumpulkan hasil hutan setelah mereka selesai bercocok tanam dan kecintaan mereka yang besar terhadap arak telah mengalahkan kemalasan mereka yang kuat, atau ketika mereka diperintahkan untuk melakukannya oleh para pemimpin tertinggi mereka, yang secara

eksklusif menikmati manfaatnya, mereka hanya menyediakan makanan bagi orang-orang yang bergantung padanya.

Hasil hutan yang utama adalah damar dan rotan. Selain itu, sejumlah kecil lilin dikumpulkan. Hutan di pegunungan juga kaya akan kayu yang bagus, cocok untuk membangun rumah dan perahu. Namun, pembuatan kano terbatas pada pembuatan sampan kecil untuk penggunaan sendiri, sementara kayunya tidak diekspor sama sekali; namun pembuangannya di sepanjang sungai besar La dan Puabu tidak menemui banyak kendala. Jenis kayu terbaik adalah kayu besi, *Kitex cofassus* atau kayu biti dan dua jenis kayu cempaga (*Michelia* sp.)

f. Perdagangan.

Hingga sekitar 40 hingga 50 tahun yang lalu, perdagangan ini tidak lebih dari sekadar barter internal, yang titik fokusnya adalah Sokoio yang disebutkan di atas, dan Sokita sekitar +/- sembilan jam berjalan kaki ke utara. Saat itu, orang asing tidak dapat berdagang apa pun dengan penduduk Alfur, yang hampir tidak memiliki kebutuhan sehingga mereka jarang muncul di pasar yang disebutkan di atas. Hal ini berangsur-angsur berubah ketika, di berbagai suku, pria dan wanita menginginkan pakaian yang lebih baik daripada cidako dan pakaian yang terbuat dari kulit pohon. Namun, peningkatan besar dalam lalu lintas antara penduduk asli dan pedagang hanya terjadi ketika harga damar naik. Suku Bugis dan To Bungku, juga beberapa orang Tionghoa dan Arab kemudian menetap di sepanjang pantai Teluk Mori, menciptakan tempat perdagangan Tambayoli, Towi, Bungimtimké dan Lingkobu; mereka berhasil membujuk orang Toraja dari Landschap lain untuk mencoba peruntungan mereka di hutan-hutan di pegunungan Teluk tersebut dan keuntungan

yang mereka peroleh menarik orang lain ke wilayah ini, yang sangat kaya akan damar. Namun, perdagangan damar juga berkembang di selatan, sehingga memunculkan kota dagang Warau yang kini sangat penting di Weula, wilayah saudara Matano. Oleh karena itu, pasar di Sokoio lebih sering dikunjungi, sering kali lebih dari seribu orang. Hal ini masih terjadi hingga sekitar 9 tahun yang lalu; ekspedisi pengayauan yang dilakukan oleh Daeng Marowa mengurangi kunjungan ke pasar hingga setengahnya. Pasar, yang sebenarnya berada di luar wilayah Mori, sangat penting karena alasan ini, terlebih lagi bagi penduduk Nuha dan Matano yang memasok beras dari Mori di sana.

Pasar di Sokita sudah tidak ada lagi sejak penyerbuan itu.

Selain pasar di Sokoio yang diadakan setiap 20 hari sekali, ada banyak tempat di wilayah Mori - yang disebut Olu - tempat penduduk asli berkumpul pada hari-hari tertentu untuk saling bertukar bahan makanan, buah-buahan, dan barang-barang kecil; yang terpenting di antaranya adalah Sampolowo, yang terletak di tepi kanan Sungai La, tempat para pencari damar dan pengumpul rotan keluar dari hutan setiap tujuh hari untuk membeli tembakau, sirih, pinang, bahan makanan, dll. dari To Mori, sementara yang terakhir datang untuk membeli garam di sana, yang menurut perhitungan saya, akan berada di f10. pikol.

Perdagangan antara orang Toraja, termasuk penduduk Mori dan pengumpul hasil hutan dan para pedagang, sebagian besar masih bersifat barter meskipun uang belum dikenal secara umum oleh yang pertama. Meskipun pada awalnya mereka membiarkan diri mereka ditipu dengan sepotong kain putih senilai f2,00 untuk satu pikol damar, pengetahuan mereka tentang nilai berbagai barang dagangan secara bertahap meningkat sehingga pedagang

tersebut harus mencari cara lain untuk terus mempertahankan keuntungannya sebelumnya. Ia kemudian menemukan jalan keluarnya dengan menipu berat, sehingga alih-alih 1 pikol damar, ia sekarang justru menerima 1½.

Sebagai alat tukar, ia menggunakan potongan kain putih atau merah, sarung, penutup kepala, celana pendek, kain lap, gambir, garam, gong dan arak. Sebagai imbalannya, ia menerima damar, rotan, lilin, beras dan bahan makanan lainnya. Akan tetapi, beras tidak dapat diperoleh dalam jumlah yang cukup sehingga harus diimpor dari tempat lain dan pedagang harus membayar rata-rata f10 (pada masa mahal bahkan f25) per pikol untuk ini.

Semua damar yang diangkut ke pantai Teluk Mori, dan sebagian besar rotan, dibawa dengan perahu barang milik beberapa pedagang dan disebut papalimbang, ke Labua (= Tombuku atau Sokita), dari sana mereka diangkut ke Makassar dengan perahu paket yang berlayar di jalur Kendari. Hanya jenis rotan tebal yang dikirim ke Gorontalo.

Ekspor damar berjumlah +/- 20.000 pikol per tahun. Ekspor rotan, yang baru menjadi penting pada tahun 1900, jumlahnya jauh lebih sedikit dan tidak lebih dari ±5000 pikol.

Saya tidak dapat memperoleh informasi yang dapat diandalkan tentang impor tetapi yang pasti sebagian besar barang yang dikirim setiap bulan ke Labua diangkut ke Teluk Mori, dari sana barang-barang tersebut sampai ke pedalaman Mori.

§8. Sarana lalu lintas dan transportasi.

Sungai-sungai berikut ini penting untuk lalu lintas:

1. La, yang mengalir dari pertemuan tiga sungai besar. Ada banyak jeram di hulu La. Hanya dari atau tepat di luar air terjun Komporésa, sungai ini menjadi sangat penting untuk lalu lintas

karena di sana, jeram, air terjun, maupun batang pohon tidak menghalangi navigasi di sungai.

La dapat dilayari setiap saat oleh tongkang uap, tentu saja sejauh Sampolowo, dan menurut para pedagang Bugis bahkan sejauh Mangantiou (= titik di mana anak sungai kiri Tiu mengalir ke La).

Dengan menggunakan sampan atau rakit, damar dan rotan dari hutan di sisi pegunungan Pu'umbana, Pelleru, dan Lambolo ini diangkut di sepanjang sungai. Situs utama di sini adalah Masa Masara dan sekitarnya, yang terletak di dekat Untuntu, sebuah danau dalam tempat Sungai Tiu berasal. Ini adalah sungai selebar 5-6 meter, sangat mudah dilayari sampan dan digunakan sebagai jalur air oleh para pengumpul damar dan rotan. Jalur air lainnya adalah Lowo atau Ngango-lowo, yang sebagai anak sungai kanan La, membuang airnya di Sampolowo. Airnya berasal dari apa yang disebut Danau Lowo, sebuah kolam yang sangat dangkal (kedalamannya tidak lebih dari satu depa) dengan dasar yang sangat berlumpur dan kaya akan ikan dan berbagai spesies burung air termasuk meliwi atau bebek liar. Sungai ini dialiri oleh dua sungai, yaitu Korompoyo, yang mengalir dari selatan, dan Matandouw yang mengalir ke arah timur laut. Di tepi kiri Matandouw adalah kampung halaman Makole Marunduh. Untuk mencapainya, seseorang juga dapat menggunakan jalan setapak yang cukup baik yang pertama-tama membentang di sepanjang sisi kanan dan kemudian di sepanjang sisi lain Matandouw. Jalan setapak ini dimulai tidak jauh dari muara sungai ini.

Matandouw dapat dicapai dari Sampolowo setelah 3½ hingga 4 jam melalui jalan yang baru saja dijelaskan. Meskipun jalan ini paling umum digunakan, jalan ini tidak direkomendasikan untuk transportasi pasukan

karena alasan-alasan di atas; untuk itu lebih baik meninggalkan Tompira di sungai La dan mengikuti jalan setapak yang mengarah dari sana melewati Tògò ke Matandouw. Dari tempat terakhir hingga muaranya, kedalaman La bervariasi antara 2 dan 3 depa, lebarnya antara 60 dan 100 M.; di depan muara terdapat gundukan pasir yang luas dengan air hanya 2 kaki saat air surut; penduduk asli memperkirakan penurunan saat air pasang mencapai 6 kaki. Ada ombak besar di lokasi tersebut dengan angin timur.

2. Puabu, yang disebut Sambalako di dekat kampung halaman Edé di Togo dan menyatu dengan Sungai Sokita di bawah tempat itu, bersumber seperti Sokita di pegunungan yang membentang sebagai batas utara Danau Matano. Kedua sungai itu penting untuk ekspor rotan dari daerah hulu, yang dikumpulkan di sana oleh To Lolaki.

Di sungai yang menyatu itu arusnya bahkan lebih kuat daripada di La. Sungai Sokita dapat dilayari hingga Poantangowa dan Sungai Puabu dapat dilayari oleh sampan besar hingga Togo. Kampung Lingkobu terletak di muara. Dari sini ke daerah yang dihuni oleh To Watu Malupu, orang tidak punya pilihan selain memasuki daerah Mori di sepanjang Puabu karena medannya berawa. Dengan sampan jarak tempuh dengan arus berlawanan adalah 5 hingga 6 jam.

Terakhir ada jalur air yang masih digunakan: 3. Sumara; berhulu di daerah aliran sungai di pedalaman Toraja, mengalir melewati gunung Pa'a, yang masih berada di wilayah Mori, kemudian mengambil anak sungai Lembuka dan Karangkuni (yang merupakan cabang dari Totua) di sebelah kanan dan Masoyo di sebelah kiri dan kemudian mengalir melalui Lembah Sumara ke Teluk Mori di arah selatan tenggara.

Jalan setapak utama di bentang alam Mori adalah sebagai berikut:

1. jalan dari Tompira ke Sokoio, di pantai utara Danau Matano. Di sebelah selatan danau, di jalan dari Sorowako, tempat dengan ± 100 rumah, terletak di tepi selatan danau tersebut ke Warau, dan jalan yang jarang digunakan yang mengarah dari Paku, juga terletak di tepi selatan danau, dekat dengan jalan setapak ini, ke kota dagang Usu, yang telah menurun pentingnya dalam beberapa tahun terakhir.

Baik jalur Paku-Usu maupun jalur dari Warau ke Sarowako tidak dapat dilalui kuda; jika berjalan dengan baik, perjalanan pertama dapat ditempuh dalam waktu 22 jam, sedangkan perjalanan kedua ditempuh dalam waktu 19 jam.

Perjalanan menyeberangi Danau Matano ditempuh dengan sampan. Penyeberangan memakan waktu $\pm 3\frac{1}{2}$ jam.

Tidak ada kampung di tepi utara danau. Di Sokoio, hanya ada pasar dan warung, tempat orang dapat berkemah dengan mudah. Jalur ini berlanjut dari pasar ini ke arah paling utara-timur laut melewati pegunungan setinggi ± 650 m yang membentuk batas utara Danau Matano. Setelah 4 jam, Anda akan menuruni lembah curam yang dilalui sungai Ulu Aso, anak sungai Sokita yang dapat diarungi dengan air jernih, yang dapat dicapai setelah satu jam. Dari Ulu Aso, jalur utama melewati daerah perbukitan rendah, mudah diakses bahkan oleh kuda, ditumbuhi alang-alang, di mana orang melewati tiga anak sungai yang dapat diarungi dari sisi La (= sungai) Sokita. Setelah berjalan kaki selama lima jam, Anda akan mencapai sungai besar ini di titik yang dulunya merupakan kota dan pasar Sokita; keduanya sudah tidak ada selama sembilan tahun. Di tengah-tengah antara Ulu Aso dan titik ini, jalan yang mengarah dari daerah To Ulu uwoi ke Sokoio datang dari sebelah kiri di jalur utama. Setelah 1 jam berjalan, Anda akan mencapai kampung Toli-Toli, yang telah

ditinggalkan selama dua tahun. Dari sini, sebuah jalur mengarah ke timur laut ke Poontangowa, jalur kedua, yang pertama-tama mengarah ke utara, lalu ke barat laut, mengarah ke kampung To Molongkuni, dikelilingi oleh tembok tanah yang di atasnya berdiri pagger bambu yang hampir lapuk, yang disebut Lembombelala.

Jarak Toli-Toli-Pontangowa adalah $1\frac{1}{2}$ jam, jarak antara Toli-Toli dan Lembombélala $\pm 2\frac{1}{2}$ jam dan jarak dari Poontangowa ke Lembombélala ± 2 jam. Jalur terakhir melewati daerah yang dihuni oleh Suku To Taipa, termasuk melewati kampung Pombalaä.

Dari Lembombélala, sebuah jalur mengarah ke barat menuju kampung Peluwa, sementara jalur utama melalui ladang-ladang mengarah ke sungai Sambaloko, yang dicapai setelah sekitar $1\frac{1}{2}$ jam. Di titik ini sungai dapat diarungi di musim kemarau. Di sisi lain, Anda dapat melihat kampung Tògò, tempat tinggal Makole Edé saat ini. Kampung ini sama sekali tidak dibentengi.

Dari Tògò, sebuah jalur mengarah melewati pegunungan Mori menuju Matandouw, yang terletak sekitar 6 jam di utara Tògò. Jalan setapak utama melewati Talangare yang dapat diarungi - anak sungai kiri Sambaloko. Setelah 2 jam berjalan, Anda akan mencapai Sungai Morokupong, yang selalu dapat diarungi. Setelah melewatinya, Anda akan memasuki area To Moiki. Meskipun jalan setapak tersebut sejauh ini tetap kering, begitu Anda memasuki area hutan, Anda akan melewati tanah lunak dengan banyak akar pohon yang membuat jalan menjadi sulit. Jalan setapak tersebut membaik sekitar 3 jam dari Tompira. Tempat ini dapat dicapai dari Tògò dalam waktu tujuh jam.

Jalan yang dijelaskan di atas merupakan jalan terpenting di Landschap Mori. Koneksi penting masih menyediakan jalur-jalur berikut di sana:

1. jalan yang mengarah dari Matandouw ke Tombancebe, kediaman kepala suku To Pada. Dari Tombancebe jalan setapak berlanjut di sepanjang tepi kanan rawa La, yang harus dilintasi dekat Peréré.

Dari Peréré jalan setapak berlanjut melalui Lembangapa dan Tandabéaga (di wilayah To Ondae) ke Tandokayuku; jarak ke Tombancebe Tandokayuku adalah tiga hari perjalanan yang baik.

2. Jalan dari Tompira melalui wilayah To Watu. Malupu ke Masambuano di wilayah Bungku; jalan setapak ini melewati daerah hutan berlumpur dan tidak hanya digunakan oleh para pencari damar tetapi juga oleh suku To Mori yang datang untuk menukar padi atau beras dengan kain sarung di To Watu yang berada di bawah Bungku.

3. jalur yang sangat ramai dilalui para pencari damar dari Masa Masara melewati Pegunungan Lambolo menuju kota dagang Towi;

4. jalur dagang dari Lagé (Poso) melalui desa Pombala dan Buyumapipi, keduanya dihuni oleh suku To Pakambia, dan melintasi bentang alam Poe-Ubana menuju Tambayoli dan

5. jalan setapak yang sebagian membentang di sepanjang Sungai Sumara dari Tambayoli ke Wekulieng, di Teluk Tomini dan menyediakan jalur penghubung termudah, tetapi juga paling banyak digunakan, antara Bentang Alam Mori dan Tojo. Anda dapat menempuh perjalanan dari Tambayoli ke Wekulieng dalam dua hari.

CATATAN TAMBAHAN REDAKSI.

Dalam menerbitkan catatan di atas yang ditulis untuk kepentingan Pemerintah, tampaknya perlu untuk menarik perhatian pada informasi yang sangat penting mengenai daerah dan orang-orang yang dicakup yang dapat ditemukan dalam artikel-artikel dengan judul "Van Poso naar Mori", "Beberapa catatan etnografi tentang To Bungku dan To Mori" dan

"De Talen der To Boengkoe en To Mori" oleh Dr. N. Adriani dan Alb. C. Kruyt, sebagian bersama-sama atau terpisah, yang diterbitkan dalam *Mededeelingen van Wege het Nederlands Zendelingen Genootschap*, Vol. ke-44, 1900.

Kami menemukan alasan yang lebih kuat untuk ini karena tampaknya mungkin untuk menyimpulkan dari penanganan materi yang sepenuhnya independen bahwa publikasi sebelumnya tetap tidak diketahui oleh penulis catatan atau tidak dapat diakses olehnya.

Sejauh arsip daerah tidak memadai dalam kasus-kasus seperti itu, Perpustakaan Serikat kami selalu siap membantu para peneliti yang serius, sementara Staf Redaksi Jurnal ini dengan senang hati menyediakan data yang diinginkan.